

**ANALISIS STRATEGI DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN
PARIWISATA DALAM MENGELOLA WISATA MELALUI
PENGAWASAN PERTUMBUHAN, EFEKTIVITAS, DAN KONTRIBUSI
RETRIBUSI PARIWISATA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
(Studi Kasus Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :
DENA VIRNALIA INDRIYANTI
NIM.1917201255

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dena Virnalia Indriyanti

NIM : 1917201255

Jenjang : S1

Fakultas : Ekonomi Syariah

Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Syariah

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Strategi Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Dalam Mengelola Wisata Melalui Pengawasan Pertumbuhan, Efektivitas, Dan Kontribusi Retribusi Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Cilacap)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya pribadi kecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 18 Desember 2024

Saya yang menyatakan,



Dena Virnalia Indriyanti

NIM. 1917201255



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**ANALISIS STRATEGI DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
DALAM MENGELOLA WISATA MELALUI PENGAWASAN
PERTUMBUHAN, EFEKTIVITAS, DAN KONTRIBUSI RETRIBUSI
PARIWISATA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
(STUDI KASUS DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN CILACAP)**

Yang disusun oleh Saudara **DENA VIRNALIA INDRIYANTI NIM 1917201255**
Program Studi **S-1 Ekonomi Syariah** Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan
pada hari **Rabu, 18 Desember 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk
memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Parno, S.E., M.S.I.

NIP. 19771128 201101 1 004

Sekretaris Sidang/Penguji

Enjen Zaenal Mutaqin, M.Ud.

NIP. 19881003 201903 1 015

Pembimbing/Penguji

Dr. Atabik, M.Ag.

NIP. 19651205 199303 1 004

Purwokerto, 13 Januari 2025

Mengesahkan

Dekan,



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.

NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

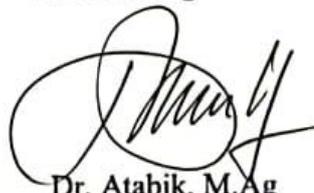
di-Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Dena Vernalia Indriyanti NIM. 1917201255 yang berjudul : Analisis Strategi DISPORAPAR Dalam Mengelola Wisata Melalui Pengawasan Pertumbuhan, Efektivitas, Dan Kontribusi Retribusi Pariwisata Terhadap PAD (Studi Kasus DISPORAPAR Kabupaten Cilacap). Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu ekonomi Syari'ah (S.E)

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Purwokerto,
Pembimbing



Dr. Atabik, M.Ag

NIP.19651205 199303 1 004

**ANALISIS STRATEGI DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN
PARIWISATA DALAM MENGELOLA WISATA MELALUI
PENGAWASAN PERTUMBUHAN, EFEKTIVITAS, DAN KONTRIBUSI
RETRIBUSI PARIWISATA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
(STUDI KASUS DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN CILACAP)**

Oleh : Dena Virnalia Indriyanti

NIM: 1917201255

Email: denavirnaliindriyanti025@gmail.com

ABSTRAK

Kabupaten Cilacap adalah salah satu kabupaten yang memiliki daya tarik wisata yang melimpah, namun pendapatan asli daerah sektor pariwisata kabupaten Cilacap hanya bersal dari satu lini penerimaan saja sehingga jumlahnya sangat kecil. Pengelolaan pariwisata dibatasi oleh Perda Kabupaten Cilacap No 1 Tahun 2024. Dari data yang diperoleh diketahui bahwa penerimaan retribusi pariwisata bahkan tidak bisa menutup target capaian tahunan penerimaan retribusi yang telah ditentukan. Berdasarkan Pergub No 73 tahun 2016, tugas pokok Disporapar adalah membantu gubernur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa langkah pengelolaan pariwisata, oleh sebab itu penting mengukur sejauh mana keberhasilan Disporapar dalam melakukan pemungutan retribusi pariwisata dan strategi penanggulangannya untuk tahun berikutnya.

Penelitian menggunakan penelitian kualitatif, dengan metode deskriptif kualitatif dengan perhitungan rasio laju pertumbuhan, rasio efektivitas, rasio kontribusi dan pelaksanaan kebijakan dianalisis menggunakan metode SWOT. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus dilakukan di Disporapar Kabupaten Cilacap dengan rentang waktu penelitian November 2023-18 April 2024, penggunaan metode studi kasus merupakan pendekatan yang mendalam merinci serta lebih terfokus menelaah permasalahan yang sifatnya kontemporer.

Laju pertumbuhan penerimaan retribusi Pariwisata Kabupaten Cilacap dari tahun 2021 hingga tahun 2023 justru mengalami penurunan. Tingkat efektivitas penerimaan retribusi daerah dari tahun 2021 hingga tahun 2023 mengalami naik turun walaupun tidak terlampau jauh. Walaupun bila dilihat dari angka realisasi retribusi pariwisata dari taun ketahun cukup timpang. Pada tahun 2021 diketahui bahwa efektivitas hanya terealisasi sebesar 70,26%. Disporapar harus melakukan perencanaan dalam menentukan target penerimaan retribusi pariwisata dengan memperhatikan objek dan subjek retribusi daerah yang potensial agar realisasi penerimaan retribusi daerah mencapai target yang telah ditetapkan.

Kata Kunci: Strategi, Pengelolaan, Wisata

**ANALYSIS OF THE STRATEGY OF THE YOUTH, SPORTS AND
TOURISM OFFICE IN MANAGING TOURISM THROUGH
MONITORING THE GROWTH, EFFECTIVENESS, AND
CONTRIBUTION OF TOURISM LEVIES TO LOCAL REVENUE
(CASE STUDY OF THE YOUTH, SPORTS AND TOURISM OFFICE OF
CILACAP REGENCY).**

By: Dena Virnalia Indriyanti
NIM: 1917201255
Email: denavirnaliaindriyanti025@gmail.com

ABSTRACT

Cilacap Regency is one of the regencies that has abundant tourist attractions, but the local revenue from the tourism sector of Cilacap Regency only comes from one line of revenue, so the amount is very small. Tourism management is limited by Cilacap District Regional Regulation No. 1 Year 2024. From the data obtained, it is known that the revenue from tourism levies cannot even cover the annual achievement target of levy revenue that has been determined. Based on Governor Regulation No. 73 of 2016, the main task of Disporapar is to assist the governor. This research aims to analyze the steps of tourism management, therefore it is important to measure the extent of Disporapar's success in collecting tourism levies and its countermeasure strategy for the following year.

The research uses qualitative research, with a qualitative descriptive method with the calculation of the growth rate ratio, effectiveness ratio, contribution ratio and policy implementation analyzed using the SWOT method. The approach used in this research is a case study approach conducted at the Cilacap Regency Disporapar with a research time span of November 2023-18 April 2024, the use of the case study method is an in-depth and detailed approach and is more focused on examining contemporary problems.

The growth rate of Tourism levy revenue in Cilacap Regency from 2021 to 2023 actually decreased. The level of effectiveness of regional levy revenue from 2021 to 2023 has fluctuated although not too far. Although when viewed from the realization figures of tourism levies from year to year, it is quite lame. In 2021, it is known that the effectiveness was only realized at 70.26%. Disporapar must carry out planning in determining the target of tourism levy revenue by paying attention to potential objects and subjects of local levies so that the realization of local levy revenue reaches the predetermined target.

Keyword: Strategies, Management, Tourism

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHAS ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik dibawah)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Ze (dengan titik dibawah)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	Ş	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di akhir kata Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan ke dua itu terpisah, makaditulis dengan h

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan kata harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

◌َ	Fathāh	Ditulis	a
◌ِ	Kasrah	Ditulis	i
◌ُ	Ḍammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	Fathāh + alif	Ditulis	ā
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2	Fathāh + ya' mati	Ditulis	ā
	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	كري	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	Ḍ'ammah + wāwu mati	Ditulis	ū

فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>
------	---------	--------------

F. Vokal Rangkap

1	Fathāh + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathāh + wāwu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القران	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat Ditulis menurut bunyi pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawī al-Furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

MOTTO

“Jadilah peneliti yang lebih mengedepankan isi kepala daripada mulutnya”

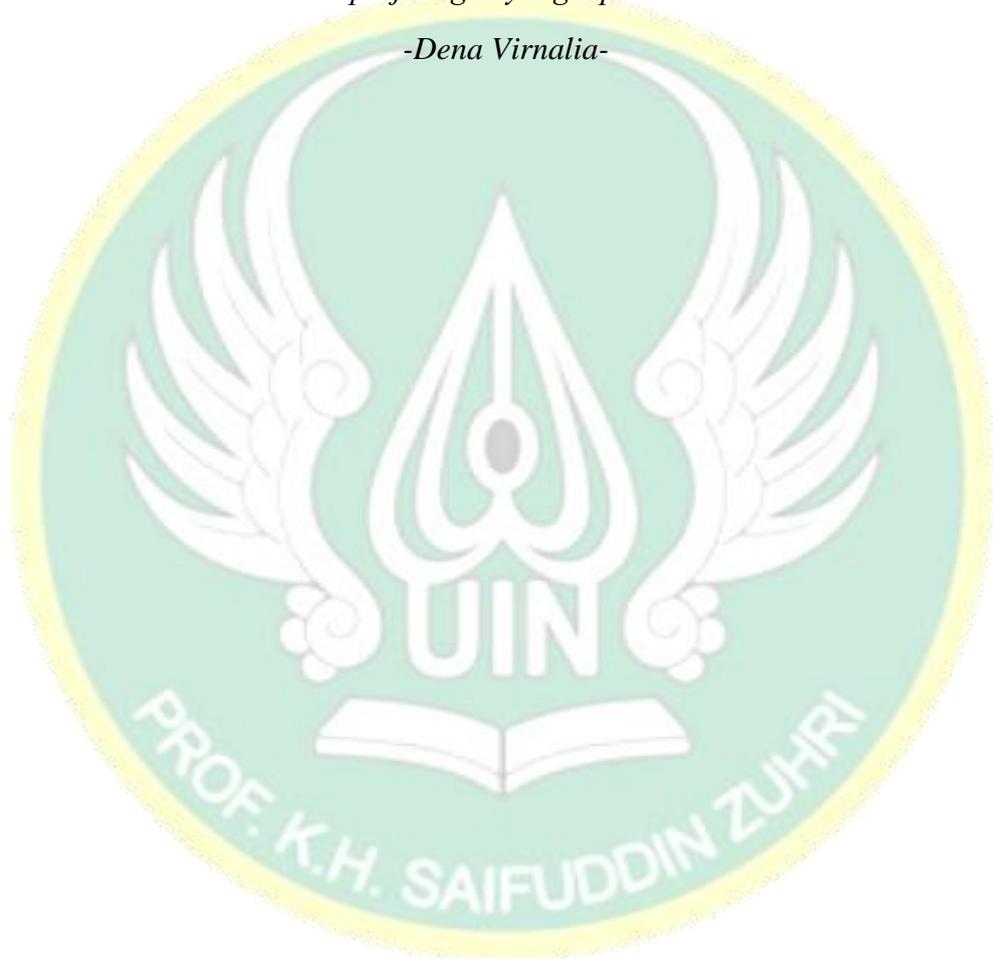
-Unknow-

“Yakinkan lewat iman, usahakan dengan ilmu dan sampaikan dengan amal”

-LKII Pekalongan-

“Apabila kamu lelah tapi kamu bahagia, tandanya kamu berada pada jalur perjuangan yang tepat”

-Dena Virnalia-



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, yang dalam hal ini dikarenakan kekurangan dan keterbatasan penulis. Namun demikian penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari do'a, dukungan, kerja sama dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. Sochimim, Lc., M.Si, Ketua Program Studi Ekonomi Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Atabik, M.Ag selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih saya ucapkan atas segala bimbingan, arahan, masukan serta kesabarannya demi terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa membalas kebaikan bapak.
5. Segenap Bapak dan Ibu dosen, dan staff akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan, wawasan dan segala bentuk fasilitas yang diberikan.
6. Kepada Ayahanda Didik Supriyanto beserta Ibunda tercinta Anih Utariningsih
7. Kepada Adik laki-laki Vian Dwi Nugroho yang rela menunda kuliah hingga kelulusan saya.
8. Kepada Adik perempuan saya Salsa Billa Oktaviani.

9. Kepada kakak saya Jalbi Chasanul Fikri yang senantiasa memberikan dukungan emosional pada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang senantiasa mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan kepada seluruh pihak yang telah turut serta membantu terselesaikannya skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca skripsi ini. *Amiin yaa robbal'alamiin.*

Purwokerto, 18 Desember 2024



Dena Virnalia Indriyanti
1917201255



DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRACT.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHAS ARAB-INDONESIA.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	11
E. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II LANDASAN TEORI.....	14
A. Landasan teoritis.....	14
1. Strategi Pengelolaan.....	14
2. Ekonomi Publik.....	17
3. Retribusi.....	20
4. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	23
5. Laju Pertumbuhan Retribusi.....	26
6. Efektifitas Retribusi.....	29
7. Kontribusi Retribusi Terhadap PAD.....	31
B. Landasan Teologis.....	35
C. Penelitian Terdahulu.....	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
A. Jenis penelitian.....	46
B. Tempat dan waktu penelitian.....	46

C. Subjek dan Objek Penelitian	47
D. Jenis dan Sumber Data	47
E. Teknik Pengumpulan Data	48
F. Uji Keabsahan Data	49
G. Teknik Analisis Data	50
BAB IV PEMBAHASAN.....	54
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	54
1. Gambaran Umum Kabupaten Cilacap.....	54
2. Profil DISPORAPAR Kabupaten Cilacap.....	58
3. Lokasi Kantor Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	59
4. Visi dan Misi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap (Disporapar).....	60
5. Tugas dan Fungsi	61
6. Struktur Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap	64
B. Analisis Laju Pertumbuhan Retribusi Pariwisata Kabupaten Cilacap.....	64
C. Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Pariwisata Kabupaten Cilacap	68
D. Analisis Kontribusi Penerimaan Retribusi Pariwisata Kabupaten Cilacap terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	72
E. Analisis SWOT strategi Disporapar dalam pengambilan keputusan atas upaya peningkatan laju pertumbuhan, efektivitas dan kontribusi.....	75
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN -LAMPIRAN.....	89
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	118

DAFTAR TABEL

Table 1. 1 Retribusi Pariwisata Kabupaten Cilacap Tahun 2015-2020	4
Table 1. 2 Bagi Hasil Perjanjian Kerja Sama.....	5
Table 1. 3 Realisasi Retribusi Pariwisata 2021-2023	6
Table 1. 4 PAD Kabupaten Cilacap tahun 2020-2023.....	7
Table 2. 1 Kriteria Laju Pertumbuhan.....	27
Table 2. 2 Kriteria Efektivitas	30
Table 2. 3 Kriteria Kontribusi Retribusi Pariwisata.....	32
Table 2. 4 Matriks kuadran Swot	35
Table 2. 5 penelitian terdahulu.....	43
Table 4. 1 Data Kunjungan Wisata Tahun 2020-2023.....	55
Table 4. 2 Kriteria Laju Pertumbuhan.....	66
Table 4. 3 Hasil perhitungan laju pertumbuhan	66
Table 4. 4 Kriteria Efektivitas Retribusi	70
Table 4. 5 Perhitungan Efektivitas	70
Table 4. 6 Kriteria Kontribusi	73
Table 4. 7 Hasil Perhitungan Kontribusi Retribusi Pariwisata	74
Table 4. 8 Tarif Retribusi Day Tarik Wisata.....	77
Table 4. 9 Matriks SWOT.....	78
Table 4. 10 Rekomendasi Program	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Alur Penarikan Retribusi.....	62
Gambar 4. 2 Bagan Organisasi Disporapar Kabupaten Cilacap	64



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Surat Permohonan Observasi	91
Lampiran 2.	Surat permohonan melaksanakan penelitian.....	92
Lampiran 3.	Surat permohonan pengambilan data BPPKAD	93
Lampiran 4.	Surat Balasan Izin Penelitian	95
Lampiran 5.	Bukti Melaksanakan Penelitian.....	95
Lampiran 6.	Pedoman Wawancara	98
Lampiran 7.	Data Jumlah Kunjungan Wisata	102
Lampiran 8.	Pendapatan retribusi pariwisata.....	106
Lampiran 9.	Laporan Realisasi Anggaran PAD Kabupaten Cilacap.....	109
Lampiran 10.	Surat keterangan lulus seminar proposal	112
Lampiran 11	Surat keterangan lulus ujian komprehensif.....	113
Lampiran 12	Sertifikat PPL.....	114
Lampiran 13	Sertifikat PBM	115
Lampiran 14	Sertifikat Aplikom.....	116
Lampiran 15	Sertifikat KKN.....	117



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah merupakan fasilitator dan dinamisator dalam upaya pencapaian tujuan nasional melalui kebijakan kelembagaan. Dalam pengelolaan daerah, tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota memiliki wewenang sendiri dalam mengelola pemerintahan di wilayahnya sejak inkrahnya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Adanya otonomi membuat pemerintah daerah memiliki akses untuk mengatur dan mengelola urusan keuangan daerahnya guna memaksimalkan keuangan daerah serta menerapkan kebijakan pembangunan daerah lebih optimal dan tepat sasaran berdasarkan prinsip negara kesatuan. Suatu daerah bisa dikategorikan sebagai daerah yang mandiri apabila salah satunya dapat unggul dalam mengelola pendapatan asli daerah (PAD) (Zakiah, 2022)

Menurut yang dikemukakan oleh Fathul Aminudin Aziz (Aziz, 2018) kesuksesan seseorang, program, temuan ilmiah yang berkualitas tidak serta terjadi begitu saja namun ada proses gradual yang perlu dilaluinya. Begitupula dalam penyelenggaraan kebijakan dalam peningkatan pendapatan daerah. Dalam proses mengelola suatu hal, penting terlaksananya rangkaian proses berupa perencanaan, pengorganisasian, pengimplementasian dan pengawasan. Begitu pula berbagai macam sektor di lini pemerintahan yang memerlukan pengelolaan empat rangkaian proses tadi untuk tercapainya visi lembaga, yang dalam tulisan ini membahas tentang pengelolaan pariwisata atas pertimbangan realisasi anggaran retribusi di periode yang lampau.

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, pariwisata didefinisikan kegiatan wisata yang diiringi berbagai layanan dan fasilitas yang disediakan pemerintah, pengusaha atau perseorangan. Menurut Mill dan Morison (Azzahra, et al., 2018) pariwisata terkait erat dengan kegiatan perpindahan tempat terintegrasi sistem dimana bagian-bagiannya tidak berdiri sendiri melainkan saling terkait satu sama lain

seperti jaring laba laba. Menurut Sochimim Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor penghasil devisa yang cukup besar bagi negara. Berbagai langkahpun kerap kali diupayakan dalam proses pengembangan sektor pariwisata, karena sektor ini menjadi salah satu lini potensial dalam menunjang pendapatan asli daerah dan penyerapan tenaga kerja.

Berdasarkan data dari Kemenparekraf penerimaan sektor pariwisata Indonesia pada tahun 2022 mencapai 4,26 miliar dolar AS, dimana angka tersebut meningkat 3,6 persen dari tahun sebelumnya (Hendriyani, 2023). Peningkatan demi peningkatan senantiasa diupayakan dalam memaksimalkan pendapatan dari sektor pariwisata masing- masing wilayah. Peningkatan penerimaan retribusi pariwisata tergolong kedalam sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang kontribusinya disesuaikan dengan besaran penerimaan asli daerah wilayah yang bersangkutan.

Kabupaten Cilacap dipilih sebagai salah satu kawasan strategis pariwisata provinsi karena menawarkan daya tarik berupa wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan. Dengan menjadi salah satu sektor unggulan yang dimiliki, wisata daerah penting untuk mendapatkan tindakan serius dan kesungguhan pemerintah dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan daya tarik wisata daerah.

Kabupaten Cilacap adalah salah satu kabupaten yang memiliki daya tarik wisata yang melimpah, dari berbagai wisata tersebut ada beberapa pilihan wisata favorit, diantaranya wisata Pantai Teluk Penyu, Hutan Payau, Benteng Pendem, Pantai Sodong, Kemit Forest, Havana Hills, Gunung Selok, Curug Cimendaway, Air Panas Cipari dan berbagai pantai di Pulau Nusakambangan yang tentu beberapa akan menambah sumbangsi penerimaan sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah, walaupun dalam pelaksanaan pengelolaanya wilayah Kabupaten Cilacap memiliki ketentuan yang berbeda dibandingkan kabupaten lainnya. Potensi pariwisata yang besar juga perlu dibarengi dengan peningkatan persepsi kualitas daya tarik wisata secara umum agar diterima baik oleh masyarakat dan menjadi

faktor penentu pengunjung untuk kembali di lain waktu. (Sochimim & Warsito, 2024)

Berdasarkan Pergub No 73 tahun 2016, tugas pokok Disporapar adalah membantu gubernur dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kepemudaan, olahraga dan bidang pariwisata yang merupakan kewenangan daerah dan ditugaskan kepala daerah. Fungsi Disporapar adalah membantu gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan, olahraga dan bidang pariwisata yang merupakan kewenangan daerah dan ditugaskan kepala daerah. Dalam fungsinya Disporapar berhak melakukan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan bidang kepemudaan, pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif. Namun, berdasarkan observasi yang dilakukan di Disporapar Kabupaten Cilacap, terdapat batasan pengelolaan dalam ranah kepariwisataan.

Disporapar hanya dapat mengelola secara langsung daya tarik wisata yang kepemilikan tanahnya merupakan milik pemerintah daerah saja. Batasan lain dari pengelolaan wisata di Cilacap adalah sempitnya sektor penerimaan pariwisata sebab yang dimaksud retribusi pariwisata hanyalah pendapatan yang tercatat dari retribusi tiket masuk daya tarik wisata yang dikelola atau memiliki perjanjian kerjasama dengan Disporapar Kabupaten Cilacap. Hal-hal di luar retribusi tiket masuk seperti pajak hotel, pajak restoran, retribusi parkir, dan retribusi pedagang bukan lagi tercatat sebagai pendapatan asli daerah dari retribusi pariwisata dan olahraga yang berhak ditarik oleh Disporapar.

Penelitian yang dilakukan oleh Tasya Syifa Al Faraby di Kabupaten Cilacap pada 2024 juga turut mendukung fakta lapangan bahwa dari sekian banyaknya daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Cilacap, Disporapar hanya dapat mengelola satu daya tarik wisata saja yaitu Air Panas Cipari (Syifa, 2024).

Ketentuan yang berlaku menjadikan pendapatan asli daerah sektor pariwisata kabupaten Cilacap terbilang kecil, karena hanya bersal dari satu

ini penerimaan saja. Sebagai acuan data pendapatan asli daerah sektor pariwisata Kabupaten Cilacap pada tahun 2020 hanya tercatat sebesar 228.745.922, yang mana angka tersebut hanya 64,77 persen dari target capaian pariwisata di tahun tersebut. Kecilnya angka penerimaan sektor pariwisata juga menghambat pengembangan pariwisata di wilayah Cilacap. Kendala yang dihadapi lainnya dari pengelolaan retribusi pariwisata di Kabupaten Cilacap adalah berbagai perubahan landasan hukum yang mengatur tentang pariwisata sehingga penarikan retribusi pariwisata belum bisa optimal.

Berikut persentase realisasi penerimaan retribusi pariwisata dalam kurun waktu 2015-2020:

Table 1. 1 Retribusi Pariwisata Kabupaten Cilacap Tahun 2015-2020

No	Tahun	Penerimaan Retribusi Pariwisata		
		Target	Realisasi	Realisasai PAD
1	2015	Rp 2.200.000.000	Rp 2.115.732.655	96,17%
2	2016	Rp 2.100.000.000	Rp 2.206.724.295	105,08%
3	2017	Rp 2.500.000.000	Rp 2.554.048.805	102,16%
4	2018	Rp 2.750.000.000	Rp 2.750.684.470	100,02%
5	2019	Rp 366.362.500	Rp 422.856.992	125,71%
6	2020	Rp 353.154.375	Rp 228.745.922	64,77%

Sumber: Arsip Disporapar Kabupaten Cilacap

Penurunan target dan penerimaan retribusi pariwisata Kabupaten Cilacap, menurut wawancara bersama Ibu Ida yang dilakukan di Kantor Disporapar Cilacap disebabkan oleh efek domino dari pengalihkelolaan berbagai daya tarik wisata yang sebelumnya dikelola Disporapar. Hal tersebut juga berpengaruh kepada kucuran dana yang dianggarkan pemerintah kabupaten pada pengelolaan wisata. Kecilnya anggaran yang dikeluarkan pemerintah daerah tadi yang kemudian menjadikan pentingnya tugas Disporapar Kabupaten Cilacap dalam membuat strategi dalam upaya

peningkatan pertumbuhan, efektivitas serta kontribusi retribusi pariwisata terhadap aliran dana pendapatan asli daerah Kabupaten Cilacap.

Sebagaimana ruang kelola yang berlaku, Disporapar Kabupaten Cilacap hanya berhak mengelola secara langsung satu daya tarik wisata yaitu Air Panas Cipari, di luar hal tersebut Disporapar hanya berhak melakukan pencatatan penerimaan bilamana terdapat perjanjian kerjasama sebelumnya. Sejak tahun 2019 banyak daya tarik wisata yang tata pengelolaannya dialih tangankan pada berbagi lembaga, sebagai contoh adalah Pantai Teluk Penyus yang pemanfaatannya diambil alih oleh TNI AD, maka Disporapar tidak memiliki hak lagi untuk mencatat persentase retribusi. Begitupula seluruh pantai yang ada di Kabupaten Cilacap sepenuhnya lepas dari pengelolaan dan perjanjian kerjasama dengan Disporapar.

Adapun daftar daya tarik wisata yang masih memiliki perjanjian Kerjasama dengan Disporapar persentasenya sebagai berikut:

Table 1. 2 Bagi Hasil Perjanjian Kerja Sama

No	Daya Tarik	Pengelola	Alamat	No PKS	Persentase	
					Pengelola	Pemda
1	Air Panas Cipari	Disporapar	Jl. Jend. A. Yani No.8 Cilacap			100%
2	Curug Giriwangi	Pemdes	Cipari	556/0193.1/27	75%	25%
3	Curug Geulis	Pemdes	Cipari	556/0781/27	75%	25%
4	Curug Cimendaway	Perhutani	Dayeuh luhur	No:10/PKS.Wisata/Byb/Divre Jateng/2022 No:556/0837.1/27 No:/PKS/Lodaya/2022	70%	30%

5	Hutan Payau	Perhutani	Cilacap Utara	No:11/PKS.Wisata/Byb/Divre Jateng/2022 No:556/0836.1/27 No:/PKS/Purwa Lestari/2022		35%
6	Gunung Srandil	Pemdes	Adipala	556/0009/27/2020	75%	25%
7	Gunung Selok	Perhutani	Adipala	556/0690/27	72%	27,5%
8	Waduk Kubangkungkung	Perkebunan	Kawunganten	556/192.1/27	72,5%	27,5%
9	Kemit Forest	Perhutani	Sidareja	04/PKS/LMDH Giri Mulya/I/2022	92%	8%
10	Taman Dinosauris	Bapak Iriyanto	Gandrungmangu	556/0273/27	92%	8%

Sumber: Disporapar Kabupaten Cilacap

Dari beberapa daya Tarik wisata tersebut didapati penerimaan retribusi pariwisata tiga tahun terakhir sebagai berikut :

Table 1. 3 Realisasi Retribusi Pariwisata 2021-2023

No	Tahun	Target (dalam rupiah)	Realisasi (dalam rupiah)
1	2021	550.000.000	386.410.835
2	2022	632.500.000	398.897.773
3	2023	300.000.000	297.163.328

Sumber : Arsip Disporapar Kabupaten Cilacap

Dari data yang diperoleh diketahui bahwa keberagaman daya tarik wisata yang dimiliki Kabupaten Cilacap bahkan tidak bisa menutup target capaian tahunan penerimaan retribusi yang telah ditentukan, maka penting bagi Disporapar melakukan perumusan, pengawasan dan pengelolaan yang lebih maksimal dalam pelaksanaan fungsinya terhadap retribusi pariwisata yang ada dalam kawasan Kabupaten Cilacap supaya dapat berkontribusi lebih dalam menyumbang prosentase penerimaan terhadap pendapatan asli daerah.

Dari permohonan data yang didapat dari Badan Pengelolaan, Pengendalian Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Cilacap didapati realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Cilacap sebagai berikut:

Table 1. 4 PAD Kabupaten Cilacap tahun 2020-2023

Tahun	Besaran Relisasi PAD Kabupaten Cilacap
2020	Rp 591.343.787.160,48
2021	Rp 739.133.833.863,79
2022	Rp 700.428.762.449,02
2023	Rp 768.640.705.768,55

Sumber: Arsip BPPKAD Kabupaten Cilacap

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ida Farida, S.E selaku Subkoor Pengembangan Usaha Pariwisata, angka penerimaan retribusi pariwisata Kabupaten Cilacap sangat fluktuatif. Didapati bahwa retribusi pariwisata Kabupaten Cilacap semakin turun mulai tahun 2020, namun turunnya angka Covid-19 pada masa itu hingga saat ini sekalipun tidak berdampak besar pada peningkatan pendapat sektor retribusi. Berdasarkan data yang berhasil dicatatkan, realisasi penerimaan retribusi pariwisata justru setiap tahunnya tidak bisa menutup target yang telah ditetapkan. (Farida, 2023)

Realisasi penerimaan penerimaan retribusi pariwisata Kabupaten Cilacap sangat fluktuatif dalam kurun waktu tiga tahun terakhir pasca berakhirnya pandemi Covid-19. Oleh sebab itu untuk mengukur sejauh mana keberhasilan Disporapar dalam melakukan pemungutan retribusi pariwisata dan strategi penanggulangannya untuk tahun berikutnya, perlu bagi penulis untuk menganalisis laju pertumbuhan retribusi pariwisata, efektivitas retribusi pariwisata dan kontribusi retribusi pariwisata pada pendapatan asli daerah serta menganalisis strategi perencanaan untuk tahun berikutnya. Atas kekurangan yang terjadi dari pengelolaan tahun tahun sebelumnya perlu adanya evaluasi kinerja untuk mengukur keberhasilan dalam pemungutan retribusi, untuk itu diperlukan strategi yang matang agar berhasil berdampak akan pelaksanaan sektor pariwisata sehingga pelaksanaan tersusun dengan terencana. (Sholihah, 2018)

Alasan lain dari penelitian ini adalah karena masih sedikit yang mengkaji mengenai pertumbuhan, efektivitas dan kontribusi retribusi pariwisata terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Cilacap. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Agus Riyadi, hanya membahas mengenai pengaruh pengembangan wisata dan promosi terhadap tingkat kunjungan wisata di air panas cipari (Riyadi & Herman, 2023).

Latar belakang inilah yang menarik untuk dikaji serta dianalisis lebih mendalam. Adapun penelitian ini terfokus pada strategi Disporapar dalam mengelola wisata atas pertimbangan laju pertumbuhan dan efektivitas retribusi pariwisata dalam upaya peningkatan kontribusi retribusi terhadap PAD. Alasan tersebut yang kemudian mendasari penulis untuk menggali lebih dalam dan melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Strategi Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Dalam Mengelola Wisata Melalui Pengawasan Pertumbuhan, Efektivitas, Dan Kontribusi Retribusi Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Cilacap)”**.

B. Definisi Operasional

Setiap penggunaan istilah sering menimbulkan beberapa penafsiran yang saling berbeda satu sama lain. Perbedaan penafsiran tidak jarang pula menimbulkan kontradiktif atas permasalahan yang diangkat. Oleh karena itu penjelasan istilah sangat penting untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman yang tidak diinginkan. Untuk menghindari salah penafsiran pada istilah-istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, perlu dijelaskan istilah sebagai berikut:

1. Disporapar

Disporapar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah singkatan dari Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, yang mana merupakan salah satu unsur pelaksana otonomi daerah yang bertanggung jawab kepada bupati atas pengelolaan sektor kepemudaan, olahraga dan pariwisata serta ekonomi kreatif. Dalam penelitian ini Disporapar yang dimaksud

adalah Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap sebagai pelaksana pengelolaan wisata milik pemerintah daerah di Kabupaten Cilacap.

2. Laju Pertumbuhan

Laju pertumbuhan merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan yang mana pada penelitian ini adalah retribusi pariwisata. Adapun pertumbuhan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tingkat laju pertumbuhan penerimaan daerah sektor retribusi pariwisata di Kabupaten Cilacap. Besaran laju pertumbuhan dihitung dari perbandingan tahun terhitung dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Efektivitas

Efektivitas digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam melaksanakan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 1 (satu) atau 100 persen, sehingga apabila rasio efektivitasnya semakin tinggi, menggambarkan kemampuan daerah semakin baik (Halim, 2014) Efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengukur perbandingan antara realisasi penerimaan retribusi pariwisata yang ditarik oleh Disporapar Kabupaten Cilacap dengan target penerimaan retribusi pariwisata pada tahun terkait. Adapun hasil perbandingan tersebut kemudian dijadikan indikator prosentase terealisasinya target capaian retribusi pariwisata dalam satu tahun.

4. Kontribusi Retribusi terhadap PAD

Menurut Handoko kontribusi dipakai untuk melihat seberapa sumbangsi yang didapat dari pajak dan retribusi daerah terhadap PAD. (Sartika, 2022) Adapun yang dibahas dalam penelitian ini adalah kontribusi dari penerimaan retribusi pariwisata di Kabupaten Cilacap yang ditarik oleh Disporapar Kabupaten Cilacap dan kemudian

dibandingkan dengan realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Cilacap.

Mahmudi menjelaskan bahwa kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah dan retribusi memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. (Sartika, 2022) Untuk mengetahui berapa besar peranan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka digunakan formula kontribusi dengan cara membagi antara realisasi penerimaan pajak pajak daerah atau retribusi daerah dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kemudian dikali dengan 100%. Semakin besar hasilnya maka semakin besar juga peran pajak serta retribusi daerah terhadap PAD.

5. Retribusi Pariwisata

Berdasarkan Peraturan Bupati Cilacap No. 117 tahun 2022 tentang Retribusi Jasa Usaha Di Kabupaten Cilacap, retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang diberikan atas penggunaan fasilitas di tempat rekreasi dan/atau olahraga. Pihak yang wajib membayar retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Retribusi pariwisata dalam penelitian ini adalah besaran tarif yang diambil dari penarikan tiket masuk pariwisata milik pemerintah daerah dan pengelolaannya dibawah naungan Disporapar kabupaten Cilacap, dan atau daya tarik wisata yang memiliki keterikatan perjanjian kerjasama dengan Disporapar Kabupaten Cilacap.

6. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai

pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. (Kemenkeu, n.d.)

Pendapatan asli daerah dikategorikan menjadi beberapa lini penerimaan, diantaranya hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pendapatan lain-lain daerah yang sah. (Mahfudh, 2022)

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan pendapatan asli daerah adalah penerimaan hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pendapatan lain-lain daerah yang sah dari Kabupaten Cilacap.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka didapati rumusan masalah sebagai berikut:

1. Berapa besaran pertumbuhan, kontribusi, dan efektivitas retribusi pariwisata terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Cilacap?
2. Bagaimana strategi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dalam pengelolaan wisata atas pertimbangan elemen pertumbuhan, efektivitas dan kontribusi retribusi wisata terhadap pendapatan asli daerah?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang di atas maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

- a. Untuk menganalisa besaran pertumbuhan, efektivitas dan kontribusi retribusi pariwisata Kabupaten Cilacap Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021-2023
- b. Untuk menganalisa langkah pengelolaan pariwisata yang dilakukan Disporapar dalam merespon hasil pengawasan atas pertumbuhan, efektivitas retribusi pariwisata dan kontribusi penarikan retribusi pariwisata terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Cilacap.

2. Manfaat Penelitian

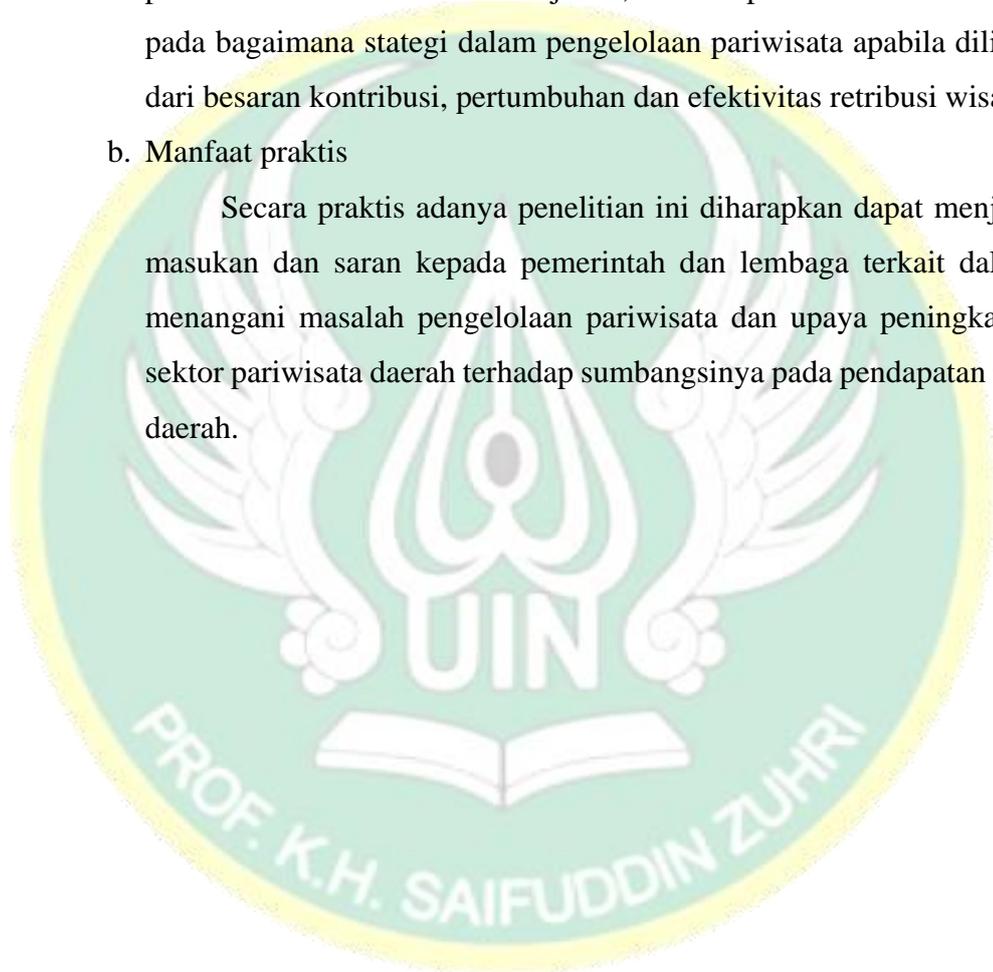
Dari penelitian ini diharapkan manfaat penelitian yang diperoleh sebagai berikut :

a. Manfaat teoritis

Secara teoritis adanya penelitian ini diharapkan dapat sebagai tambahan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi terutama ekonomi pariwisata dan tata kelola kebijakan, Karena penelitian ini terfokus pada bagaimana strategi dalam pengelolaan pariwisata apabila dilihat dari besaran kontribusi, pertumbuhan dan efektivitas retribusi wisata.

b. Manfaat praktis

Secara praktis adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan saran kepada pemerintah dan lembaga terkait dalam menangani masalah pengelolaan pariwisata dan upaya peningkatan sektor pariwisata daerah terhadap sumbangsinya pada pendapatan asli daerah.



E. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini penulis memberikan gambaran lengkap terkait penelitian yang dilakuka. Bab ini membahas latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori. Bab ini menampilkan teori yang berkaitan atau selaras dengan tema penelitian, dalam hal ini berkaitan tentang teori ekonomi publik, strategi pengelolaan, Disporapar, laju pertumbuhan dan efektivitas retribusi pariwisata, serta kontribusi retribusi pada pendapatan asli daerah. Pada bab ini juga menampilkan kajian teologis dan kajian literatur dari penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian. Pada bab ini penulis memaparkan metode yang digunakan dalam pengumpulan sumber data, yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data yang digunakan serta teknik yang digunakan untuk menganalisis data.

Bab IV Pembahasan dan hasil penelitian. Pada bab ini penulis akan sajikan pembahasan terkait gambaran umum lokasi penelitian, penghitungan serta analisis laju pertumbuhan, efektivitas retribusi pariwisata dan kontribusi retribusi pariwisata terhadap PAD serta strategi pengelolaan oleh Disporapar atas pertimbangan unsur laju pertumbuhan, efektivitas retribusi pariwisata dan konribusi retribusi pariwisata terhadap PAD.

Bab V Penutup. Pada bagian ini penulis menyajikan kesimpulan dan rekomendasi. Bagian terakhir ini penulis juga mencantumkan informasi terkait literatur dan daftar riwayat hidup penulis serta lampiran-lampiran yang mendukung penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan teoritis

1. Strategi Pengelolaan

a. Definisi Strategi Pengelolaan

Berdasarkan yang dikemukakan Latif Diot Prosojono dalam buku Manajemen Strategis, Strategi terdiri dari gagasan dan tindakan sebagai serahan pemahaman serta pengamalan masa depan. Definisi tersebut menekankan bahwasanya diperlukan pemikiran yang matang untuk bisa menatap masa depan tanpa mengesampingkan keputusan dan Langkah Langkah mempersiapkan masa depan (Sojo, 2018).

Pengelolaan berasal dari kata kelola. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengelolaan diartikan sebagai proses memimpin, mengendalikan, mengatur dan mengusahakan hasil baik, serta bertanggungjawab atas suatu pekerjaan tertentu. Pengelolaan juga diartikan serupa dengan manajemen. Menurut Tery, pengelolaan didefinisikan sebagai proses manajemen yang dipahami sebagai suatu pembeda atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan (Pascallino, 2021).

Pengelolaan Menurut John D. Milet didefinisikan sebagai suatu rangkaian proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja yang diorganissikan dalam suatu kelompok formal sebagai realisasi dari pencapaian target yang ditentukan (Siswanto, 2015).

Strategi pengelolaan juga bisa didefinisikan menjadi dua pengertian berbeda. Pertama, strategi pengelolaan didefinisikan sebagai seni dan ilmu dalam pengembangan, penerapan, dan pengevaluasian keputusan lintas fungsi untuk memungkinkan organisasi mencapai tujuannya. Dan Kedua, strategi pengelolaan didefinisikan sebagai seni atau bang ilmu untuk perumusan, penerapan, dan pengevaluasiaan keputusan strategis lintas departemen dalam rangka pencapaian tujuan di masa mendatang (Sedarmayanti, 2014).

b. Filsafat Manajemen/Pengelolaan

Filsafat secara umum didefinisikan sebagai suatu sistem yang mengkaji hakikat sesuatu untuk tujuan mendapatkan kebenaran. Moekijat dalam buku pengantar manajemen mendefinisikan filsafat sebagai suatu sistem pemikiran yang mempertanyakan gejala tertentu dan memberikan rangkaian prinsip untuk pemecahan permasalahan yang hubungannya pada penyelesaian tujuan tertentu.

Filsafat Manajemen adalah unsur terpenting dari pengetahuan dalam memecahkan masalah manajerial. Filsafat pengelolaan memberikan dasar pemikiran dan tindakan yang menguntungkan dalam manajemen dan membantu kepada pencapaian tujuan yang dinamis serta pengelolaan tantangan.

Dikemukakan oleh Davis dan Filley (Siswanto, 2015) ada beberapa faktor yang diperlukan dalam filsafat manajemen guna pencapaian tujuan. Faktor tersebut meliputi:

- 1) Kepentingan umum, dalam hal ini dimaksudkan bahwasanya dalam penyelenggaraan suatu organisasi baik profit maupun non profit harus terlihat adanya cerminan deskripsi berbagai kepentingan, baik kepentingan negara, manajerial, staf, atau kepentingan masyarakat umum secara luas.
- 2) Tujuan usaha, merupakan manifestasi dari aktivitas spesifik dari organisasi atau lembaga. Tujuannyapun bisa dikategorikan menjadi skala prioritas.
- 3) Pimpinan pelaksana, merupakan individu yang diberikan mandat untuk bisa memimpin satu keseluruhan otoritas yang dibebankan kepadanya.
- 4) Kebijakan, adalah pernyataan global yang digunakan sebagai tuntunan pengambilan keputusan oleh staf serta memberikan gambaran jelas arah organisasi tersebut.
- 5) Fungsi adalah aktivitas yang kaitannya dengan tujuan yang akan dicapai.

- 6) Faktor dasar, meliputi faktor produksi atau turunannya sebagai bentuk elemen yang perlu ada untuk mendukung penyelenggaraan kebijakan organisasi.
 - 7) Struktur organisasi, adalah saluran yang menggambarkan hubungan kerja antar pimpinan dan staf dalam pelaksanaan tanggungjawab yang dibebankan.
 - 8) Prosedur, merupakan tahapan tindakan yang perlu dijalankan guna penyelesaian suatu pekerjaan tertentu.
 - 9) Moral kerja, adalah kondisi mental dari individu atau kelompok yang menentukan sikap bawahan untuk menerima pekerjaan dan pengoprasiaannya sebaik baiknya sesuai dengan tujuan akhir.
- c. Proses Strategi Pengelolaan

Taufiqurahman berpendapat dalam bukunya bahwa proses pengelolaan yang strategis meliputi beberapa tahapan yaitu observasi lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi dan evaluasi strategi (Taufiqurahman, 2016). Menurut Fred R David dalam bukunya yang berjudul “*Manajemen strategis*” proses strategi pengelolaan yang baik meliputi beberapa proses diantaranya, perumusan strategi, implementasi strategi dan evaluasi strategi (Fred, 2010). Proses strategi menurut Eddy Yunus dikategorikan menjadi dua komponen. Komponen pertama adalah perencanaan strategi yang terdiri dari visi, misi, tujuan dan strategi organisasi dan komponen keduanya adalah sasaran dan tujuan operasional serta pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen yang didalamnya berisi tentang:

- 1) Fungsi pengorganisasian
- 2) Fungsi pelaksanaan
- 3) Fungsi penganggaran, jaringan kerja internal dan eksternal, kebijakan situasional
- 4) Fungsi control dan evaluasi serta umpan balik.

2. Ekonomi Publik

a. Pengertian Ekonomi Publik

Ekonomi publik adalah cabang ilmu ekonomi yang menganalisis peranan pemerintah dalam perekonomian, dan dampak kebijakan pemerintah dalam bidang fiskal terhadap suatu perekonomian (Wahyuningsih, 2020). Istilah ekonomi publik berasal dari dua kata yaitu ekonomi dan publik. Kata ekonomi diartikan sebagai suatu kegiatan yang tujuannya memenuhi keinginan untuk peningkatan kesejahteraan dan kualitas kehidupan. Sedangkan kata publik bisa dikonotasikan sebagai negara atau pemerintahan, kata umum atau masyarakat luas dan atau kombinasi antar keduanya.

Ilmu ekonomi publik adalah ilmu yang menelaah permasalahan yang kaitannya dengan masyarakat sebagai kesatuan publik, atau pemerintah, permasalahan yang kaitannya dengan jaminan sosial, ketahanan pangan, kebijakan subsidi, regulasi/deregulasi, kebijakan yang kaitannya tentang pajak dan retribusi serta lain sebagainya. Ilmu ekonomi publik memiliki nama lain yaitu finansial publik (Rohima, 2020), artinya ilmu ini mendalami rancangan dari pajak dan retribusi pemerintah, kebijakan pengeluaran yang dipilih dan efek atas kebijakan terkait.

Ruang lingkup ekonomi publik terdiri dari tiga hal. Pertama adalah desain dan analisis ekonomi publik. Kedua, ekonomi publik mencakup tentang keuangan negara, khususnya yang kaitannya dengan APBN, termasuk didalamnya adalah pengeluaran negara, dampak pajak dan retribusi serta pengeluaran pemerintah pada kesejahteraan rakyat. Dan ketiga, analisis kegagalan pasar dan kebijakan pemerintah dalam upaya mencapai kesejahteraan publik.

b. Peran Pemerintah

Dalam tiap sistem ekonomi pemerintah selalu memiliki peran yang krusial. Sebagaimana yang dikemukakan Adam Smith bahwa setidaknya pemerintah punya 3 peranan fungsi. Pertama, pemerintah

sebagai elemen pemupuk keamanan dan pertahanan negara. Kedua pemerintah sebagai elemen penyelenggaraan peradilan. Ketiga, pemerintah sebagai penyedia pelayanan publik yang tidak disediakan swasta.

Pelayanan publik dalam hal dalam tata kelola masyarakat terbagi menjadi dua segmentasi, pertama adalah pemerintah pusat dan yang kedua adalah pemerintah daerah. Pemerintah daerah erat kaitannya dengan pelaksanaan pelimpahan kewenangan pusat pada daerah yang dalam hal ini terkait dengan keuangan. Reformasi keuangan daerah berjalan sehubungan dengan dinamika perubahan perundangan tentang pemerintah daerah.

Perubahan yang dilakukan dalam cakupan pergeseran fungsi pemerintah daerah sebagai bentuk pengejawatan daerah otonom harapannya bisa berdampak langsung pada pelayanan publik. Perubahan yang dimaksud terkait dengan (Wahyuningsih, 2020, p. 85):

- 1) Perubahan Strategi pembiayaan
- 2) Perubahan kewenangan daerah dalam penggunaan dana perimbangan keuangan
- 3) Perubahan prinsip kelola dan pertanggungjawaban anggaran

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah bertanggungjawab atas langkah strategis atas permasalahan lokal terkait ancaman disintegrasi, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah juga mejasi basis penguatan perekonomian di daerah. Dalam otonomi daerah, maslaah krusialnya bukan hanya berupa pelimpahan kewenangan atas pemerintah pusat ke daerah, melainkan yang terpenting adalah target untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan aspek aspek keuangan daerah dan peningkatan penerimaan asli daerah bersangkutan. (Wahyuningsih, 2020, p. 85)

c. Implementasi Pengukuran Kinerja Pemerintah

Mahmudi dalam buku “akuntansi sektor publik” mengatakan bahwa manajemen kinerja yang memenuhi *integrated performance management* terdiri setidaknya dari dua hal (Halim & Kusufi, 2023) Pertama yaitu perencanaan kinerja dan yang kedua adalah pengukuran kinerja. Adapun perencanaan kinerja terdiri dari 4 tahapan, yaitu:

- 1) Penentuan visi, misi, dan tujuan serta strategi
- 2) Penerjemahan visi, misi dan tujuan strategi kedalam:
 - a) Sasaran strategis
 - b) Inisiatif strategis
 - c) Indikator kinerja, dan
 - d) Target kinerja
- 3) Penyusunan program
- 4) Penyusunan anggaran

Sementara itu pengukuran kinerja value for money dibangun atas tiga komponen utama, diantaranya:

- 1) Komponen visi, misi, sasaran dan target
- 2) Komponen input, proses, output dan outcome
- 3) Komponen pengukuran ekonomi, efisiensi dan efektivitas

d. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar)

Berdasarkan Pergub Jateng No. 73 tahun 2016 Disporapar melaksanakan fungsi: perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan, keolahragaan, pengembangan destinasi pariwisata, pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas dan fungsi lain yang ditugaskan oleh kepala daerah (BD.2016/No.73, 2016)

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, dan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah Cilacap (BD.2016/NO.99, 2016). Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan

pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, dan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perbup Cilacap No 99 Tahun 2016 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan di bidang kepemudaan, keolahragaan, pengembangan destinasi pariwisata, dan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif.
- 2) Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang kepemudaan, keolahragaan, pengembangan destinasi pariwisata, dan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif.
- 3) Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan, keolahragaan, pengembangan destinasi pariwisata, dan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif.
- 4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan, keolahragaan, pengembangan destinasi pariwisata, dan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif.
- 5) Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Retribusi

a. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai bentuk pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Wahyuningsih, 2020). Objek retribusi daerah adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan, yakni:

- 1) Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan

kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis-jenis retribusi umum adalah:

- a) Retribusi pelayanan kesehatan
 - b) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
 - c) Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akta catatan sipil (akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian)
 - d) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
 - e) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
 - f) Retribusi pengujian kendaraan bermotor
 - g) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
 - h) Retribusi penggantian biaya cetak peta yang dibuat oleh pemerintah daerah (peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik, dan peta teknis).
 - i) Retribusi pengujian kapal perikanan, pengujian terhadap kapal penangkap ikan yang menjadi kewenangan daerah.
- 2) Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersil, meliputi:
- pertama, pelayanan dengan memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal. Kedua, pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum memadai disediakan oleh pihak swasta. Jenis-jenis retribusi jasa usaha adalah sebagai berikut:
 - a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah (pemakaian tanah dan bangunan
 - b) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan
 - c) Retribusi tempat pelelangan,
 - d) Retribusi terminal
 - e) Retribusi tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau daerah, tidak termasuk disediakan dan dikelola oleh BUMD dan pihak swasta.

- f) Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila milik daerah, penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola BUMD dan pihak swasta.
 - g) Retribusi penyedotan kakus jamban
 - h) Retribusi rumah potong hewan
 - i) Retribusi pelayanan pelabuhan kapal
 - j) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga, tempat rekreasi pariwisata, dan olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah
 - k) Retribusi penyeberangan di atas air
 - l) Retribusi pengolahan limbah cair
 - m) Retribusi penjualan produksi usaha daerah
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu adalah sebagai berikut:
- a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB): pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
 - b) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol: pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
 - c) Retribusi izin gangguan: pemberian izin tempat usaha kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, atau gangguan.

- d) Retribusi izin trayek, pemberian izin kepada orang pribadi atau badan usaha untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu

b. Retribusi Pariwisata

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, menyatakan bahwa:

“Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.” (LN. 2009/ No. 11, 2009)

Retribusi sektor pariwisata yaitu pungutan yang dibebankan kepada masyarakat atas jasa atau pemberian izin tertentu untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam sektor pariwisata. Besaran pungutan pariwisata disesuaikan oleh kebijakan pemerintah masing-masing daerah.

Pengembangan pariwisata merupakan bagian integral dari nasional dan daerah. Pariwisata dikembangkan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi. Adapun kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan dan kegiatan pembangunan dalam rangka mendorong proses pembangunan daerah secara menyeluruh sebagai berikut (Sakti, n.d.)

- 1) Memprioritaskan Pengelolaan
- 2) Adanya pendanaan atau penganggrran pariwisata
- 3) Melakukan promosi dan pemasaran

4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang no 1 tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menyebutkan bahwa pendapatan daerah yaitu semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu. Sedangkan pendapatan asli daerah dimaksudkan sebagai pendapatan daerah yang asalnya dari pajak daerah,

retribusi daerah, hasil pengelolaan yang sah dan pendapatan lain-lain yang sah dengan aturan perundangan.

Menurut Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 62 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 120 tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menyebutkan tentang pengertian pendapatan asli daerah yaitu pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan.

Menurut Nurcholis pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah (Rahmawati & Sutrisno, 2020). Dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan keuangan suatu daerah, dimana penerimaan keuangan itu bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah tersebut misalnya pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain, serta penerimaan keuangan tersebut diatur oleh peraturan daerah.

Dari pendapat-pendapat yang ada diatas maka penulis menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan keuangan yang didapat suatu daerah dimana penerimaan tersebut di dapat dari sumber yang mempunyai potensi di daerah tersebut contohnya hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan asli daerah dikategorikan menjadi beberapa lini penerimaan, diantaranya hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pendapatan lain-lain daerah yang sah (Mahfudh, 2022).

Pendapatan asli daerah, yang bersumber dari:

- a. Pajak daerah secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (Pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung,

yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sedangkan ciri-ciri yang menyertai Pajak itu sendiri dapat diikhtisarkan seperti berikut (Sutedi, 2011):

- 1) Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
 - 2) Pembayaran pajak harus masuk kepada kas negara
 - 3) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah
 - 4) Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dari negara kepada para pembayar pajak
 - 5) Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak retribusi daerah
- b. Retribusi daerah adalah pungutan daerah yang merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah itu adalah pungutan yang dilakukan suatu daerah atas pemberian jasa atau izin yang telah diberikan pemerintah daerah. Penerimaan retribusi daerah ini berasal dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perijinan tertentu. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah hasil pendapatan daerah yang didapat dari keuntungan perusahaan daerah berupa dana pembangunan daerah dan merupakan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan yaitu bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah yang merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus

disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah itu adalah pungutan yang dilakukan suatu daerah atas pemberian jasa atau izin yang telah diberikan pemerintah daerah. Penerimaan retribusi daerah ini berasal dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perijinan tertentu. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah hasil pendapatan daerah yang didapat dari keuntungan perusahaan daerah berupa dana pembangunan daerah dan merupakan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan yaitu bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.

- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah terdiri dari:
- a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
 - b) Jasa giro
 - c) Pendapatan bunga
 - d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
 - e) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh daerah.
 - f) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
 - g) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
 - h) Pendapatan denda pajak
 - i) Pendapatan denda retribusi
 - j) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan

5. Laju Pertumbuhan Retribusi

a. Definisi Laju pertumbuhan

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan tumbuh untuk istilah pertumbuhan adalah memiliki arti proses berkembang atau sedang mengalami perkembangan. Pertumbuhan adalah perjalanan atau

tahapan menjadi sempurna laju pertumbuhan didefinisikan sebagai indikator untuk pengukuran seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan retribusi dari periode ke periode berikutnya (Halim, 2014). Perhitungan laju pertumbuhan retribusi digunakan sebagai indikator untuk mengetahui kinerja keuangan dan kecenderungan kenaikan dan penurunan pada periode tertentu.

b. Rumus Laju Pertumbuhan

Pertumbuhan dari macam-macam retribusi dapat digunakan alat mengevaluasi potensi-potensi yang perlu ditingkatkan. Rumus menghitung laju pertumbuhan adalah sebagai berikut (Sartika, 2022) :

$$\text{Pertumbuhan} = \frac{X_n - X_{(n-1)}}{X_{(n-1)}} \times 100\%$$

Keterangan :

X_n : realisasi penerimaan retribusi pariwisata pada tahun tertentu.

$X_{(n-1)}$: realisasi penerimaan retribusi pariwisata tahun sebelumnya.

Table 2. 1 Kriteria Laju Pertumbuhan

No.	% Laju Pertumbuhan	Kriteria
1	85%-100%	Sangat Berhasil
2	70%-85%	Berhasil
3	55%-70%	Cukup Berhasil
4	30%-55%	Kurang Berhasil
5	Kurang dari 30 %	Tidak Berhasil

Sumber : (Sartika, 2022)

c. Strategi Pertumbuhan Retribusi

Peningkatan retribusi pariwisata merupakan bagian penting dalam pengembangan kemandirian ekonomi daerah. Pada dasarnya berbagai strategi dapat diterapkan untuk mencapai tujuan ini, Adapun strategi utama untuk peningkatan retribusi dapat dicapai dengan beberapa pilihan berikut:

- 1) Penambahan sumber penerimaan.

Menambah daya tarik wisata baru serta berbagai obyek pendukung dapat meningkatkan daya tarik pariwisata (Novianti, et al., 2017). Kecilnya penerimaan pariwisata bisa diatasi dengan skema peningkatan kuantitas daya tarik wisata, semakin banyak lini penerimaan maka akan berpengaruh juga pada besaran penerimaan atas retribusi pariwisata. Sedangkan skema lain juga bisa dihasilkan dari peningkatan obyek pendukung berupa berbagai fasilitas yang meningkatkan pengalaman wisatawan seperti infrastruktur yang memadahi atau fasilitas lain seperti toilet, tempat parkir dan pusat informasi wisata yang dapat meningkatkan kenyamanan pengunjung.

2) Optimalisasi Pemasaran

Untuk meningkatkan optimalisasi pemasaran daya tarik wisata dapat memanfaatkan teknologi modern dan media sosial untuk meningkatkan jumlah pengunjung yang berdampak langsung pada pendapatan retribusi (Laba & Aswan, 2017). Pemanfaatan teknologi juga dapat dilakukan dengan cara pembuatan berbagai iklan atau promosi berbasis digital contohnya web atau di berbagai media sosial seperti Instagram, Twitter, dan Tiktok.

Selain penggunaan media sosial sebagai promosi dan pemasaran efektif, untuk mengoptimalkan pemasaran juga dapat dilakukan dengan cara membangun kerjasama dengan agen perjalanan (GABTF, 2024)

3) Peningkatan Kerjasama dalam Pengelolaan

Strategi membangun kemitraan antara pemerintah daerah dan pihak swasta untuk mengelola sumber daya wisata juga bisa menjadi pilihan efektif untuk meningkatkan penerimaan dan laju pertumbuhan retribusi. Pembuatan klausa perjanjian kerjasama dengan sistem bagi hasil akan meningkatkan besaran pertumbuhan mengingat semakin banyaknya perjanjian kerjasama dengan pihak

swasta maka akan makin memperbanyak lini penerimaan retribusi (Novianti, et al., 2017).

4) Merumuskan Peraturan yang Mendukung

Berbagai kebijakan pemerintah yang mendukung perkembangan pariwisata sangat berpengaruh pada peningkatan pertumbuhan retribusi. Regulasi yang menjadi arah gerak pengelolaan sudah seharusnya sejalan dengan upaya peningkatan retribusi, sempitnya arah gerak lembaga akan berpengaruh langsung pada besaran penerimaan (GABTF, 2024). Kerjasama antara pemerintah dan swasta juga penting untuk menciptakan lingkungan kondusif, maka pembenahan regulasi yang memfasilitasi investasi juga perlu senantiasa dievaluasi jika tidak sesuai dengan arah tujuan peningkatan retribusi.

6. Efektifitas Retribusi

a. Definisi Efektivitas

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Penerimaan retribusi pariwisata dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Semakin besar *ouput* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi (Bawuna, 2016). Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Sebagai penggambaran baik buruknya kemampuan daerah, efektivitas menyajikan hubungan antara tujuan dan output (Halim, 2014).

b. Rumus Efektivitas

Adapun rumus efektivitas adalah sebagai berikut (Sartika, 2022):

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Pariwisata}}{\text{Target Penerimaan Retribusi Pariwisata}} \times 100\%$$

Table 2. 2 Kriteria Efektivitas

No.	% Laju Pertumbuhan	Kriteria
1	>100%	Sangat Efektif
2	90,1%-100%	Efektif
3	80,1%-90%	Cukup Efektif
4	60%-80%	Kurang Efektif
5	Kurang dari 60 %	Tidak Efektif

Sumber: (Sartika, 2022)

c. Strategi Efektivitas Retribusi

Peningkatan retribusi pariwisata merupakan bagian penting dalam pengembangan kemandirian ekonomi daerah. Pada dasarnya berbagai strategi dapat diterapkan untuk mencapai tujuan ini, Adapun strategi utama untuk meningkatkan efektivitas retribusi dapat dicapai dengan beberapa pilihan berikut:

1) Penambahan sumber penerimaan.

Menambah daya tarik wisata baru serta berbagai obyek pendukung dapat meningkatkan daya tarik pariwisata (Novianti, et al., 2017). Kecilnya penerimaan pariwisata bisa diatasi dengan skema peningkatan kuantitas daya tarik wisata, semakin banyak lini penerimaan maka akan berpengaruh juga pada besaran kontribusi atas retribusi pariwisata. Sedangkan skema lain juga bisa dihasilkan dari peningkatan obyek pendukung berupa berbagai fasilitas yang meningkatkan pengalaman wisatawan seperti infrastruktur yang memadahi atau fasilitas lain seperti toilet, tempat parkir dan pusat informasi wisata yang dapat meningkatkan kenyamanan pengunjung. Peningkatan daya tarik wisata melalui acara lokal juga turut mempengaruhi kunjungan wisatawan.

2) Optimalisasi Pemasaran

Untuk meningkatkan optimalisasi pemasaran daya tarik wisata dapat memanfaatkan teknologi modern dan media sosial untuk meningkatkan jumlah pengunjung yang berdampak langsung pada pendapatan retribusi (Laba & Aswan, 2017). Pemanfaatan teknologi juga dapat dilakukan dengan cara pembuatan berbagai

iklan atau promosi berbasis digital contohnya web atau di berbagai media sosial seperti Instagram, Twitter, dan Tiktok.

Selain penggunaan media sosial sebagai promosi dan pemasaran efektif, untuk mengoptimalkan pemasaran juga dapat dilakukan dengan cara membangun kerjasama dengan agen perjalanan (GABTF, 2024)

3) Peningkatan Kerjasama dalam Pengelolaan

Strategi membangun kemitraan antara pemerintah daerah dan pihak swasta untuk mengelola sumber daya wisata juga bisa menjadi pilihan efektif untuk meningkatkan efektivitas retribusi. Pembuatan klausa perjanjian kerjasama dengan sistem bagi hasil akan meningkatkan besaran pertumbuhan mengingat semakin banyaknya perjanjian kerjasama dengan pihak swasta maka akan makin memperbanyak lini penerimaan retribusi (Novianti, et al., 2017).

4) Merumuskan Peraturan yang Mendukung

Berbagai kebijakan pemerintah yang mendukung perkembangan pariwisata sangat berpengaruh pada peningkatan pertumbuhan retribusi. Regulasi yang menjadi arah gerak pengelolaan sudah seharusnya sejalan dengan upaya peningkatan retribusi, sempitnya arah gerak lembaga akan berpengaruh langsung pada besaran penerimaan (GABTF, 2024). Kerjasama antara pemerintah dan swasta juga penting untuk menciptakan lingkungan kondusif, maka pembenahan regulasi yang memfasilitasi investasi juga perlu senantiasa dievaluasi jika tidak sesuai dengan arah tujuan peningkatan retribusi.

7. Kontribusi Retribusi Terhadap PAD

a. Definisi Kontribusi

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia kontribusi dapat diartikan sebagai sumbangan, uang iuran. Menurut Soerjono Soekamto Kontribusi diartikan sebagai pemberian andil dalam suatu hal baik

berupa informasi, ide, sumbangan atau pengaruh untuk mencapai suatu target yang direncanakan (Tri, 2023). Berdasarkan pengertian tersebut, jika dihubungkan dengan retribusi pariwisata, kontribusi berasal dari sumbangan uang iuran yang asalnya dari penerimaan retribusi pariwisata dibagi dengan PAD.

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan pendapat asli daerah. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah periode tertentu dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah tertentu pula. Ada beberapa urgensi mengkaji kontribusi retribusi pariwisata diantaranya:

- 1) Dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Dengan mengkaji kontribusi retribusi pariwisata maka memungkinkan pemerintah daerah membenahi infrastruktur dan layanan publik sebagai bentuk peningkatan kontribusi.
 - 2) Dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan jumlah wisatawan dan pengeluaran mereka di daya tarik wisata (Hasibuan, et al., 2023).
 - 3) Memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan pengalaman wisatawan, dengan cara penambahan wahana pada daya tarik wisata, meningkatkan ketersediaan toilet, parkir, dan berbagai infrastruktur pendukung lain (Puspitayanti, 2019).
- b. Rumus Menghitung Kontribusi Retribusi Pariwisata terhadap PAD
Adapun rumus menghitung kontribusi sebagai berikut (Sartika, 2022):

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Pariwisata}}{\text{Total PAD tahun n}} \times 100\%$$

Table 2. 3 Kriteria Kontribusi Retribusi Periwisata

No.	Prosentase Kontribusi	Kriteria
1	Diatas 50%	Sangat Berhasil
2	30,1-40%	Berhasil
3	20,1-30%	Cukup Berhasil
4	10,1-20%	Kurang Berhasil

5	0-10%	Tidak Berhasil
---	-------	----------------

Sumber : (Sartika, 2022)

c. strategi peningkatan kontribusi retribusi

Meningkatkan kontribusi penerimaan retribusi merupakan langkah penting bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penyerapan PAD. Adapun strategi yang dapat diterapkan diantaranya:

1) Intensifikasi dan ekstensifikasi

Intensifikasi merupakan perbaikan kualitas pelayanan publik dan sistem pemungutan retribusi, penggunaan teknologi dan peningkatan pengawasan (Bake, et al., 2022). Sedangkan ekstensifikasi merupakan penciptaan sumber-sumber penerimaan baru diantaranya memperluas daya tarik wisata, memperbanyak wahana, menciptakan acara yang meningkatkan kunjungan wisata dan menetapkan regulasi baru yang memberikan kepastian hukum mengenai retribusi pariwisata (Bake, et al., 2022).

2) Peningkatan kesadaran masyarakat

Membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar retribusi juga sangat krusial. Ini dapat dilakukan melalui kampanye atau sosialisasi mengenai hak dan kewajiban mereka serta sanksi yang mungkin dihadapi jika tidak mematuhi peraturan.

3) Kerjasama lintas sektor

Membangun kerjasama antara berbagai instansi pemerintah dan sektor swasta untuk mengidentifikasi potensi baru dalam penerimaan retribusi. Ini termasuk kolaborasi dalam pengelolaan sumber daya dan peningkatan layanan publik (Puspitayanti, 2019).

8. Analisis SWOT

Analisis SWOT dibuat oleh pemimpin proyek riset di Universitas Stanford yang bernama Albert Humphrey (Sasoko & Mahrudi, 2023). Analisis SWOT merupakan metode strategis yang digunakan untuk mengevaluasi posisi suatu organisasi atau proyek dengan mempertimbangkan empat elemen kunci berupa kekuatan, kelemahan,

peluang serta ancaman. Analisis SWOT menurut Freddy Rangkuti merupakan identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi (Mikola, 2020). Analisis SWOT merupakan alat analisis yang tujuannya untuk menggambarkan situasi yang sedang dan mungkin akan dihadapi oleh suatu organisasi.

Analisis SWOT didasarkan pada suatu pemikiran logika yang akan memaksimalkan sesuatu seperti kekuatan (*strengths*), dan peluang (*opportunity*), namun secara bersamaan juga dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*). Ketika empat komposisi tadi dapat dijalankan secara tepat maka program yang direncanakan akan berjalan lebih baik dengan hasil yang optimal. (Idtesis, n.d.).

Saat Menyusun strategi SWOT akan didapati faktor yang mempengaruhi yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal dalam analisis SWOT terdiri atas kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*). Untuk mengidentifikasi faktor internal bisa mencakup pengalaman baik dan buruk, anggaran, sumber daya yang dimiliki dan kelemahan serta kekuatan. Sedangkan faktor eksternal dalam analisis SWOT mencakup peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threats*). Untuk mengidentifikasi faktor eksternal meliputi lingkungan, peraturan, tren, budaya, ideologi, sosial politik, perekonomian, peristiwa yang terjadi, sumber anggaran, dan perkembangan teknologi.

Setelah mendalami pengertian SWOT secara umum, Langkah yang yang bisa dilakukan adalah dengan membuat matriks SWOT. Matriks SWOT merupakan alat yang membantu dalam mengembangkan strategi. Matriks SWOT sendiri memvisualkan hubungan antara kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sehingga memudahkan dalam mengambil keputusan yang strategis.

Setelah mengklasifikasikan dan menganalisis kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang kedalam empat kuadran masing masing, selanjutnya menarik kesimpulan strategi yaitu SO (*strengths-opportunities*) atau memanfaatkan kekuatan untuk mengambil peluang, WO (*weaknesses-*

opportunities) atau mengatasi kelemahan untuk memanfaatkan peluang, ST (*strengths-threats*) atau menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman, WT (*weaknesses-threats*) atau meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman (Sari, et al., 2024).

Table 2. 4 Matriks kuadran Swot

	<i>Strenghts</i> (S) Daftar semua kekuatan yang dimiliki	Weaknesses (W) Daaftar semua Kelemahan yang dimiliki
<i>Opportunities</i> (O) Daftar semua peluang yang diidentifikasi	Strategi SO	Strategi WO
<i>Threats</i> (T) Daftar semua ancaman yang dapat diidentifikasi	Strategi ST	Strategi WT

Sumber : Jurnal Penelitian (Hamin & Pongoliu, 2023)

B. Landasan Teologis

Ada beberapa hukum dalam Al-Quran dan Hadits yang berhubungan dengan konsep pariwisata dan pengelolaan retribusi. Secara umum hukum segala sesuatu adalah mubah (boleh) selama tidak ada dalil yang melarang. Masalah mursalah penarikan retribusi pada dasarnya tidak memiliki dalil yang menunjukkan pembatalan unsur mubah (boleh) tadi.

Istilah *maslahat* setidaknya harus mengandung tiga hal. Pertama, maslahat bukanlah hawa nafsu, ataupun upaya pemenuhan kepentingan seksual per orang. Kedua, maslahat mengandung aspek positif dan karena itu menolak kemudhorotan. Ketiga, semua maslahat yang dilindungi syariat secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan elementer bagi kehidupan manusia.

Dalam Al-Quran juga beberapa kali dijelaskan tentang pariwisata, diantaranya Surat Al-Mulk ayat 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهَا
وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

“Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”

Dalam Tafsir *Al-Muyassar* ayat diatas dijelaskan menjadi . Hanya Allah semata yang menjadikan bumi mudah dijelajahi dan terbentang untuk kalian, yang kalian bisa tinggal di atasnya. Berjalanlah di penjuru-penjuru dan ujung-ujungnya. Makanlah rizki Allah yang Dia keluarkan untuk kalian dari bumi. Hanya kepada Allah semata kebangkitan dari alam kubur untuk perhitungan amal dan pembalasan (Quran, n.d.). Dalam ayat ini terkandung dorongan mencari rizki dan bekerja. Dan di dalam ayat ini juga terkandung petunjuk bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang haq, tidak ada sekutu bagiNya, juga menunjukkan kuasaNya, mengingatkan nikmat-nikmatNya, dan memperingatkan dari kecenderungan kepada dunia. Surat Al mulk ayat 15 tersebut menjelaskan bahwa Allah menyuruh manusi untuk berjalan di muka bumi (bisa diartikan sebagai tindakan pariwisata) yang mana tujuannya untuk mengingat kebesaran Allah Swt.

Terdapat pula hadits yang membahas mengenai wisata diriwayatkan oleh Abu Daud no 2486 ketika ada seseorang datang kepada Rasulullah saw. meminta izin untuk berwisata dengan pemahaman lama, yaitu safar dengan makna kerahiban atau sekedar menyiksa diri, Rasulullah saw. memberi petunjuk kepada maksud yang lebih mulia dan tinggi dari sekedar berwisata dengan mengatakan kepadanya :

“Sesungguhnya wisata umatku adalah berjihad di jalan Allah.”

Pariwisata yang dimaksud sebagai bentuk jihad adalah jika wisata yang dilakukan bernilai ibadah dan tidak membawa pada *kemudhorotan*.

Retribusi daerah dikelola oleh pemerintahan daerah untuk kepentingan umum. Dalam pengelolaan retribusi daerah pemerintahan daerah melakukan perencanaan dalam menentukan potensi retribusi yang ada dengan menetapkan target penerimaan setiap tahunnya. Didalam islam juga dijelaskan tentang perlunya perencanaan sebagaimana dijelaskan dalam surat al Hasyr ayat 18 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang Telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Dalam tafsir Li Yaddabbaru Ayatih/ markaz dalam pengawasan Syaikh Prof Dr Umar bin Abdullah al Muqbil ayat ini diartikan bahwa menengok masa lalu merupakan sarana mensyukuri amal baik dan memohon ampun serta bertaubat dari amal buruk.

Berdasarkan surat Al Hasyr ayat 18 dijelaskan kepada kita mengenai pentingnya mempersiapkan apa yang kita perbuat untuk hari esok. Hal ini berkaitan dengan perencanaan yang dilakukan sebuah organisasi dalam mencapai tujuan ingin dicapai. Pengelolaan retribusi pariwisata dilakukan oleh DISPORAPAR. DISPORAPAR melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang kepariwisataan termasuk dalam perencanaan, pengelolaan dan pengawasan pemungutan retribusi pariwisata.

Kemudian firman Allah mengenai dasar hukum pengelolaan dalam surat Al-A'raf ayat 10

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

“Sesungguhnya Kami telah menepatkan kamu sekalian dimuka bumi dan Kami adakan bagimu bumi (sumber) penghidupan, Amat sedikit kamu bersyukur”

Ayat di atas menjelaskan bahwa kehidupan manusia ditandai dengan gerak untuk selalu berubah, aktivitas ekonomi adalah gerak yang tiada henti, sumber daya ekonomi akan berkembang apabila dikelola dan diputar yang mana dalam hal ini akan mempengaruhi kesejahteraan manusia itu sendiri. Dalam Islam secara jelas dan tegas, manusialah yang menjadi pengganti dan wakil Allah SWT, di muka bumi ini untuk memakmurkannya sesuai dengan aturan dan ketentuan Allah SWT. Sebagai pencipta manusia dan alam tempat manusia berdiam.

Manusia diberi gelar khalifah fil ardhi. Oleh karena, tidak ada alasan untuk melarikan diri dari tanggung jawab ini kendatipun membuat lembaga atau organisasi di bidang bisnis dan politik. (Sofyan S Harahap, 2011)

Dapat dijelaskan berdasarkan ayat dan hadis di atas secara tidak langsung berarti menganjurkan kepada setiap muslim untuk mengerjakan segala sesuatu secara maksimal dan tidak boleh mengerjakan sesuatu secara sembarangan. Suatu pekerjaan tidak akan bisa dikerjakan secara maksimal, apalagi dalam skala besar, kecuali jika dikerjakan secara benar, teratur dan terencana. Inilah prinsip-prinsip manajemen modern pada saat ini. Intinya, seorang muslim jika mengerjakan sesuatu, harus mengerjakannya secara benar, terencana, teratur dan terorganis.

Kemudian retribusi daerah adalah pungutan daerah yang merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah itu adalah pungutan yang dilakukan suatu daerah atas pemberian jasa atau izin yang telah diberikan pemerintah daerah. Penerimaan retribusi daerah ini berasal dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perijinan Tertentu. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah hasil pendapatan daerah yang didapat dari keuntungan perusahaan daerah berupa dana pembangunan daerah dan merupakan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan yaitu bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.

Dalam Islam telah diatur bahwa kita bukan hanya harus mematuhi aturan-aturan hukum yang telah Allah dan Rasul tetapkan. Tetapi, kita juga harus mematuhi aturan Pemerintah atau pemimpin yang biasa disebut dengan Uliil Amri. apabila menyalahi aturan yang telah ditentukan dari suatu pemimpin maka hal tersebut jelas telah melalaikan yang telah Allah tetapkan. Hal ini sesuai dengan surat An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”

Menurut Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir / Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al Asyqar, mudarris tafsir Universitas Islam Madinah tafsir An-Nisa ayat 59 sebagai berikut (Quran, n.d.):

Setelah Allah memerintahkan para penguasa untuk memutuskan sesuatu atas dasar, maka selanjutnya Allah memerintahkan para rakyat untuk mentaati pemimpin mereka yang didahului dengan perintah untuk mentaati-Nya dan mentaati Rasul, hal tersebut berarti apabila penguasa menyelisihi hukum Allah dan rasul-Nya maka hukum mereka tidak berlaku. Mereka adalah para Imam, Sultan, Qadhi, dan semua yang memiliki kekuasaan yang syar’i dan bukan kekuasaan yang mengikuti *thaghut*. Yang dimaksud dengan ketaatan kepada perintah dan larangan mereka adalah dalam apa yang bukan kemaksiatan sebagaimana telah datang hadist dari Rasulullah (tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah). Dan pendapat lain mengatakan yang dimaksud dengan ulil amri adalah para ulama al-qur’an dan fiqih yang menyuruh kepada kebenaran dan menfatwakannya sedang mereka memiliki ilmunya. Yakni antara Sebagian kalian dengan Sebagian yang lain atau Sebagian kalian dengan pemimpin yang mencakup urusan keagamaan dan dunia.

C. Penelitian Terdahulu

Peneliti mengacu pada kajian dari peneliti-peneliti sebelumnya berdasarkan kajian yang sesuai dengan peneliti. Tidak hanya itu, referensi dan studi literatur juga dilakukan guna mendukung kajian yang peneliti lakukan sehingga diperoleh hasil sebagai berikut:

Buku Analisis Peningkatan Pendapatan Asli Daerah karya Mahfudh (Mahfudh, et al., 2022) yang mana di dalamnya penulis mendapati teori teori mengenai pendapatan asli daerah berupa definisi dan faktor yang berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Jurnal oleh Sochimim (Sochimim, 2019) “Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pariwisata” yang mana membahas mengenai pengembangan wisata berkelanjutan berbasis masyarakat. Pendekatan yang dilakukan merupakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menggambarkan bahwa potensi wisata yang luas di Indonesia masih tidak memberi dampak pada keberlangsungan hidup masyarakat sekitar. Pariwisata yang merupakan industry baru yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cepat, perlu disokong oleh pembangunan pariwisata berbasis local agar bisa meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.

Jurnal oleh Fathul Aminudin Aziz “Memahami Manajemen Islam Melalui Pendekatan Tafsir Metodologis” yang mana dalam jurnal tersebut dijelaskan tafsir manajemen dalam perspektif islam melalui pendekatan metodologis. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan studi literatur dari Tafsir bil ma'tsur, Tafsir al-Falasifah dan Tafsir Metodologis. Hasil penelitian didapati bahwa salah satu model yang ditawarkan untuk memahami manajemen agar mudah diterapkan sehari-hari adalah model tafsir metodologis karena pola tafsir yang bumi dan mudah dipahami.

Jurnal oleh Jeiny Ribka et al (Ribka, et al., 2021) berjudul “Analisis Efektivitas, Efisiensi Dan Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara”. Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus dengan metode deskriptif kualitatif, Adapun analisisnya menggunakan analisis efektivitas, analisis efisiensi dan analisis kontribusi. Dari penelitian tersebut didapati bahwa berdasar data tahun 2009-2019 berdasarkan perhitungan efektivitas pajak dan retribusi ada dalam kategori sangat efektif dan efektif, dengan efisiensi yang

masuk pada tingkat sangat efisien dan efisien. Sedangkan untuk kontribusinya terhadap PAD tergolong pada tingkat kurang.

Skripsi oleh Romi Dwi Rahmoko (Rahmoko, 2020) yang berjudul “Analisis retribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah” Penelitian dilakukan di Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri dengan menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwasanya dari tiga komponen perhitungan didapati pendapatan retribusi pariwisata dikatakan efektif, dengan tingkat efisiensi rata rata 3,18 persen namun kontribusinya terhadap PAD masih dibawah 20 persen.

Tesis oleh Niken Setyani yang berjudul (Setyani, 2022) “Peran Dinas Pariwisata DIY Dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata Berdasarkan Paradigm Pembangunan Berkelanjutan” , adapun hasil penelitian ini membahas mengenai impementasi kebijakan publik yang dilakukan atas rencana pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Namun dalam hal ini tidak membahas mengenai besaran kontribusi, efektivitas dan pertumbuhan retribusi pariwisata.

Jurnal oleh Surianto Ilham et al (Ilham, et al., 2022) yang berjudul “Analisis Kontribusi, Pertumbuhan, Efisiensi dan Efektivitas Retribusi Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kolaka”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio kontribusi, rasio pertumbuhan, rasio efisiensi dan rasio efektivitas. Adapun penelitian ini menyajikan perhitungan atas empat elemen diantaranya kontribusi, pertumbuhan, efisiensi, efektivitas pariwisata kabupaten kolaka PAD rentang waktu 2016-2020. Hasil dari penelitian ini didapati bahwa kontribusi pajak dan retribusi kabupaten kolaka masih terbilang rendah dengan rata rata 0,72% pertahun. Laju pertumbuhan tercatat rata-rata sebesar 25,55% tiap tahunnya dan tingkat efisiensinya masuk kategori tidak efisien serta tingkat efektivitasnya tergolong cukup efektif.

Jurnal oleh Muhammad Patiyusuf dan Vitrianto (Patiyusuf & Vitrianto, 2022) yang Berjudul “Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjung Pinang dalam Mengelola Wisata Budaya Pulau Penyengat”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan wawancara mendalam. Dari penelitian ini didapati bahwa sumber daya manusia Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang masih minimkompetensi dalam pengelolaan pariwisata, Informasi terkait pengelolaan pariwisata perlu disampaikan lebih mendalam pada masyarakat, serta lingkungan berpengaruh pada kondisi eksternal dalam pengelolaan wisata.



Table 2. 5 penelitian terdahulu

No	Nama peneliti (judul) , tahun	Kesimpulan	Persamaan / Perbedaan
1	Mahfud (Mahfudh, 2022) (<i>Analisis Peningkatan Pendapatan Asli Daerah</i>) 2014	Membahas teori teori mengenai pendapatan asli daerah dan faktor yang berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD).	Persamaan : Sama-sama membahas mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Perbedaan : Tidak mendalam dalam membahas retribusi pariwisata
2	Sochimim (Sochimim, 2019) (Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pariwisata) 2016	Membahas mengenai pengembangan wisata berkelanjutan berbasis masyarakat.	Persamaan: Masih membahas sektor pengembangan pariwisata. Perbedaan: tidak membahas mengenai retribusi.
3	Fathul Amminudin Aziz (Aziz, 2018) (Memahami Manajemen Islam Melalui Pendekatan Tafsir Metodologis) 2018	Menjelaskan mengenai perspektif manajemen dari sisi islam melalui pendekatan metodologis	Persamaan: Sama-sama membahas manajemen. Perbedaan: masih cenderung umum dan tidak terfokus pada manajemen pariwisata.
4	Jeiny Ribka et al (Ribka, et al.,	dari penelitian tersebut didapati bahwa berdasar	Persamaan: Menghitung

	2021) (Analisis Efektivitas, Efisiensi Dan Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara), 2021	data tahun 2009-2019 berdasarkan perhitungan efektivitas setiap taun meningkat dan daam kategori cukup efektif sedangkan untuk kontribusinya terhadap PAD rata rata hanya sebesar 23 persen saja.	kontribusi terhadap PAD. Perbedaan: Lokasi penelitian, bidang yang diteliti lebih pada pajak da retribusi daerah.
5	Romi Dwi Rahmoko (Rahmoko, 2020) (analisis retribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah) 2020	Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwasanya dari tiga komponen perhitungan didapati pendapatan retribusi pariwisata dikatakan efektif, dengan tingkat efisiensi rata rata 3,18 persen namun kontribusinya terhadap PAD masih dibawah 20 persen.	Persamaan : Menghitung efektivitas dan kontribusi sektor wisata. Perbedaan : objek penelitian dan komponen yang dihitung.
6	Niken Setyani (Setyani, 2022) (Peran Dinas Pariwisata Diy Dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata Berdasarkan Paradigma Pembangunan Berkelanjutan), 2022	Penelitian ini membahas mengenai impementasi kebijakan publik yang dilakukan atas rencana pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.	Persamaan : sama sama membahas mengenai peranan dinas pariwisata Perbedan : Tidak membahas mengenai besaran kontribusi, efektivitas dan pertumbuhan retribusi pariwisata
7	Surianto Ilham (Ilham, et al., 2022) (Analisis Kontribusi, Pertumbuhan,	Penelitian ini menyajikan perhitungan atas empat elemen diantaranya kontribusi, pertumbuhan, efisiensi, efektivitas	Persamaan : Komponen yang diteliti berupa kontribusi, efektivitas dan

	Efisiensi dan Efektivitas Retribusi Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kolaka) 2022	pariwisata kabupaten kolaka PAD rentang waktu 2016-2020.	pertumbuhan pariwisata Perbedaan : Objek penelitian berbeda yang mana pada penelitian yang ditulis oleh Ilham hanya terfokus di Kabupaten Kolaka saja dan rentang waktunya juga hanya dari 2016 hingga 2020.
8	Muhammad Patiyusuf dan Vitrianto (Patiyusuf & Vitrianto, 2022) (Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang dalam Mengelola Wisata Budaya Pulau Penyengat)	Diketahui bahwasanya sosialisasi dan upaya maksimal dari dinas pariwisata diperlukan dalam pengelolaan pariwisata.	Persamaan : sama sama mengkaji mengenai peran dinas pariwisata dalam pelaksanaan tugas sebagai pelaksana koordinasi kebijakan yang kaitannnya dengan pariwisata. Perbedaan : objek penelitian.

Sumber : Kumpulan penelitian terdahulu

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif menganggap bahwa karakteristik setiap masalah berbeda dari yang lain. Tujuan penelitian menggunakan metode ini walaupun didalamnya terdapat perhitungan terkait rasio laju pertumbuhan, kontribusi dan efektivitas adalah agar dapat mempelajari secara seksama dan sistematis pengambilan kebijakan yang dilakukan DISPORAPAR dan perhitungan efektivitas retribusi secara mendetail untuk menjelaskan masalah yang diteliti.

Alasan menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini karena bertujuan untuk mengetahui suatu kondisi strategis yang dilakukan Disporapar dimana pengumpulan datanya menggunakan teknik triangulasi (gabungan), data dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya hasilnya akan lebih terfokus pada makna yang digeneralisasi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus, dalam hal ini penulis beranggapan bahwa penggunaan metode studi kasus merupakan pendekatan yang mendalam dan merinci serta lebih terfokus menelaah permasalahan yang sifatnya kontemporer. Pendekatan studi kasus dalam penelitian ini harapannya bisa menjadikan data yang disajikan lebih merinci dan terfokus pada suatu fenomena.

B. Tempat dan waktu penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Cilacap yang beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani No. 8, Sidakaya satu, Sidakaya, Kec Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Kode Pos : 53212, telepon : (0282) 534481, faximil : (0282) 531988, website resmi : www.disporapar.cilacapkab.go.id, email : diparta_clp@yahoo.co.id, facebook : cilacap tourism, instagram : @disporapar.cilacap, twitter : @wisataclp

Penelitian dilakukan dalam kurun waktu 1 November 2023 sampai dengan bulan 18 April 2024. Alasan pemilihan Kabupaten Cilacap menjadi lokasi penelitian karena berdasarkan peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah No. 10 tahun 2012 mengenai rencana induk pariwisata Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2027, pariwisata Kabupaten Cilacap akan diarahkan menjadi kawasan strategis pariwisata Jawa Tengah dan sumber daya pariwisata Cilacap dapat dijadikan pilihan wisata provinsi, maka sudah seharusnya pendapatan retribusi pariwisata perlu adanya pengoptimalan dari segi pengelolaan. Kabupaten Cilacap dipilih sebagai salah satu kawasan strategis pariwisata provinsi karena menawarkan daya tarik berupa wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan, namun dalam pengelolaannya bila dilihat dari besaran PAD Kabupaten, pendapatan yang didapat dari sektor pariwisata.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian yang mana darinya didapati informasi mengenai data penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Ibu Ida Farida selaku subkoor pengembangan bidang pengembangan usaha pariwisata dan Bapak Agus Riyadi selaku staf pengembangan daya tarik wisata dan kawasan pariwisata alasannya karena data yang diambil akan lebih akurat menimbang data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah bagian dari bidang pengembangan destinasi pariwisata.

Objek yang akan dianalisis lebih pada stategi pengelolaan pariwisata pada tahun-tahun kedepan bilamana menimbang besaran efektivitas, laju pertumbuhan dan kontribusi retribusi pariwisata pada tahun 2021 hingga 2023.

D. Jenis dan Sumber Data

Data primer dalam penelitian ini diambil dari wawancara yang dilakukan Bersama dengan Ibu Ida Farida, S.E selaku Subkoordinator bidang pengembangan usaha pariwisata dan Bapak Agus Riyadi selaku staf bidang pengembangan daya tarik pariwisata alasannya karena data yang diambil akan lebih sekaligus menjadi indikator untuk menguji keabsahan data dengan cara

mewawancarai dua unit sub bidang berbeda meski masih dalam satu bidang yaitu pengembangan destinasi pariwisata.

Sedangkan data sekunder merupakan jenis data yang diambil secara tidak langsung ke pada subjek penelitian. Data sekunder penelitian ini penulis kumpulkan dari berbagai macam sumber, teori teori penulis kumpulkan dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, aturan perundangan dan artikel lain yang berkaitan dengan penelitian.

Data berupa dokumentasi penulis ambil secara langsung pada saat proses wawancara. Adapun dokumentasi yang penulis ambil sebagai salah satu aspek pendukung data adalah dokumentasi berupa foto dan audio. Sedangkan data penelitian berupa data kunjungan, pendapatan retribusi sektor pariwisata, bagi hasil retribusi pariwisata penulis dapatkan dari arsip Disporapar. Dan data pendapatan asli daerah penulis dapatkan lewat pengajuan permohonan data pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu strategi guna mengumpulkan data-data terkait objek penelitian. Hal ini untuk memudahkan peneliti dalam menyusun penulisannya. Prosedur mendapatkan data yaitu dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Observasi merupakan aktivitas mengamati lingkungan sekitar berkaitan dengan objek penelitiannya berdasarkan atas gagasan yang sudah diketahui sebelumnya. Observasi dilakukan secara sistematis terhadap berbagai gejala yang berkaitan dengan objek penelitian. Pada tahapan observasi, penulis berusaha mengamati permasalahan pengelolaan pariwisata di Kabupaten Cilacap dan berusaha menggali informasi terkait pendapatan retribusi di Kabupaten Cilacap apakah kontribusinya sudah maksimal atau belum pada pendapatan daerah.

Wawancara merupakan sebuah langkah mendapatkan informasi lebih melalui aktivitas bertanya kepada pihak terkait. Bisaanya pertanyaan diajukan

secara spontanitas dan bersifat lebih terbuka serta bebas namun tetap seputar objek penelitiannya. Wawancara sebagai bentuk komunikasi peneliti dengan sumber data dengan maksud mendapatkan informasi terkait masalah yang akan diteliti.

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak Disporapar Kabupaten Cilacap, pada proses wawancara peneliti mendapatkan informasi tambahan atas pengelolaan pariwisata dan penarikan retribusi pariwisata di Kabupaten Cilacap. Dari proses wawancara pula penulis banyak mendapatkan informasi baru yang bertentangan dengan observasi penulis sebelum terlaksananya sesi wawancara.

Guna mendukung informasi tersebut peneliti juga telah melakukan prosedur dokumentasi yaitu mendapatkan data berupa prosentase bagi hasil, data pendapatan asli daerah, list daya tarik pariwisata, data kunjungan pariwisata dari dokumen dan arsip milik Disporapar Kabupaten Cilacap. Dokumentasi didukung dengan berbagai sumber fakta dan data yang ada serta diambil dari referensi arsip, dokumen, perundangan, jurnal, skripsi ataupun buku.

F. Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, guna menguji keabsahan data yang ada peneliti menggunakan metode triangulasi. Tujuan penulis menggunakan metode ini karena untuk menguji data yang sebelumnya sudah diperoleh di DISPORAPAR. Pengecekan data bersumber dari berbagai waktu dan cara. Ada tiga macam dalam proses triangulasi. Pertama, triangulasi sumber. Metode ini merupakan proses pengecekan data yang dilakukan dengan berbagai sumber (Sugiyono, 2020). Metode ini penulis lakukan dengan cara mewawancarai dua sub bidang yang ada dalam bidang pengembangan destinasi pariwisata, harapannya data yang didapat nantinya akan menghasilkan sebuah kesimpulan yang dinyatakan valid.

Kedua, triangulasi teknik. Metode ini untuk menguji keabsahan data melalui pengecekan data dengan berbagai teknik (Sugiyono, 2020). Sebagai

contoh, data diperoleh dari observasi lalu dicek menggunakan teknik wawancara dengan pihak Disporapar. Pengecekan ulang data yang diterima memberi kepastian data mana yang dianggap valid. Pada triangulasi teknik penulis mengobservasi terlebih dahulu gambaran kasar dari pengelolaan pariwisata di Kabupaten Cilacap lalu setelah data observasi terkumpul penulis lanjutkan dengan proses wawancara.

Ketiga, triangulasi waktu. Metode ini untuk menguji keabsahan data dengan cara data dikumpulkan dari hasil wawancara sebelumnya. Setelah itu, data dicek kembali dengan cara melakukan wawancara kembali namun dalam waktu yang berbeda (Sugiyono, 2020) Dalam penelitian ini peneliti melakukan triangulasi waktu dengan cara wawancara dan pengecekan kembali informasi informasi yang didapat Ketika wawancara. Penulis menggali untuk kedua kalinya pertanyaan yang sebelumnya telah penulis tanyakan pada sesi wawancara sebelumnya guna mengurangi cacatnya informasi yang telah diberikan oleh informan sebelumnya, dalam hal ini Ibu Farida dan Bapak Agus Riyadi. Metode triangulasi yang sudah penulis lakukan harapannya dapat mengurangi kecacatan informasi dan data penelitian dan untuk meningkatkan kevalidan kesimpulan sehingga mengurangi resiko terbatasnya hasil kesimpulan.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan metode rasio kontribusi, rasio pertumbuhan dan rasio efektivitas yang mengacu pada model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2020). Penggunaan analisis rasio digunakan agar pembaca dapat mengetahui persentase besaran laju pertumbuhan, besaran efektivitas, serta kontribusi retribusi pariwisata terhadap pendapatan asli daerah. Besaran persentase yang dimunculkan dapat dianalisis untuk melihat untuk membantu manajemen dan pemangku kepentingan untuk memahami kinerja finansial dan operasional berdasarkan data yang ada.

Kemudian dalam penelitian ini juga menggunakan analisis SWOT dengan tujuan untuk membuat keputusan yang strategiss terkait strategi peningkatan

laju pertumbuhan, peningkatan efektivitas retribusi serta peningkatan besaran kontribusi pariwisata terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Cilacap. Penggunaan analisis SWOT juga dipilih karena analisis ini bisa sekaligus dijadikan alat untuk menilai kinerja sehingga dapat meningkatkan area-area yang kurang optimal (Harris, n.d.).

Data kualitatif dianalisis melalui tiga tahapan yaitu : Pertama, menghimpun data primer menggunakan teknik wawancara dengan Ibu Ida Farida, S.E selaku Subkoordinator bidang pengembangan usaha pariwisata dan Bapak Agus Riyadi selaku staf bidang pengembangan daya tarik pariwisata dan dokumentasi untuk mengumpulkan catatan berupa foto bagi hasil retribusi daya Tarik wisata dan data nama daya tarik wisata, dokumen atau laporan tentang target capaian realisasi retribusi pariwisata.

Tahapan analisis rasio laju pertumbuhan pada penelitian ini diawali dengan menghimpun data retribusi pariwisata dari 2020 sampai dengan 2023, data yang dikumpulkan berupa realisasi penerimaan retribusi pariwisata. Tahap menghimpun data analisis rasio efektivitas retribusi diawali dengan menghimpun data terkait realisasi penerimaan retribusi pariwisata dan data target penerimaan retribusi pariwisata dari tahun 2021 sampai dengan 2023, dan tahap menghimpun data analisis rasio kontribusi dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan menghimpun data menggunakan teknik wawancara, dihimpun pula data pendapatan asli daerah yang akan dianalisis dan data retribusi pariwisata yang akan dianalisis.

Pada penelitian ini peneliti menghimpun data dari tahun 2020 hingga tahun 2023, alasannya hingga tahun 2020 akhir angka kasus Covid-19 masih sangat tinggi, oleh karena itu penulis memilih membandingkan rasio dari tahun 2021 sampai dengan 2023 dimana tahun tersebut angka Covid-19 sudah turun sehingga hasil analisis bisa dijadikan proyeksi untuk tahun-tahun mendatang.

Pada analisis SWOT untuk menentukan strategi pengelolaan pariwisata mula- mula penulis menyatukan menjadi tiga variabel yaitu variabel pertumbuhan retribusi, variabel efektivitas retribusi dan yang ketiga variabel kontribusi retribusi pariwisata terhadap pendapatan asli daerah kedalam satu

variabel yaitu variabel pengelolaan daya tarik wisata. Selanjutnya penulis mengumpulkan data yang relevan mengenai kekuatan (*strengths*), dan peluang (*opportunity*), kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*) variabel pengelolaan wisata (Idtesis, n.d.).

Kedua, penyajian data merupakan tahapan mengorganisasi, menyatukan informasi yang telah didapat, pada tahapan ini penulis berusaha menyajikan data dalam bentuk kalimat, tabel dan bagan guna memberikan informasi umum tentang objek penelitian (Sugiyono, 2020). Tahapan analisis ini mendorong untuk memahami fenomena atau peristiwa yang terjadi dan untuk menentukan apa yang akan dilakukan berikutnya, termasuk dengan menggunakan pemahaman untuk melakukan analisis lebih dalam. Data penelitian ini disajikan berbentuk uraian singkat, narasi dan tabel serta bagan. Proses ini akan dilakukan dengan menguraikan data dengan menggunakan rumus laju pertumbuhan, efektivitas retribusi dan kontribusi retribusi, kemudian penulis melanjutkan dengan proses pendeskripsian.

Pada analisis rasio laju pertumbuhan, analisis rasio efektivitas dan analisis rasio kontribusi, data yang sudah dikumpulkan diolah menggunakan rumus di masing-masing tahunnya sehingga menghasilkan tabel hasil perhitungan kontribusi yang dinyatakan dalam persentase dan kemudian hasil perhitungan rasio diinterpretasikan menggunakan kriteria penilaian (Ilham, et al., 2022).

Pada analisis SWOT variabel laju pertumbuhan, efektivitas dan kontribusi kemudian diidentifikasi menggunakan elemen SWOT berupa identifikasi aspek keunggulan internal, menemukan kelemahan dan area kurang internal, mengidentifikasi peluang yang bisa dicapai dan mengidentifikasi ancaman yang mungkin bisa terjadi. Setelah itu hasil identifikasi tadi dibuat matriks SWOT dengan empat kuadran, yang mana masing masing kuadran berisi poin relevan dari masing-masing elemen SWOT.

Ketiga, penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2020). Pada tahapan ini penulis menarik kesimpulan yang dikaitkan dengan hasil pengukuran elemen laju pertumbuhan, efektivitas retribusi dan kontribusinya pada PAD.

Dari penggunaan rumus sudah dihitung sebelumnya maka didapati hasil atas laju pertumbuhan, efektifitas retribusi pariwisata, dan kontribusi retribusi pariwisata terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Cilacap. Berdasarkan hal tersebut penulis kemudian menjabarkan dalam bentuk tulisan hasil dari perhitungan dan dikaitkan dengan strategi yang akan dilakukan DISPORAPAR untuk mengupayakan peningkatan pertumbuhan penerimaan retribusi dan kontribusinya pada PAD yang akan ditampilkan dengan analisis SWOT.

Pada analisis rasio laju pertumbuhan, rasio efektivitas dan rasio kontribusi hasil perhitungan rasio yang sudah dihitung dari tahun ketahun dibandingkan untuk menganalisis tren pertumbuhan atau penurunan kontribusi serta menginterpretasi masalah yang muncul dari hasil perhitungan.

Pada analisis SWOT setelah mengidentifikasi elemen dalam kuadran-kuadran pada tahap penyajian, kemudian Langkah terakhir adalah menganalisis hasil matriks SWOT dengan cara menggabungkan kekuatan dan peluang (SO), mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang,(WO), menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman (ST) dan mengurangi kelemahan untuk meminimalkan dampak ancaman (WT) (Yatminiwati & Ermawati, 2022).

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Cilacap

Kabupaten Cilacap merupakan wilayah cukup luas di provinsi Jawa Tengah bagian barat daya, luas daerahnya mencapai 225.360,840 Ha. Secara Geografis terletak pada 108-4,30-109,30' 30' Garis Bujur Timur 7,30 – 7,45' 20' Garis Lintang Selatan. Kabupaten Cilacap terbagi menjadi 24 kecamatan yang terdiri dari 284 desa dan kelurahan. Wilayah tertinggi ada di Kecamatan Dayeuhluhur dengan tinggi 198 m di atas permukaan laut dan wilayah terendahnya berada di Kecamatan Cilacap Selatan yang ada pada ketinggian 6 m di atas permukaan laut. Wilayahnya berbatasan langsung dengan kabupaten brebes dan banyumas di bagian utara, kabupaten kebumen di sebelah timur, dan Samudra Hindia di bagian selatan, serta kabupaten Ciamis dan Kota Banjar di provinsi Jawa Barat. Kabupaten Cilacap merupakan salah satu daerah tujuan wisata di Jawa Tengah karena memiliki berbagai keunikan pariwisata (Riyadi, 2024).

Kabupaten Cilacap merupakan kota pelabuhan dan industri perdagangan, dan pariwisata. Untuk mencapai pusat kota Cilacap dapat dijangkau dengan transportasi darat, laut melalui pintu gerbang Pelabuhan Tanjung Intan serta jalur udara melalui Bandara Tunggul Wulung. Sebagai kota yang berpotensi dalam sektor pariwisata, Kabupaten Cilacap mempunyai keindahan alam yang menakjubkan flora, fauna, pegunungan, bahari, gua-gua dan kehidupan pedesaan dengan budaya disamping karya seni serta peninggalan sejarah yang mempunyai daya tarik yang tinggi bagi wisatawan. Kabupaten Cilacap mempunyai Obyek Wisata yang menarik berupa wisata alam, budaya, sejarah, dan Industri.

Kabupaten Cilacap memiliki banyak potensi pariwisata yang dapat dikembangkan sebagai sektor pendapatan daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 10 tahun 2012 mengenai Rencana Induk

Pariwisata Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2027. Pariwisata Kabupaten Cilacap akan diarahkan menjadi kawasan strategis pariwisata Jawa Tengah karena sumber daya pariwisata dapat dijadikan pilihan wisata provinsi. Kabupaten Cilacap dipilih sebagai salah satu kawasan strategis pariwisata provinsi karena menawarkan daya tarik berupa wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan

Kabupaten Cilacap lebih ikonik dengan sebutan kota industri. Meski demikian, Kabupaten Cilacap sangat banyak dianugerahi dengan keindahan alam, salah satunya hamparan pantai yang terbentang di bagian selatan. Daya Tarik wisata alam Pantai Cilacap membujur sisi bagian timur yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kebumen hingga bagian Selatan yang berdekatan dengan Pulau Nusakambangan. Diantara Obyek Wisata Pantai yang cukup menonjol adalah Obyek Wisata Pantai Teluk Penyau, Pantai Cemara Sewu Jetis, Pantai Congot, Pantai Bungso, dan Pantai Indah Widarapayung. Dan tidak ketinggalan adalah obyek wisata ilmu pengetahuan/ pendidikan yaitu Hutan Payau (Mangrove) dengan habitatnya yang khas dan dapat digunakan sebagai tempat penelitian ekologi dan laboratorium alam (Farida, 2023).

Berikut data kunjungan pariwisata Kabupaten Cilacap periode 2021 sampai dengan 2023:

Table 4. 1 Data Kunjungan Wisata Tahun 2020-2023

No`	Nama Daya Tarik Wisata	Tahun				
		Alamat	2020	2021	2022	2023
1	Air Panas Cipari	Desa Cipari Kec Cipari	17.305	16.965	33.053	22.275
2	Curug Giriwangi	Desa Cipari Kec Cipari	2.574	205		
3	Curug Cimendaway	Desa Datar Kec Dayeuhluhur	2.252	940	744	657
4	Gunung Selok	Desa Kr Benda Kec Adipala	206	9.608	10.166	7.098
5	Gunung Srandil	Desa Glemgangpasir Kec Adipala	38.307	2.220	1.112	978

6	Waduk Kubangkangkung	Desa Kubangkangkung Kec Kawunganten	7.167	1.821	1.441	
7	Kemit Forest Education	Desa Kr Gedang Kec Sidareja	71.362	42.103	33.512	18.605
8	Hutan Payau	Kel Tritih kulon Kec Cilacap Utara	10.887	7.652	5.012	6.116
9	Curug Penganten	Desa Bengbolang Kec Karangpucung		902		
10	Pantai Teluk Penyu	Kel Cilacap Kec Cilacap Utara	75.591	128.301	129.696	114.697
11	Benteng Pendem	Kel Cilacap Kec Cilacap Utara	24.213	15.910	25.632	23.409
12	Curug Mandala	Desa Mandala Kec Jeruklegi		2.603	1.872	668
13	Pantai Buntan	Desa Buntan Kec Adipala		13.992	32.101	37.748
14	WPK (Wisata Pinggir Kali)	Desa Buntan Kec Adipala		22.753	45.523	35.356
15	Taman Pesona Serayu	Desa Kesugihan Kidul Kec Kesugihan	11.235	21.812	23.640	
16	Pantai Sodong	Desa Kr Benda Kec Adipala	9.898	20.092	34.326	19.248
17	Pantai Sidayu Indah	Desa Sidayu Kec Binangun		10.740	17.175	12.221
18	Pantai Indah widarapayung	Desa Widarapayung Wetan Kec Binangun	16.447	30.862	30.548	66.326
19	Pantai Cemara Sewu Jetis	Desa Jetis Kec Nusawungu	54.579	15.098	34.653	115.914
20	Pantai Bungso Jetis	Desa Jetis Kec Nusawungu	38.006	211.253	168.486	176.443
21	Pantai Congot Jetis	Desa Jetis Kec Nusawungu	35.921	163.497	284.074	279.773
22	Kutawaru Cilacap	Kel Kutawaru Kec Cilacap Tengah	22.492	2.334		
23	Pantai Tegal Kamulyan	Kel Kemiren Kec Cilacap Selatan		3.891	4.002	5.631
24	Pantai Menganti	Desa Menganti Kec Kesugihan		2.807	3.324	3.279
25	Pantai Wagir Indah	Desa Welahan Wetan Kec Adipala		924		

26	Pantai Lancang Indah	Desa Widarapayung Wetan Kec Binangun		1.379	3.168	4.867
27	Pantai Ketapang Indah	Desa Sidaurip Kec Binangun		6.003	9.957	9.190
28	Pantai Singkil Indah Sidaurip	Desa Sidaurip Kec Binangun		2.036	3.752	5.801
29	Padepokan Jambe Lima Selok	Desa Kr Benda Kec Adipala		2.566	1.884	763
30	Padepokan Jambe Pitu Selok	Desa Kr Benda Kec Adipala		1.632	1.875	935
31	Waterpark Tirtamas Indah	Kel Sidanegara kec Cilacap Selatan		7.816	18.727	20.185
32	Sentul Waterpark	Kel Sidanegara kec Cilacap Selatan		4.195	5.762	3.412
33	Banaran Waterboom	Desa Gandrungmangu Kec Gandrungmangu		4.412	8.245	
34	Kolam Renang Krama Cenil Menganti	Desa Bojongsari Kec Kedungreja		2.314		
35	Kolam Renang Tirta Rengganis Sidareja	Desa Jatisari Kec Kedungreja		4.447	7.062	3.925
36	Kolam Renang Tirtasari Bantarsari	Desa Bantarsari Kec Bantarsari		7.182	7.174	
37	Kolam Renag Waterpark Kunci Sidareja	Desa Sidamulya Kec Sidareja		3.267	3.328	955
38	Kolam Renang Banyu Pratama Sidasari	Desa Sidasari Kec Sampang	4.760	13.600	20.319	23.163
39	Museum Susilo Soedarman Gentasari	Desa Gentasari Kec Kroya	10.815	5.561	16.817	22.961
40	Kolam Renang Sarirasa	Desa Kr jati Kec Sampang	10.731	19.344	24.038	41.813
41	Kolam Renang Tirta Indah Bojong	Desa Datar Kec Dayeuhluhur		4.304	5.745	2.802

42	Kolam Renang Tirta Wungu	Desa Planjan Kec Kesugihan	2.311	5.666	4.664	5.341
43	Sunan Kali Jogo/ SUKA kahuripan kidul	Desa Kuripan Kidul Kec Kesugihan			1.656	468
44	Taman Pesona Rengganis	Desa Jatisari Kec Kedungreja			3.596	3.451
45	Taman Twis Sidareja	Desa Sidamulya Kec Sidareja			1.433	550
46	Cigimbal Park Tritih	Kel Tritih kulon Kec Cilacap Utara				10.042
47	Taman Wisata Dinosauris	Desa Muktisari Kec Gandrungmangu				3.261
48	Havana Hills	Desa Jeruklegi Kec Jeruklegi				311.625
49	Sena Park Kroya	Desa Kroya Kec Kroya				25.701
50	Kolam Renang Tirta Ceria	Desa Rawajaya Kec Bantarsari				2.615

Sumber: Arsip Disporapar kabupaten Cilacap

2. Profil DISPORAPAR Kabupaten Cilacap

Keberadaan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (DISPORAPAR) dilatarbelakangi dari pembenahan masalah kepariwisataan yang hingga tahun 1982 masih ditangani oleh Departemen Perhubungan. Menimbang banyak dari objek wisata yang tidak terpusat, maka pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1979 atas penyerahan sebagian urusan pemerintah dalam bidang kepariwisataan kepada Daerah tingkat I yang terbagi menjadi 12 unsur.

Semakin berkembangnya kepariwisataan di daerah dan kompleksnya permasalahan yang dihadapi dan secara langsung harus melibatkan Daerah Tingkat II, maka selanjutnya pada tahun 1984 Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah menyerahkan 6 urusan kepariwisataan kepada Daerah Tingkat II yang dijabarkan menjadi peraturan daerah Nomor 7 Tahun 1986 yaitu tentang pembentukan dinas pariwisata Kabupaten Cilacap dan struktur organisasi. Adapun 6 urusan kepariwisataan meliputi:

a. Obyek Wisata sepanjang tidak menjadi urusan daerah Tingkat I

- b. Pramuwisata khusus
- c. Penginapan remaja
- d. Rumah makan
- e. Usaha rekreasi dan hiburan umum
- f. Promosi pariwisata daerah

Hingga tahun 1983 urusan perekonomian di Kabupaten Cilacap dikelola oleh satu badan khusus yang bernama Badan Pengelola Obyek Wisata (BPOW). Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap maka Dinas Pariwisata (DIPARTA) Kabupaten Cilacap berubah menjadi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kabupaten Cilacap.

Pada tahun 2010 sehubungan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kabupaten Cilacap berubah lagi menjadi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (DISPARBUD) Kabupaten Cilacap. Dan terakhir dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (DISPARBUD) berubah lagi menjadi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (DISPORAPAR) Kabupaten Cilacap sampai sekarang.

3. Lokasi Kantor Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata

Kantor Dinas pemuda olahraga dan pariwisata Kabupaten Cilacap terletak di Jl. Jend. Ahmad Yani Nomor 8 Kelurahan Sidakaya Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah, Indonesia dengan kode pos 53212. Adapun informasi lain DISPORAPAR Kabupaten Cilacap sebagai berikut:

Telepon : (0282) 534481

Faximil : (0282) 531988

Website : www.disporapar.cilacapkab.go.id

Email : diparta_clp@yahoo.co.id

Facebook : cilacap tourism

Instagram : @disporapar.cilacap

Twiter : @wisataclp

4. Visi dan Misi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap (Disporapar)

Disporapar Kabupaten Cilacap beralamat di Jl Jend. Ahmad Yani No 8 Kelurahan Sidakaya Kecamatan Cilacap, Selatan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Adapun Visi DISPORAPAR adalah: “CILACAP YANG BERBUDAYA DAN SEJAHTERA”

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan organisasi dan sasaran yang ingin dicapai di masa depan. Untuk mewujudkan Visi yang ingin dicapai, telah dirumuskan Misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan masyarakat yang menjunjung tinggi budaya dan nilai-nilai luhur serta kerukunan antarumat beragama ditandai dengan hubungan antarmasyarakat yang harmonis dan saling menghormati.
- b. Menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat
- c. Penegakan supremasi hukum dalam rangka menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan.
- d. Menciptakan stabilitas politik dan keamanan sebagai pendukung iklim investasi dan peningkatan perekonomian daerah.
- e. Memaksimalkan potensi daerah melalui peningkatan daya saing yang handal.
- f. Meningkatkan kualitas ekonomi rakyat melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada dengan memperhatikan aspek keseimbangan pelestarian alam.
- g. Membangun infrastruktur yang dapat menunjang pembangunan.
- h. Mewujudkan pembangunan yang memperhatikan aspek tata ruang yang menunjang kesejahteraan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun

2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap yang telah ditetapkan.

- i. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.
(Cilacap, n.d.)

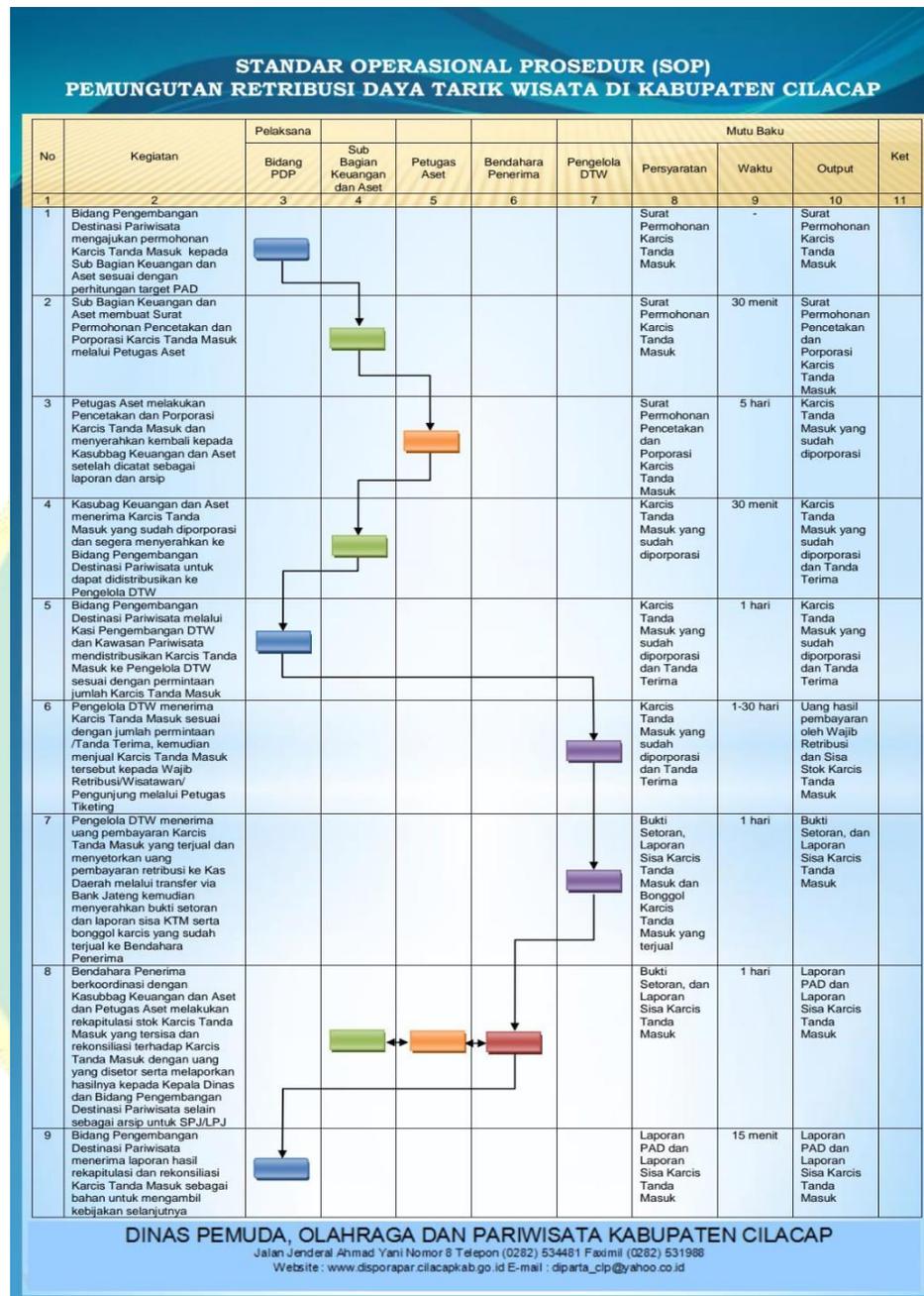
5. Tugas dan Fungsi

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, dan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang kepemudaan, keolahragaan, pengembangan destinasi pariwisata, dan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang kepemudaan, keolahragaan, pengembangan destinasi pariwisata, dan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan, keolahragaan, pengembangan destinasi pariwisata, dan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan, keolahragaan, pengembangan destinasi pariwisata, dan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif;
- e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Alur penarikan retribusi berjalan berdasarkan mekanisme standar operasional prosedur pemungutan retribusi kabupaten cilacap. Adapun alur pemungutannya sebagai berikut :

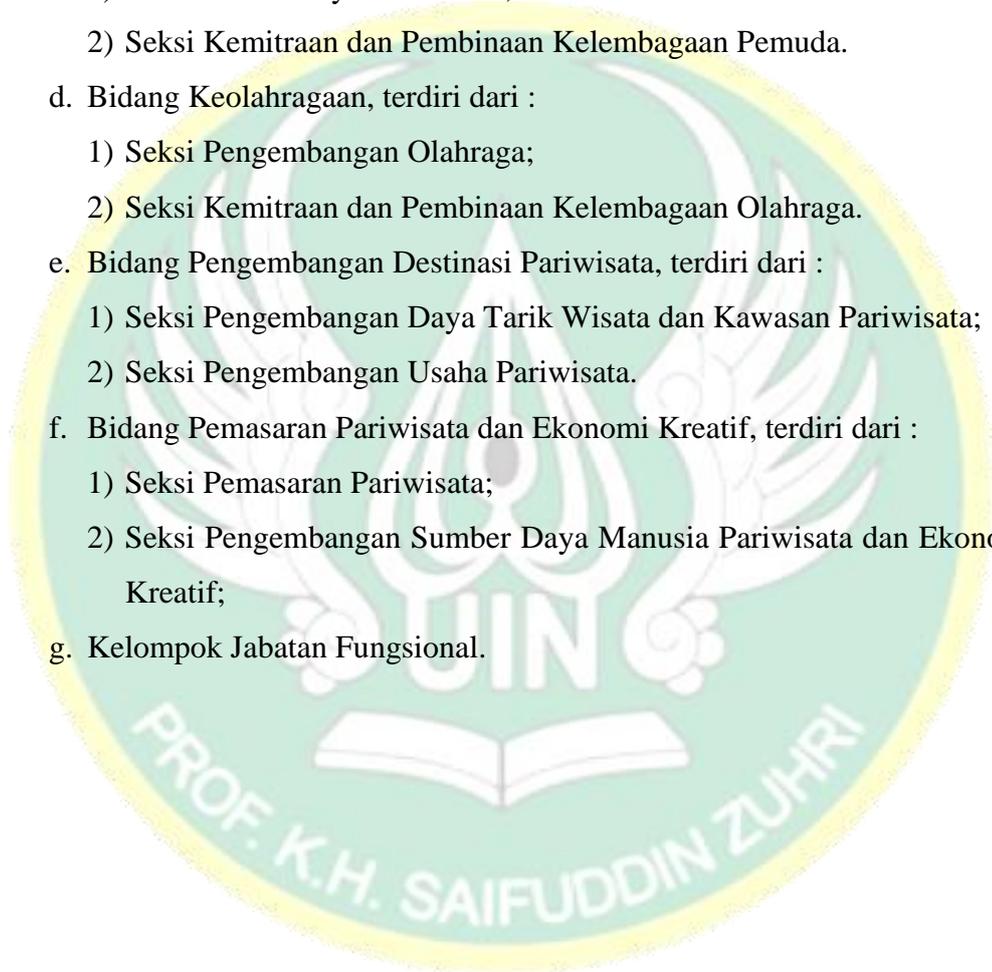
Gambar 4. 1 Alur Penarikan Retribusi



Sumber: Disporapar Kabupaten Cilacap

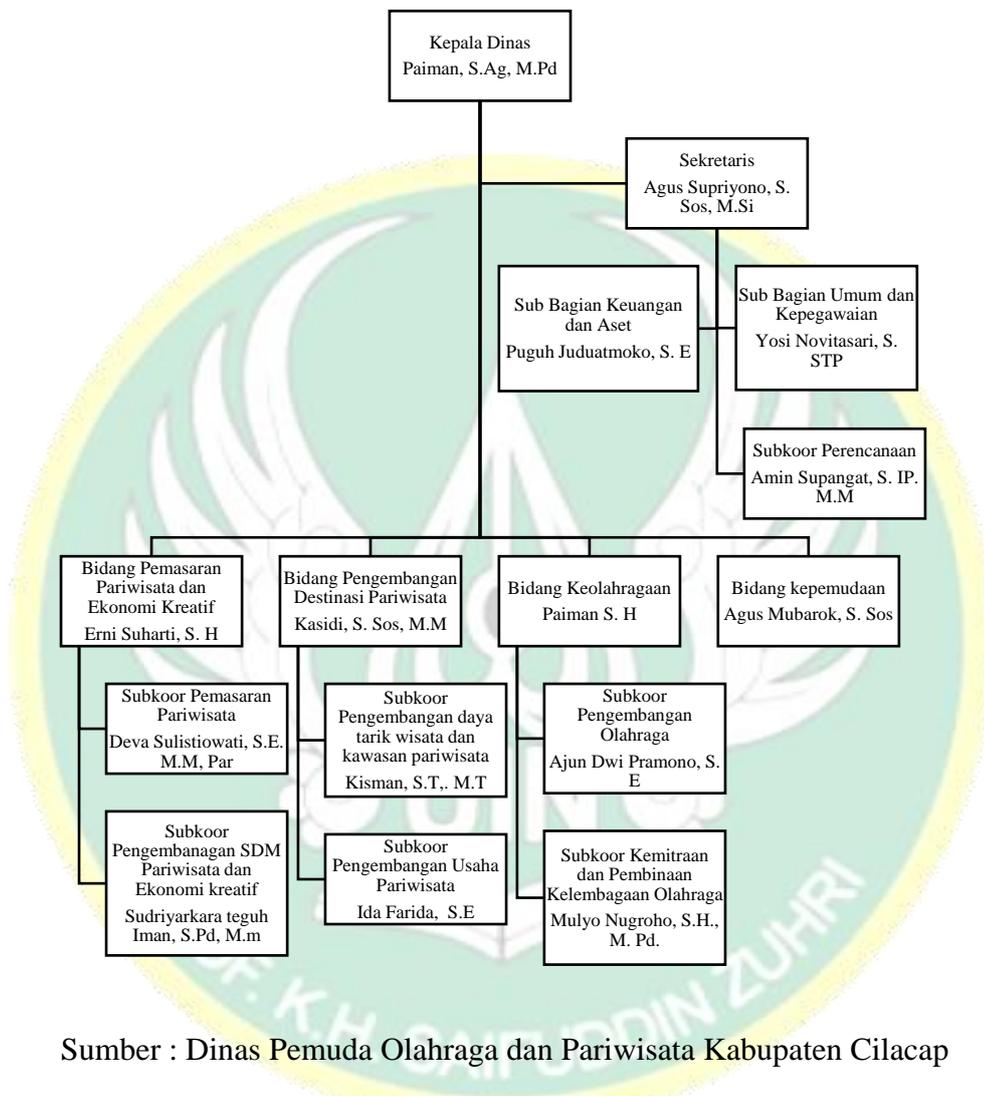
Berdasarkan PERBUP Cilacap No 99 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap. Adapun Susunan Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Kepemudaan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pemberdayaan Pemuda;
 - 2) Seksi Kemitraan dan Pembinaan Kelembagaan Pemuda.
- d. Bidang Keolahragaan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengembangan Olahraga;
 - 2) Seksi Kemitraan dan Pembinaan Kelembagaan Olahraga.
- e. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata dan Kawasan Pariwisata;
 - 2) Seksi Pengembangan Usaha Pariwisata.
- f. Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pemasaran Pariwisata;
 - 2) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.



6. Struktur Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap

Gambar 4. 2 Bagan Organisasi Disporapar Kabupaten Cilacap



Sumber : Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap

B. Analisis Laju Pertumbuhan Retribusi Pariwisata Kabupaten Cilacap

Menurut Halim (Halim, 2014) Rasio pertumbuhan mengukur besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan serta meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan komponen sumber penndapatan dan pengeluaran, maka dapat digunakan sebagai alat ukur untuk mengevaluasi sector yang perlu mendapat perhatian.

Rumus menghitung laju pertumbuhan sebagai berikut (Halim, 2014):

$$\text{Pertumbuhan (Gx)} = \frac{X_n - X_{(n-1)}}{X_{(n-1)}} \times 100\%$$

Keterangan :

X_n : realisasi penerimaan retribusi pariwisata pada tahun tertentu.

$X_{(n-1)}$: realisasi penerimaan retribusi pariwisata tahun sebelumnya.

Perhitungan laju pertumbuhan penerimaan retribusi daerah bertujuan untuk mengetahui perkembangan retribusi pariwisata dari tahun ke tahun. Berikut hasil hitung laju pertumbuhan retribusi daerah kabupaten Cilacap periode 2021-2023:

1. Laju Pertumbuhan Tahun 2021:

$$G_x 2021 = \frac{X_{2021} - X_{2020}}{X_{2020}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Rp } 386.410.835 - \text{Rp } 228.745.922}{\text{Rp } 228.745.922} \times 100\% = 68,93\%$$

2. Laju Pertumbuhan Tahun 2022:

$$G_x 2022 = \frac{X_{2022} - X_{2021}}{X_{2021}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Rp } 398.897.773 - \text{Rp } 386.410.835}{\text{Rp } 386.410.835} \times 100\% = 3,23\%$$

3. Laju Pertumbuhan Tahun 2023 :

$$G_x 2023 = \frac{X_{2023} - X_{2022}}{X_{2022}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Rp } 297.163.328 - \text{Rp } 398.897.773}{\text{Rp } 398.897.773} \times 100\% = -25,5\%$$

Berdasarkan pada hasil perhitungan laju pertumbuhan retribusi pariwisata Kabupaten Cilacap diatas dengan kriteria laju pertumbuhan retribusi daerah sebagai berikut:

Table 4. 2 Kriteria Laju Pertumbuhan

No.	% Laju Pertumbuhan	Kriteria
1	85%-100%	Sangat Berhasil
2	70%-85%	Berhasil
3	55%-70%	Cukup Berhasil
4	30%-55%	Kurang Berhasil
5	Kurang dari 30 %	Tidak Berhasil

Sumber : (Sartika, 2022)

Dapat disimpulkan laju pertumbuhan penerimaan retribusi pariwisata Kabupaten Cilacap sebagaimana tabel di bawah ini:

Table 4. 3 Hasil perhitungan laju pertumbuhan

Tahun	Realisasi Retribusi Pariwisata (Rp)	Perubahan (Rp)	Gx (%)	Kriteria Gx
2020	228745922	-	-	-
2021	386.410.835	157.664.913	68,93%	Cukup Berhasil
2022	398.897.773	12.486.938	3,23%	Tidak berhasil
2023	258.294.146	-101.734.445	-25,5%	Tidak Berhasil

Sumber: Hasil perhitungan

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan penerimaan retribusi Pariwisata Kabupaten Cilacap dari tahun 2021 hingga tahun 2023 justru mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dari besaran laju pertumbuhan di tahun 2021 dengan kenaikan pendapatan sebesar Rp 157.664.913 yang masih dalam kategori cukup berhasil justru turun di angka 3,23% di tahun 2022 walau masih surplus sebesar Rp 12.486.938, dari perhitungan bahkan laju pertumbuhan retribusi mencapai minus hingga Rp 101.734.445 di tahun 2023. Dari hasil wawancara dengan bidang terkait, penurunan ini disebabkan oleh banyaknya daya tarik wisata yang semula dikelola oleh Disporapar justru dialih tangankan ke lembaga dan instansi lain, sehingga penerimaan yang semula dari beberapa sektor semakin

menurun karena kini hanya ada sector penerimaan tunggal. Adapun Langkah konkeret yang diupayakan oleh Disporapar untuk meningkatkan penerimaan melalui pembentukan daya tarik pariwisata baru yaitu pulau momongan dan kapal bahari banawa. Sejauh ini belum ada kajian mendalam mengenai alasan turunnya pendapatan dari tahun ke tahun, namun untuk mengurangi permasalahan ini bisa melalui strategi utama untuk peningkatan retribusi dapat dicapai sengan beberapa pilihan berikut:

1. Penambahan sumber penerimaan.

Menambah daya tarik wisata baru serta berbagai obyek pendukung dapat meningkatkan daya tarik pariwisata (Novianti, et al., 2017). Kecilnya penerimaan pariwisata bisa diatasi dengan skema peningkatan kuantitas daya tarik wisata, semakin banyak lini penerimaan maka akan berpengaruh juga pada besaran penerimaan atas retribusi pariwisata. Sedangkan skema lain juga bisa dihasilkan dari peningkatan obyek pendukung berupa berbagai fasilitas yang meningkatkan pengalaman wisatawan seperti insrastruktur yang memadahi atau fasilitas lain seperti toilet, tempat parkir dan pusat informasi wisata yang dapat meningkatkan kenyamanan pengunjung.

2. Optimalisasi Pemasaran

Untuk meningkatkan optimalisasi pemasaran daya tarik wisata dapat memanfaatkan teknologi modern dan media sosial untuk meningkatkan jumlah pengunjung yang berdampak langsung pada pendapatan retribusi (Laba & Aswan, 2017). Pemanfaatan teknologi juga dapat dilakukan dengan cara pembuatan berbagai iklan atau promosi berbasis digital contohnya web atau di berbagai media sosial seperti Instagram, Twitter, dan Tiktok. Selain penggunaan media sosial sebagai promosi dan pemasaran efektif, untuk mengoptimalkan pemasaran juga dapat dilakukan dengan cara membangun kerjasama dengan agen perjalanan (GABTF, 2024).

3. Peningkatan Kerjasama dalam Pengelolaan

Strategi membangun kemitraan antara pemerintah daerah dan pihak swasta untuk mengelola sumber daya wisata juga bisa menjadi pilihan efektif untuk meningkatkan penerimaan dan laju pertumbuhan retribusi. Pembuatan klausa perjanjian kerjasama dengan sistem bagi hasil akan meningkatkan besaran pertumbuhan mengingat semakin banyaknya perjanjian kerjasama dengan pihak swasta maka akan makin memperbanyak lini penerimaan retribusi (Novianti, et al., 2017).

4. Merumuskan Peraturan yang Mendukung

Berbagai kebijakan pemerintah yang mendukung perkembangan pariwisata sangat berpengaruh pada peningkatan pertumbuhan retribusi. Regulasi yang menjadi arah gerak pengelolaan sudah seharusnya sejalan dengan upaya peningkatan retribusi, sempitnya arah gerak lembaga akan berpengaruh langsung pada besaran penerimaan (GABTF, 2024). Kerjasama antara pemerintah dan swasta juga penting untuk menciptakan lingkungan kondusif, maka pembenahan regulasi yang memfasilitasi investasi juga perlu senantiasa dievaluasi jika tidak sesuai dengan arah tujuan peningkatan retribusi.

C. Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Pariwisata Kabupaten Cilacap

Rasio Efektivitas adalah penggambaran kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan, untuk selanjutnya dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Semakin besar kontribusi realisasi retribusi pariwisata terhadap tujuan maka akan semakin efektif pula suatu unit tersebut (Halim & Tjahjono, 2000). Efektivitas berkaitan dengan pemanfaatan sarana prasarana serta sumber daya yang berda dalam besaran tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah hasil dari program yang telah berjalan. Efektivitas retribusi pariwisata adalah perbandingan antara realisasi dan target penerimaan retribusi pariwisata pada tahun terkait. Suatu retribusi

pariwisata dapat diakui efektif bilamana penerimaan retribusi pada tahun terkait melampaui target yang sebelumnya telah ditentukan.

Efektivitas berkaitan pada bagaimana hubungan antar hasil yang diharapkan dengan capaian yang sesungguhnya. Kemampuan daerah melaksanakan tugas dikategorikan efektif bilamana rasio yang dicapai sebesar 1 (satu) atau 100%. Jadi apabila rasio efektivitasnya tinggi, maka bisa disimpulkan bahwa kemampuan daerah semakin baik (Halim, 2014)

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Pariwisata}}{\text{Target Penerimaan Retribusi Pariwisata}} \times 100\%$$

Berdasar rumus diatas dapat dikalkulasikan perhitungan efektivitas penarikan retribusi pariwisata Kabupaten Cilacap sebagaimana berikut:

1. Efektivitas Tahun 2021

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Penerimaan Retribusi Pariwisata 2021}}{\text{Target Penerimaan Retribusi Pariwisata 2021}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp } 386.410.835}{\text{Rp } 550.000.000} \times 100\% = 70,26\% \end{aligned}$$

2. Efektivitas Tahun 2022

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Penerimaan Retribusi Pariwisata 2022}}{\text{Target Penerimaan Retribusi Pariwisata 2022}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp } 398.897.773}{\text{Rp } 632.500.000} \times 100\% = 63,1\% \end{aligned}$$

3. Efektivitas Tahun 2023

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Penerimaan Retribusi Pariwisata 2023}}{\text{Target Penerimaan Retribusi Pariwisata 2023}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp } 297.163.328}{\text{Rp } 300.000.000} \times 100\% = 99,05\% \end{aligned}$$

Hasil perhitungan efektivitas penerimaan retribusi pariwisata diatas, dapat diukur menggunakan kriteria efektivitas retribusi pariwisata yang mana kategorinya sebagai berikut:

Table 4. 4 Kriteria Efektivitas Retribusi

No.	Prosentase Efektivitas	Kriteria
1	>100 %	Sangat Efektif
2	100%	Efektif
3	90-99,9%	Cukup Efektif
4	75-89,9%	Kurang Efektif
5	<75%	Tidak Efektif

Sumber: (Sartika, 2022)

Dari Hasil perhitungan efektivitas penerimaan retribusi daerah dapat disimpulkan sebagaimana dibawah ini:

Table 4. 5 Perhitungan Efektivitas

Tahun	Target	Realisasi	Prosentase (%)	Kriteria
2021	Rp 550.000.000	Rp 386.410.835	70,26%	Kurang Efektif
2022	Rp 632.500.000	Rp 398.897.773	63,1%	Tidak Efektif
2023	Rp 300.000.000	Rp 297.163.328	99,05%	Cukup Efektif

Sumber: (Sartika, 2022)

Dari hasil pengukuran yang dapat dilihat dalam tabel, tingkat efektivitas penerimaan retribusi daerah dari tahun 2021 hingga tahun 2023 mengalami naik turun walaupun tidak terlampau jauh. Walaupun bila dilihat dari angka realisasi retribusi pariwisata dari taun ketahun cukup timpang. Pada tahun 2021 diketahui bahwa efektivitas hanya terealisasi sebesar 70,26% atau setara dengan penerimaan sebesar Rp 386.410.835.

Ditahun 2022 realisasi penerimaan retribusi pariwisata kabupaten Cilacap sudah cukup meningkat, namun hal tersebut juga sebanding dengan target capaian yang ditingkatkan pula di tahun tersebut, dan sangat jauh dari harapan, pada tahun 2023 efektivitas penerimaan retribusi pariwisata justru sangat turun hanya diangka Rp 297.163.328, walaupun efektivitas dalam prosentse mencapai 99,05% namun pada tahun tersebut target yang dianggarkan sangat jauh turun, dari yang semula Rp 632.500.000 menjadi Rp 300.000.000.

Berdasarkan hasil wawancara juga disinggung bahwa hasil penerimaan retribusi pariwisata cilacap belum sepenuhnya sesuai akan target yang ditetapkan, ada beberapa faktor yang besar peranya dalam mempengaruhi hal ini, yaitu pengalih kelolaan daya Tarik wisata yang sebelumnya dikelola oleh dinas pariwisata kepada instansi lain, seperti TNI AD, Perhutani dan instansi lain yang membuat retribusi pariwisata alur penerimaannya tidak lagi masuk pada kas daerah.

Adapun strategi utama untuk meningkatkan efektivitas retribusi dapat dicapai dengan beberapa pilihan berikut:

1. Penambahan sumber penerimaan.

Menambah daya tarik wisata baru serta berbagai obyek pendukung dapat meningkatkan daya tarik pariwisata (Novianti, et al., 2017). Kecilnya penerimaan pariwisata bisa diatasi dengan skema peningkatan kuantitas daya tarik wisata, semakin banyak lini penerimaan maka akan berpengaruh juga pada besaran kontribusi atas retribusi pariwisata. Sedangkan skema lain juga bisa dihasilkan dari peningkatan obyek pendukung berupa berbagai fasilitas yang meningkatkan pengalaman wisatawan seperti insrastruktur yang memadai atau fasilitas lain seperti toilet, tempat parkir dan pusat informasi wisata yang dapat meningkatkan kenyamanan pengunjung. Peningkatan daya tarik wisata melalui acara lokal juga turut mempengaruhi kunjungan wisatawan.

2. Optimalisasi Pemasaran

Untuk meningkatkan optimalisasi pemasaran daya tarik wisata dapat memanfaatkan teknologi modern dan media sosial untuk meningkatkan jumlah pengunjung yang berdampak langsung pada pendapatan retribusi (Laba & Aswan, 2017). Pemanfaatan teknologi juga dapat dilakukan dengan cara pembuatan berbagai iklan atau promosi berbasis digital contohnya web atau di berbagai media sosial seperti Instagram, Twitter, dan Tiktok.

Selain penggunaan media sosial sebagai promosi dan pemasaran efektif, untuk mengoptimalkan pemasaran juga dapat dilakukan dengan cara membangun kerjasama dengan agen perjalanan (GABTF, 2024)

3. Peningkatan Kerjasama dalam Pengelolaan

Strategi membangun kemitraan antara pemerintah daerah dan pihak swasta untuk mengelola sumber daya wisata juga bisa menjadi pilihan efektif untuk meningkatkan efektivitas retribusi. Pembuatan klausa perjanjian kerjasama dengan sistem bagi hasil akan meningkatkan besaran pertumbuhan mengingat semakin banyaknya perjanjian kerjasama dengan pihak swasta maka akan makin memperbanyak lini penerimaan retribusi (Novianti, et al., 2017).

4. Merumuskan Peraturan yang Mendukung

Berbagai kebijakan pemerintah yang mendukung perkembangan pariwisata sangat berpengaruh pada peningkatan pertumbuhan retribusi. Regulasi yang menjadi arah gerak pengelolaan sudah seharusnya sejalan dengan upaya peningkatan retribusi, sempitnya arah gerak lembaga akan berpengaruh langsung pada besaran penerimaan (GABTF, 2024). Kerjasama antara pemerintah dan swasta juga penting untuk menciptakan lingkungan kondusif, maka pembenahan regulasi yang memfasilitasi investasi juga perlu senantiasa dievaluasi jika tidak sesuai dengan arah tujuan peningkatan retribusi.

D. Analisis Kontribusi Penerimaan Retribusi Pariwisata Kabupaten Cilacap terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Analisis rasio kontribusi digunakan untuk menggambarkan besaran sumbangsi yang dihasilkan dari lini retribusi pariwisata terhadap pendapatan asli daerah. setelah pengkalkulasian kontribusi retribusi pariwisata

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Pariwisata}}{\text{Total PAD tahun n}} \times 100\%$$

Perhitungan kontribusi penerimaan retribusi pariwisata bertujuan untuk mengetahui prosentase sumbangsi penerimaan sektor retribusi pariwisata kabupaten cilacap terhadap pendapatan asli daerah . Berikut hasil

hitung kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Cilacap periode 2021-2023:

1. Kontribusi 2021

$$\frac{\text{Realisasi Retribusi Pariwisata 2021}}{\text{Total PAD tahun 2021}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Rp } 386.410.835}{\text{Rp } 739.133.833.863,79} \times 100\% = 0,052\%$$

2. Kontribusi 2022

$$\frac{\text{Realisasi Retribusi Pariwisata 2022}}{\text{Total PAD tahun 2022}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Rp } 398.897.773}{\text{Rp } 700.428.762.449,02} \times 100\% = 0,057\%$$

3. Kontribusi 2023

$$\frac{\text{Realisasi Retribusi Pariwisata 2023}}{\text{Total PAD tahun 2023}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Rp } 297.163.328}{\text{Rp } 768.640.705.768,55} \times 100\% = 0,039\%$$

Hasil perhitungan kontribusi penerimaan retribusi pariwisata terhadap pendapatan asli daerah diatas, dapat diukur menggunakan kriteria kontribusi retribusi pariwisata sebagaimana tabel berikut:

Table 4. 6 Kriteria Kontribusi

No.	Prosentase Kontribusi	Kriteria
1	Diatas 50%	Sangat Berhasil
2	30,1-40%	Berhasil
3	20,1-30%	Cukup Berhasil
4	10,1-20%	Kurang Berhasil
5	0-10%	Tidak Berhasil

Sumber: (Sartika, 2022)

Dari Hasil perhitungan efektivitas penerimaan retribusi daerah dapat disimpulkan sebagaimana dibawah ini:

Table 4. 7 Hasil Perhitungan Kontribusi Retribusi Pariwisata

Tahun	Retribusi Pariwisata	PAD	Prosentase (%)	Kriteria
2021	Rp 386.410.835	Rp 739.133.833.863,79	0,052%	Tidak berhasil
2022	Rp 398.897.773	Rp 700.428.762.449,02	0,057%	Tidak berhasil
2023	Rp 297.163.328	Rp 768.640.705.768,55	0,039%	Tidak Berhasil

Sumber: Perhitungan kontribusi

Berdasarkan hasil hitung rasio kontribusi retribusi pariwisata terhadap PAD , dapat disimpulkan bahwa besaran kontribusi retribusi pariwisata terhadap PAD dari tahun ketahun cenderung gagal walaupun pada praktiknya setiap tahun telah disusun skema penurunan target capaian dari tahun sebelumnya. Ketidakberhasilan kontribusi retribusi pariwisata terhadap PAD Kabupaten tidak lepas dari turunnya besaran penerimaan retribusi setiap tahunnya akibat dari pergeseran kepemilikan dan pengelolaan daya Tarik wisata yang ada. Banyaknya wisata baru juga turut mempengaruhi penurunan pendapatan sektor retribusi pariwisata di kabupaten cilacap. Dituturkan oleh narasumber juga hal ini dipengaruhi oleh ketimpangan regulasi yang ada akibat dari perubahan berbagai landasan kerja, sehingga dalam penarikan retribusi kurang maksimal.

Dari wawancara yang dilakukan bersama bapak Agus, beliau menuturkan bahwa pihak Disporapar juga dilemma dalam penarikan retribusi, alasannya berdasarkan Perda nomor 1 tahun 2024 seharusnya penarikan retribusi sudah harus disesuaikan dengan peraturan terbaru, namun pada praktiknya hingga pertengahan tahun 2024 pun masih menggunakan ketentuan penarikan retribusi yang lama.

Meningkatkan kontribusi penerimaan retribusi merupakan langkah penting bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penyerapan PAD. Adapun strategi yang dapat diterapkan diantaranya:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi

Intensifikasi merupakan perbaikan kualitas pelayanan publik dan sistem pemungutan retribusi, penggunaan teknologi dan peningkatan pengawasan (Bake, et al., 2022). Sedangkan ekstensifikasi merupakan penciptaan sumber-sumber penerimaan baru diantaranya memperluas daya tarik wisata, memperbanyak wahana, menciptakan acara yang meningkatkan kunjungan wisata dan menetapkan regulasi baru yang memberikan kepastian hukum mengenai retribusi pariwisata (Bake, et al., 2022).

2. Peningkatan kesadaran masyarakat

Membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar retribusi juga sangat krusial. Ini dapat dilakukan melalui kampanye atau sosialisasi mengenai hak dan kewajiban mereka serta sanksi yang mungkin dihadapi jika tidak mematuhi peraturan.

3. Kerjasama lintas sektor

Membangun kerjasama antara berbagai instansi pemerintah dan sektor swasta untuk mengidentifikasi potensi baru dalam penerimaan retribusi. Ini termasuk kolaborasi dalam pengelolaan sumber daya dan peningkatan layanan publik (Puspitayanti, 2019).

E. Analisis SWOT strategi Disporapar dalam pengambilan keputusan atas upaya peningkatan laju pertumbuhan, efektivitas dan kontribusi

Pada hakikatnya Kabupaten Cilacap merupakan daerah yang potensial untuk sektor penerimaan retribusi, Cilacap yang merupakan wilayah terluas di Jawa tengah dengan keunikan geografisnya pada dasarnya akan sangat menguntungkan jika bisa dikelola dengan baik. Kabupaten Cilacap memiliki garis pantai yang panjang yang mana ini menjadi salah satu daya tarik unggulan di Kabupaten Cilacap. Selain memiliki garis pantai yang panjang, Kabupaten Cilacap juga memiliki berbagai objek wisata unggulan seperti Benteng Pendem, Air Panas Cipari, curug, dan berbagai macam wisata buatan yang keberadaannya masih bisa ditingkatkan.

Selain memiliki objek wisata yang potensial, kabupaten Cilacap juga merupakan daerah yang memiliki geografis yang strategis, hal ini dikarenakan

sebagai jalur lalu lintas alternatif untuk lalu lintas menuju Jawa Barat. Ketersediaan Pelabuhan, bandara dan beberapa stasiun juga menjadi salah satu gambaran bahwa Kabupaten Cilacap sangat strategis karena dapat diakses dari berbagai lini transportasi.

Kabupaten Cilacap memiliki potensi wisata yang sangat melimpah, namun menurut keterangan Bapak Agus dalam wawancara yang penulis lakukan ada beberapa faktor yang menghambat peningkatan prestasi pengelolaan retribusi pariwisata di Kabupaten Cilacap diantaranya:

1. Regulasi yang mengikat arah gerak DISPORAPAR membuat berbagai daya Tarik wisata yang sebelumnya dikelola langsung oleh DISPORAPAR menjadi berpindah pengelolaan, hal ini diatur dalam Perda Kabupaten Cilacap no 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 82. Contohnya sepanjang pantai di kabupaten cilacap yang kepemilikannya milik kementerian keuangan dan sebelumnya dikelola oleh DISPORAPAR, setelah adanya pelimpahan hak guna kepada TNI AD kini tidak bisa lagi menyumbang anggaran pada PAD, namun langsung masuk pada KAS Negara.
2. Belum adanya RIPARDA (Rencana Induk Pariwisata Daerah) dikarenakan rancangan RIPERDA yang dibuat sudah tidak relevan lagi setelah ditetapkannya UU cipta kerja. Tidak dibuatnya RIPARDA baru dikarenakan RIPARNAS baru akan dibuat tahun 2025 yang mana akan tidak efisien jika pada masa sekarang ini disusun RIPARDA baru.
3. Ditetapkannya Perda No 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, membuat gugurnya perjanjian kerjasama (bagi hasil). Karena setelah berlakunya Perda No 1 2024 daya tarik wisata yang memiliki perjanjian kerjasama sudah tidak lagi menjadi objek retribusi, namun beralih menjadi objek pajak. Jadi prosentase bagi hasil yang sebelumnya diakui sebagai retribusi kini sudah tidak lagi diakui sebagai PAD sektor retribusi pariwisata melainkan PAD Pajak hiburan.
4. Pemerintah daerah Kabupaten Cilacap belum sepenuhnya move on dari pendapatan pariwisata yang besar sehingga target yang diberikan pada

DISPORAPAR dari tahun 2019 masih tergolong besar, padahal semenjak tahun 2019 banyak daya tarik wisata yang tata kelolanya sudah beralih ke lembaga pemerintahan lain.

5. Jarak antar daya tarik wisata yang dikelola DISPORAPAR saling berjauhan dengan wisata lain membuat wisatawan cenderung berkunjung hanya ke satu destinasi wisata saja.

Peluang Kabupaten Cilacap untuk meningkatkan pendapatan retribusi pariwisata, peluang tersebut diantaranya DISPORAPAR yang sebelumnya hanya mengelola satu saja daya tarik wisata yang ada di kabupaten Cilacap, kini bertambah menjadi mengelola Pulau Momongan dan wisata bahari Kapal Banawa 70. Dengan tarif retribusi sebagai berikut:

Table 4. 8 Tarif Retribusi Day Tarik Wisata

No	Objek Retribusi	Volume	Tarif (Rp)
1	Air Panas Cipari	Per Orang	10.000
2	Pulau Momongan	Per Orang	6.500
3	Wisata Kapal Banawa 70	Per Orang	50.000

Sumber: Peraturan Daerah No. 1 tahun 2024

Ancaman yang dihadapi dalam pengelolaan daya tarik wisata sehubungan dengan peningkatan pendapatan retribusi pariwisata di kabupaten cilacap adalah banyak bermunculannya banyak wisata baru di wilayah cilacap membuat daya tarik wisata yang dikelola oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Disporapar menjadi lebih sedikit pengunjung akibat dari persebaran pengunjung.

Ancaman lainnya dari pengelolaan wisata dan upaya peningkatan penerimaan retribusi adalah semakin kecilnya pendanaan pemerintah untuk pengelolaan daya tarik wisata di Kabupaten Cilacap, ini diakibatkan oleh semakin kecilnya sumbangsi retribusi pariwisata pada pendapatan asli daerah (Riyadi, 2024)

1. Analisis SWOT strategi pengelolaan pariwisata
 - a. Kekuatan (*strengths*)

- 1) Kabupaten Cilacap memiliki potensi pariwisata yang melimpah dan beragam, mulai dari daya tarik wisata alam, budaya, atau buatan.
 - 2) Kabupaten Cilacap memiliki letak geografis yang strategis dan luas.
 - 3) Pengelolaan media promosi kabupaten cilacap cukup aktif.
- b. Kelemahan (*weaknesses*)
- 1) Kurangnya dukungan pemerintah lewat regulasi tentang penerimaan retribusi termasuk tidak adanya RIPARDA.
 - 2) Jarak daya tarik wisata yang dikelola Disporapar terlalu jauh dengan daya tarik wisata lain.
 - 3) Pemerintah daerah masih menekan agar penerimaan tinggi.
 - 4) Berakhirnya perjanjian kerjasama karena ada regulasi baru.
- c. Peluang (*opportunities*)
- 1) Adanya tambahan daya tarik wisata yang dikelola Disporapar berpotensi meningkatkan sumber pendapatan.
- d. Ancaman (*threats*)
- 1) Munculnya daya tarik wisata baru milik swasta di Kabupaten Cilacap menambah persebaran pengunjung dan memperkecil penerimaan dari daya tarik wisata milik Pemda.
 - 2) Kecilnya dana yang dikeluarkan pemerintah untuk mengelola pariwisata.

Table 4. 9 Matriks SWOT

	<i>Strenghts (S)</i>	<i>Weaknesses (W)</i>
	1) Kabupaten Cilacap memiliki potensi pariwisata yang melimpah dan beragam, mulai dari daya tarik wisata alam, budaya, atau buatan. 2) Kabupaten Cilacap memiliki letak geografis yang strategis dan luas	1) Kurangnya dukungan pemerintah lewat regulasi tentang penerimaan retribusi termasuk tidak adanya RIPARDA 2) Jarak daya tarik wisata yang dikelola Disporapar terlalu jauh dengan daya tarik wisata lain

	3) Pengelolaan media promosi Kabupaten Cilacap cukup aktif.	3) Pemerintah daerah masih menekan agar penerimaan tinggi 4) Berakhirnya perjanjian kerjasama karena ada regulasi baru
<i>Opportunities (O)</i> 1) Adanya tambahan daya tarik wisata yang dikelola Disporapar berpotensi meningkatkan sumber pendapatan	<i>Strategi SO</i> 1) Peningkatan pembangunan daya tarik wisata dan sarana prasarana penunjang pariwisata (S1, S2, O1) 2) Mengoptimalkan promosi daya tarik wisata (S2, S3)	<i>Strategi WO</i> 1. Membangun sistem yang terintegrasi (W1,W2,W3,W4, O1)
<i>Threats (T)</i> 1) Munculnya daya tarik wisata baru milik swasta di Kabupaten Cilacap menambah persebaran pengunjung dan memperkecil penerimaan dari daya tarik wisata milik Pemda. 2) Kecilnya dana yang dikeluarkan pemerintah untuk mengelola pariwisata	<i>Strategi ST</i> 1) Meningkatkan kerjasama dengan lembaga , penyedia jasa atau swasta (S2, S3, T1) 2) Meningkatkan jumlah pengunjung (S3, T1, T2)	<i>Strategi WT</i> 1. Merumuskan peraturan yang mengatur tentang pariwisata, pengelolaan daya tarik wisata dan elemen elemennya (W1, W2, W3, W4, T2)

Sumber: Hasil Identifikasi

Berdasarkan ulasan identifikasi SWOT disimpulkan strategi sebagai bentuk rekomendasi penulis atas pengelolaan pariwisata di Kabupaten Cilacap diantaranya:

Table 4. 10 Rekomendasi Program

No	Strategi	Rekomendasi program
----	----------	---------------------

1	Peningkatan pembangunan daya tarik wisata dan sarana prasarana penunjang pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pembangunan yang ada di daya tarik wisata yang dikelola Disporapar agar dapat meningkatkan kepuasan pengunjung. • Memperbaiki fasilitas sarana prasarana pendukung seperti toilet, tempat ibadah, tempat parkir di daya tarik yang dikelola Disporapar.
2	Mengoptimalkan promosi daya tarik wisata	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan promosi di berbagai media elektronik dan media sosial seperti website, Instagram, Tiktok, Youtube, atau Twiter. • Membuat kegiatan-kegiatan di daya tarik wisata contohnya lomba-lomba atau pagelaran dengan tujuan meningkatkan kunjungan wisatawan sehingga dapat meningkatkan promosi daya tarik wisata.
3	Meningkatkan kerjasama dengan lembaga, penyedia jasa atau swasta	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan perjanjian kerjasama dengan pihak swasta untuk membantu pengelolaan • Membuat kerjasama dengan lembaga penyedia jasa wisata, atau hotel untuk turut mempromosikan wisata daerah Kabupaten Cilacap .
4	Meningkatkan jumlah pengunjung	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kunjungan wisata dengan cara membuat kerjasama dengan konten kreator untuk memperkenalkan wisata.
5	Membangun sistem yang terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun sistem informasi • Membangun sistem penjualan tiket secara konvensional dan daring
6	Merumuskan peraturan yang mengatur tentang pariwisata, pengelolaan daya tarik wisata dan elemen elemennya	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun revisi Perda No 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah • Membuat Riparda atau rencana induk pariwisata daerah

Sumber: Hasil identifikasi

Menurut Mahmudi dalam buku Akuntansi keuangan daerah (Hamin & Pongoliu, 2023) manajemen kinerja yang terintegrasi terdiri atas dua bagian utama yaitu perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja. Dalam Hal ini disporapar melakukan perencanaan kinerja dengan mempertimbangkan aspek laju pertumbuhan retribusi Pariwisata, Efektivitas retribusi pariwisata dan

kontribusinya pada PAD. Adapun strategi perencanaan yang dilakukan dalam 2 tahap antara lain:

1. Perencanaan visi, misi dan tujuan serta strategi
2. Target rencana kinerja yang akan dilakukan Disporapar sebagai bentuk konkret mengatasi ketimpangan yang terjadi berikut:
 - a. Disporapar berupaya untuk selalu memperbaiki pengelolaan daya tarik wisata yang tanah kepemilikannya milik pemerintah daerah, dalam hal ini Air panas Cipari.
 - b. Disporapar melakukan pengawasan lebih ketat terhadap keluar masuknya tiket supaya tidak ada celah retribusi yang dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab.
 - c. Disporapar mengoptimalkan penarikan tiket masuk sesuai ketentuan yang berlaku dalam perda No 1 tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah
 - d. Disporapar menyiapkan skema pembentukan daya Tarik wisata baru yaitu kapal wisata bahari dan pulau momongan untuk dijadikan sektor penambah penerimaan retribusi pariwisata di kabupaten cilacap.
 - e. Disporapar berupaya untuk menambah dan membangun sarana prasarana yang menunjang wisata guna berupaya menarik minat pengunjung untuk Kembali.
 - f. Disporapar berupaya untuk mengadakan event dengan skala besar seperti Surving Competition, Lomba layang-layang, Sedekah laut dan lain sebagainya guna menambah kunjungan wisatawan ke kabupaten Cilacap.
 - g. Disporapar mengoptimalkan penarikan tiket masuk sesuai ketentuan yang berlaku untuk daya Tarik wisata yang memiliki perjanjian kerjasama dengan Dinas dan Disporapar menyiapkan skema pembentukan daya Tarik wisata baru yaitu kapal wisata bahari dan pulau momongan untuk dijadikan sector penambah penerimaan retribusi pariwisata di kabupaten cilacap.

- h. Disporapar berupaya untuk selalu memperbaiki pengelolaan daya Tarik wisata yang tanah kepemilikannya milik pemerintah daerah, dalam hal ini Air panas Cipari.
- i. Disporapar menyiapkan skema baru dalam penarikan pajak hiburan dalam daya Tarik wisata, yang mana mulai januari 2024 akan dikenakan pajak 10 % dari tiket masuk dan tambahan 10% dari tiket wahana yang berada di daya Tarik wisata.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan mengetahui laju pertumbuhan retribusi pariwisata kabupaten Cilacap dari tahun 2021 hingga tahun 2023. Berdasarkan Hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan:

laju pertumbuhan penerimaan retribusi Pariwisata Kabupaten Cilacap dari tahun 2021 hingga tahun 2023 justru mengalami penurunan dilihat dari besaran laju pertumbuhan di tahun 2021 yang masih dalam kategori cukup berhasil justru turun di angka 3,23% di tahun 2022 bahkan mencapai minus hingga Rp Rp 101.734.445 di tahun 2023.

Tingkat efektivitas mengalami naik turun walaupun tidak terlampaui jauh. Walaupun bila dilihat dari angka realisasi retribusi pariwisata dari tahun ketahun cukup timpang. Pada tahun 2021 diketahui bahwa efektivitas hanya terealisasi sebesar 70,26% atau setara dengan penerimaan sebesar Rp 386.410.835. di tahun 2022 realisasi penerimaan retribusi pariwisata kabupaten Cilacap sudah cukup meningkat, namun hal tersebut juga sebanding dengan target capaian yang ditingkatkan pula di tahun tersebut. Dan sangat jauh dari harapan, pada tahun 2023 efektivitas penerimaan retribusi pariwisata justru sangat turun diangka Rp 297.163.328 dari target capaian yang sangat jauh turun dari yang semula Rp 632.500.000 menjadi Rp 300.000.000.

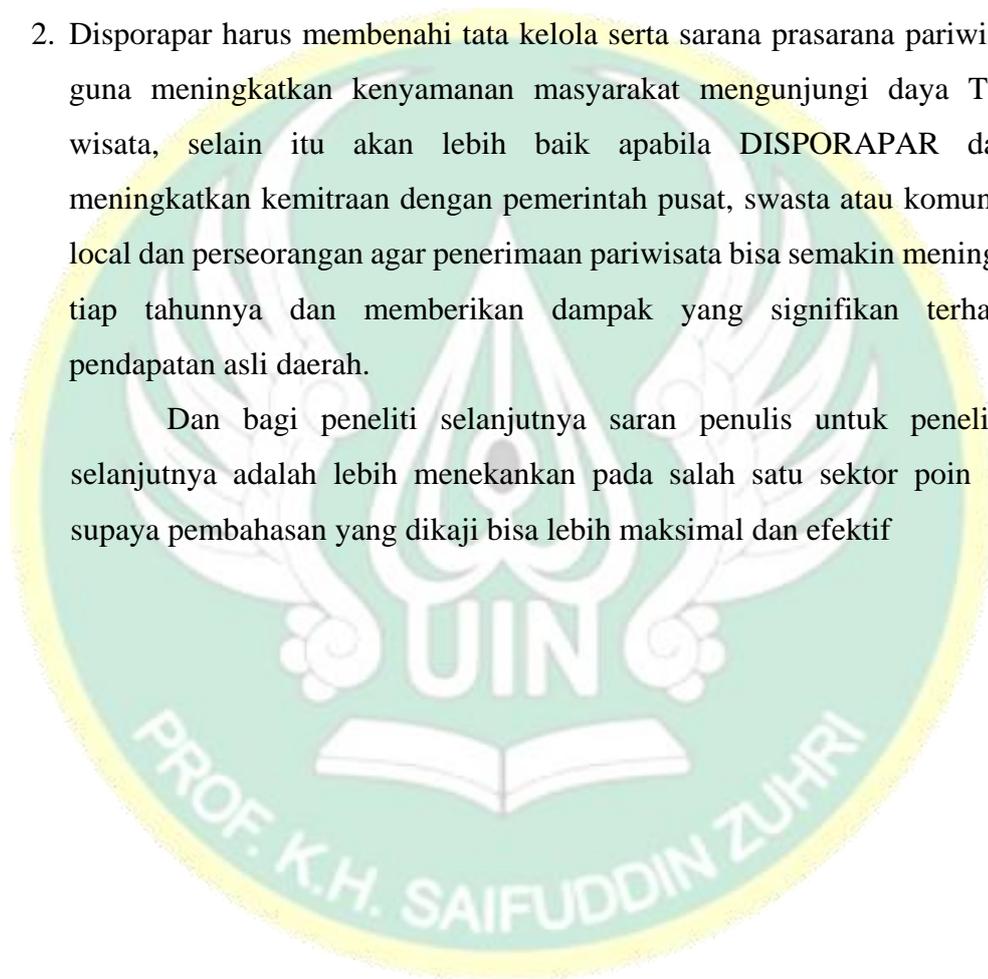
Strategi yang perlu dijadikan program adalah peningkatan kunjungan, promosi, peningkatan kerjasama, membangun sistem yang terintegrasi, dan membangun sarana prasarana dan daya tarik wisata serta merumuskan peraturan yang mendukung pengelolaan wisata.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka sebagai akhir tulisan penulis memberikan saran:

1. Disporapar harus melakukan perencanaan dalam menentukan target penerimaan retribusi pariwisata dengan memperhatikan objek dan subjek retribusi daerah yang potensial agar realisasi penerimaan retribusi daerah mencapai target yang telah ditetapkan.
2. Disporapar harus membenahi tata kelola serta sarana prasarana pariwisata guna meningkatkan kenyamanan masyarakat mengunjungi daya Tarik wisata, selain itu akan lebih baik apabila DISPORAPAR dapat meningkatkan kemitraan dengan pemerintah pusat, swasta atau komunitas local dan perseorangan agar penerimaan pariwisata bisa semakin meningkat tiap tahunnya dan memberikan dampak yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Dan bagi peneliti selanjutnya saran penulis untuk penelitian selanjutnya adalah lebih menekankan pada salah satu sektor poin saja supaya pembahasan yang dikaji bisa lebih maksimal dan efektif



DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, F. A., 2018. Memahami Manajemen Islam Melalui Pendekatan Tafsir Metodologis. *El-Jizya*, 6(2 Juli-Desember).
- Azzahra, H. j., Astuti, W. & Rini, E. F., 2018. Komponen Keterpaduan Objek Wisata Di Kawasan City Walk Slamet Riyadi Ditinjau Dari Sistem Pariwisata. *Region*, 13(1), pp. 20-36.
- Bake, J., Yusuf, M. & Wahbi, A., 2022. Strategi Peningkatan Pendapatan Retribusi daerah di Kota Kendari. *Sinta 4*, Vol 5(4).
- Bawuna, 2016. Analysis of the Efectiveness of the Performance of Local Tax Revenues and Levies Local Revenue District Tagulandang Siau Biaro. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol 16(4).
- BD.2016/No.73, 2016. *Peraturan Gubernur (PERGUB) No 73 Tahun 2016*. [Online]
Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/200377/pegub-prov-jawa-tengah-no-73-tahun-2016>
[Accessed Desember 2024].
- BD.2016/NO.99, 2016. *Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cilacap Nomor 99 Tahun 2016*. [Online]
Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/302256/perbup-kab-cilacap-no-99-tahun-2016>
[Accessed Desember 2024].
- Cilacap, D. p. o. d. p. K., n.d. *Disporapar.go.id*. [Online]
Available at: <https://disporapar.cilacapkab.go.id/visi-misi/>
[Accessed Desember 2024].
- Farida, I., 2023. *Pengelolaan Pariwisata Kabupaten Cilacap* [Interview] (Desember 2023).
- Fred, D., 2010. *Manajemen Strategi*. Jakarta: Salemba Empat.
- GABTF, A., 2024. *Membangun Keberlanjutan dan Daya Tarik*. [Online]
Available at: <https://pelatihanpariwisata.com/faktor-pendukung-majunya-desa-wisata-membangun-keberlanjutan-dan-daya-tarik/>
[Accessed 6 Januari 2025].
- Halim, A., 2014. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., 2014. *Akuntansi Keuangan Daerah*. 4 ed. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. & Kusufi, 2023. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Halim & Tjahjono, 2000. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Yogyakarta: Akademi manajemen perusahaan YKPN.

- Hamin, D. I. & Pongoliu, Y. I., 2023. Analisis Swot Dalam Penentuan Strategi Pengembangan Wisata Pantai Taulaa. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, Vol 6(2).
- Harris, M., n.d. *Analisis SWOT : Tujuan dan Contohnya*. [Online] Available at: https://www.gamedia.com/literasi/analisis-swot-tujuan-dan-contohnya/#google_vignette [Accessed 13 Januari 2025].
- Hasibuan, n. M., Mutthaqin, S. & Harahap, I., 2023. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Perekonomian Nasional. *Jurnal Masharif al-Syariah*, Vol 8(2).
- Hendriyani, I. G. A., 2023. *Menparekraf Paparkan Penyerapan Pagu Anggaran Tahun 2022 di Hadapan Komisi X DPR RI*. [Online] Available at: <https://kemenparekraf.go.id/berita/siaran-pers-menparekraf-paparkan-penyserapan-pagu-anggaran-tahun-2022-di-hadapan-komisi-x-dpr-ri>
- Idtesis, A., n.d. *Teori Lengkap tentang SWOT Analysis menurut Para Ahli dan Contoh Tesis SWOT Analysis*. [Online] Available at: <https://idtesis.com/teori-lengkap-tentang-swot-analysis-menurut-para-ahli-dan-contoh-tesis-swot-analysis/> [Accessed 13 1 2025].
- Ilham, S., Nabila, S. & Supardi, D., 2022. Analisis Kontribusi, Pertumbuhan, Efisiensi dan Efektivitas Retribusi Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kolaka. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, Vol 5(3), pp. 1451-1461.
- Kemenkeu, n.d. [Online] Available at: <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah>
- Laba, A. R. & Aswan, A., 2017. Analisis Strategi Retribusi Daerah Sektor Pariwisata Kabupaten Gowa. *JBMI*, Vol 14 (1).
- LN. 2009/ No. 11, T. N. 4. L. S. :. 4. H., 2009. *Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2009*. [Online] Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38598/uu-no-10-tahun-2009> [Accessed 4 Januari 2025].
- Mahfudh, E. A., 2022. *Analisis Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*. Gowa: Pustaka Almaida.
- Mahfudh, Saleh, H. & Saleh, M. Y., 2022. *Analisis Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*. Gowa: Pustaka Almaida.
- Mikola, A. A., 2020. *Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. Lampung: UIN Raden Intan.

- Novianti, R., Lukman & Faroby, A., 2017. Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Rteribusi Sektor Pariwisata. *Jurnal Nasional Pariwisata*, Vol 9(1).
- Pascallino, J., 2021. Manajemen Pengelolaan Dana Revitalisasi Danau Tondano Oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa. *Jurnal Governance*, 7(2).
- Patiyusuf, M. & Vitrianto, P. N., 2022. Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang dalam Mengelola Wiisata Budaya Pulau Penyengat. *AKSA*, Vol 8(3), pp. 2181-2190.
- Puspitayanti, 2019. *Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Sulawesi Selatan*. Makassar: UMM.
- Quran, A., n.d. *Tafsirweb*. [Online] Available at: <https://tafsirweb.com> [Accessed 13 1 2025].
- Rahmawati & Sutrisno, E., 2020. Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. *Jurnal Pembangunan dan Administrasi Publik*, Vol 2(2).
- Rahmoko, R. D., 2020. *Analisis Retribusi Setor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Studi kasus Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri Tahun 2017-2019*. Surakarta: STIE Swastamandiri.
- Ribka, J., Daisy & Pingkan, I., 2021. Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak Derah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupate Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, Vol 22(2).
- Riyadi, A., 2024. *Pengelolaan Pariwisata Kabupaten Cilacap* [Interview] 2024.
- Riyadi, A. & Herman, F., 2023. Pengaruh Pengembangan Wisata Dan Promosi Terhadap Tingkat Kunjungan Wisatawan Pada Obyek Wisata Air Panas Cipari Kabupaten Cilacap. *Maslahah: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah*, Vol 1(4).
- Rohima, 2020. *Ekonomi Publik*. Palembang: Unsri Press.
- Sakti, n.d. *Perencanaan Pariwisata Pedesaan Berbasis Masyarakat (Sebuah Strategi dan Pendekatan)*. s.l.:s.n.
- Sari, Y., Ridwansyah & Anggraeni, E., 2024. Analisis SWOT Pengembangan Wisata Halal dan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Lampung. *JIMEA*, Vol 8(1).
- Sartika, D., 2022. Analisis kontribusi, Efektivitas dan Pertumbuhan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Tana Toraja. *EconBank*, Volume 4 No 1 April.
- Sasoko, D. M. & Mahrudi, I., 2023. Teknik Analisis SWOT dalam Sebuah Perencanaan Kegiatan. *JPIAN*, Vol 22(1).

- Sedarmayanti, 2014. *Manajemen Strategi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Setyani, N., 2022. *Peran Dinas Pariwisata DIY dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata Berdasarkan Paradigma Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta: STPMD APMD.
- Sholihah, N., 2018. *Strategi Pengelolaan Desa Wisata dan Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Siswanto, 2015. *Pengantar Manajemen*. 11st ed. Jakarta: PT Bumi Angkasa.
- Sochimin, 2019. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pariwisata. *El-Jizya*, Vol 7(2), pp. 255-278.
- Sochimin & Warsito, 2024. Performance of Cultural Tourism: Mediating Role of Perceived Destination Quality. *General Manajemen*, 25(198), p. 344.
- Sojo, 2018. *Manajemen Strategi*. Yogyakarta: UNY Press.
- Sugiyono, 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sutedi, A., 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syifa, T., 2024. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemasaran Obyek Wisata Air Panas Cipari Kabupaten Cilacap*. Semarang: Unissula.
- Taufiqurahman, 2016. *Manajemen Strategik*. Jakarta: FISIP Univ Moestopo Beragama.
- Tri, 2023. Kontribusi Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu. *Jurnal Pengabdian Mandiri*, Vol 2(2).
- Wahyuningsih, 2020. *Ekonomi Publik*. Depok: Rajawali Pers.
- Yatminiwati, M. & Ermawati, E., 2022. Analisis SWOT Dalam Menentukan Strategi Pemasaran Dalam Upaya Meningkatkan Penjualan Produk. *Jurnal Manajemen dan Penelitian Akuntansi (JUMPA)*, Vol 14(2), pp. 84-92.
- Zakiah, 2022. Pengaruh Kinerja Keuangan pemerintah daerah dan pendapatan asli daerah terhadap indeks kemandirian fiskal daerah tahun 2016-2020. *Budget*, Volume 7 Edisi 2.

LAMPIRAN -LAMPIRAN



Lampiran 1. Surat Permohonan Observasi

Surat permohonan observasi awal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
 Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

Nomor : 5029/Un.19/FEBI.J.E.S/PP.009/11/2023 Purwokerto, 20 September 2023
 Lamp. : -
 Hal : **Permohonan Izin Observasi Pendahuluan**

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap
 Di
 Cilacap

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Proposal Skripsi yang berjudul Analisis Peran Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Dalam Upaya Mengelola Wisata Serta mengawasi Pertumbuhan, Kontribusi, dan Efektivitas Retribusi Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Kabupaten Cilacap.

Maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Dena Virmalia Indriyanti
2. NIM : 1917201255
3. Semester / Program Studi : 9 / Ekonomi Syariah
4. Tahun Akademik : 2023 / 2024
5. Alamat : Jl. Ahmad Yani RT 03 RW 08 Desa Adipala
Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap.

Adapun observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek yang diobservasi : Analisis Peran Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata dan Retribusi Pariwisata
2. Tempat/ Lokasi : Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap
3. Waktu Observasi : 21 November s/d 24 November 2023

Demikian permohonan ini kami buat, atas izin dan perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Soord. Prodi Ekonomi Syariah

 H. Sochimmin, Lc., M.Si.
 NIP. 19691009 200312 1 001

Tembusan Yth.
 1. Wakil Dekan I
 2. Kasubbag Akademik
 3. Arsip

Lampiran 2. Surat permohonan melaksanakan penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
 Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

Nomor : 260/Un.19/FEBI.J.ES/PP.009/3/2024 Purwokerto, 8 Maret 2024
 Lamp. : -
 Perihal : **Permohonan Izin Riset Individual**

Kepada Yth.,
 Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Cilacap
 di
 Cilacap

Assalamu'alaikum Wr. wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Proposal Skripsi yang berjudul "Analisis strategi Disporapar dalam mengelola wisata melalui pengawasan pertumbuhan, kontribusi dan efektivitas retribusi pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (studi kasus kabupaten cilacap)", maka kami mohon Bapak/ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa kami :

1. Nama	: Dena Virnalia Indriyanti
2. NIM	: 1917201255
3. Semester/Prodi	: 8 / Ekonomi Syariah
4. Tahun Akademik	: 2023/2024
5. Alamat	: Jl. Jend. A. Yani Rt. 03 Rw. 08 Adipala Kab. Cilacap

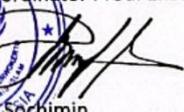
Adapun observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Obyek yang diobservasi	: Retribusi Pariwisata dan Pengelolaan Retribusi Pariwisata atas PAD
2. Tempat/Lokasi	: Kantor DISPORAPAR Kab. Cilacap
3. Waktu Obsevasi	: 18 Maret s.d. 18 April 2024

Demikian permohonan ini kami buat, atas izin dan perkenan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



An Dekan
 Koordinator Prodi Ekonomi Syariah

 Sochim

Lampiran 3. Surat permohonan pengambilan data BPPKAD



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
 Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

Nomor : 260/Un.19/FEBI.J.ES/PP.009/3/2024 Purwokerto, 8 Maret 2024
 Lamp. : -
 Perihal : Permohonan Izin Riset Individual

Kepada Yth.,
 Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD)
 Kab. Cilacap
 di
 Cilacap

Assalamu'alaikum Wr. wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Proposal Skripsi yang berjudul "Analisis strategi Disporapar dalam mengelola wisata melalui pengawasan pertumbuhan, kontribusi dan efektivitas retribusi pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (studi kasus kabupaten cilacap)", maka kami mohon Bapak/ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa kami :

1. Nama	: Dena Virnalia Indriyanti
2. NIM	: 1917201255
3. Semester/Prodi	: 8 / Ekonomi Syariah
4. Tahun Akademik	: 2023/2024
5. Alamat	: Jl. Jend. A. Yani Rt. 03 Rw. 08 Adipala Kab. Cilacap

Adapun observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Obyek yang diobservasi	: Retribusi Pariwisata, PAD, dan Pengelolaan Retribusi Pariwisata atas PAD
2. Tempat/Lokasi	: Kantor BPPKAD Kab. Cilacap
3. Waktu Obsevasi	: 18 Maret s.d. 18 April 2024

Demikian permohonan ini kami buat, atas izin dan perkenan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



An. Bekan
 Koordinator Prodi Ekonomi Syariah

 H. Sochim

Lampiran 4. Surat Balasan Izin Penelitian



PEMERINTAHAN KABUPATEN CILACAP
 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
 Jl. Jenderal Ahmad Yani Nomor 8, Sidakaya, Cilacap Selatan, Cilacap, Jawa Tengah 53212
 Telepon (0282) 534461 Faksimile (0282) 531988
 Laman : www.disporapar.cilacapkab.go.id Pos-el : Disporapar.Kabupatencilacap@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 400.7.22.1/0519/25

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PAIMAN, S.Ag., M.Pd
 NIP : 19690119 199802 1 002
 Pangkat/ gol. Ruang : Pembina Tingkat I
 Jabatan : kepala dinas pariwisata, kepemudaan dan olahraga kabupaten cilacap

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : DENA VIRNALIA INDRIYANTI
 Nim : 1917201255
 Program studi/ jenjang : EKONOMI SYARIAH/S1
 Institusi : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
 PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

Diizinkan melaksanakan tugas penelitian atau pengambilan data dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul " **Analisis Strategi DISPORAPAR Dalam Mengelola Wisata Melalui Pengawasan Pertumbuhan, Efektivitas Dan Kontribusi Retribusi Pariwisata Terhadap PAD (Studi Kasus Kabupaten Cilacap)**

Demikian surat surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana perlunya

Cilacap, 30 April 2024

KEPALA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN
 DAN OLAH RAGA
 KABUPATEN CILACAP



PAIMAN, S. Ag., M.Pd.
 Pangkat Tingkat I
 NIP. 19690119 199802 1 002

Lampiran 5. Bukti Melaksanakan Penelitian



Dokumentasi 1 Kantor Disporapar Kabupaten Cilacap



Dokumentasi 2 Kantor BPPKAD Kabupaten Cilacap



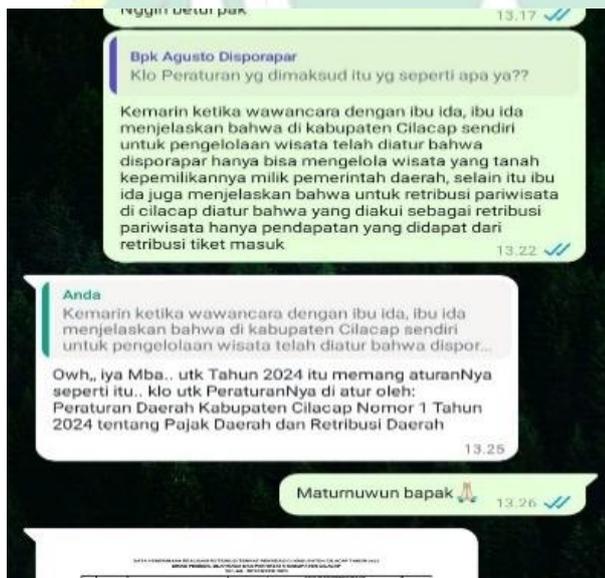
Dokumentasi 3 Wawancara dengan Ibu Ida Farida di kantor Disporapar



Dokumentasi 4 Wawancara dengan Bapak Bayu Di Kantor BPPKAD Cilacap (8 Maret 2024)



Dokumentasi 5 Wawancara dengan Bapak Agus Riyadi di Kantor Disporapar Kabupaten Cilacap (2024)



Dokumentasi 6 Bukti permohonan data secara *online*

Lampiran 6. Pedoman Wawancara

1. Pedoman wawancara
 - a. nama informan:
 - b. Jabatan :
 - c. Daftar pertanyaan:

Apa yang dimaksud dengan disporapar Kabupaten Cilacap?

Daya tarik wisata apa saja yang dikelola oleh Disporapar?

Bagaimana Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten Cilacap?

Apa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan daya tarik wisata di kabupaten Cilacap?

Bagaimana skema pengelolaan untuk peningkatan pendapatan dari sektor Retribusi?

Apa perbedaan DTW yang memiliki perjanjian kerjasama dengan yang tidak memiliki perjanjian kerjasama?

Apa harapannya untuk penarikan retribusi dan pengelolaan DTW kabupaten Cilacap?

Berapa target capain retribusi pariwisata setiap tahunnya?

Bagaimana mekanisme penarikan retribusi?
2. Garis Besar Hasil wawancara dengan Ibu Ida Farida selaku subkoor bidang pengembangan usaha pariwisata.

Peneliti :”apa yang dimaksud dengan disporapar Kabupaten Cilacap?”

Informan : Disporapar sendiri merupakan suatu lembaga pemerintah daerah yang bertanggungjawab atas pengelolaan bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata termasuk pengelolaan ekonomi kreatif yang ada di kabupaten cilacap. Adapun wewenangnya berdasarkan tugas pokok dan fungsi itu meliputi perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaksanaan fungsi kesekretariatan serta fungsi lain yang diberikan bupati.”

Peneliti : “ daya tarik wisata apa saja yang dikelola oleh DISPORAPAR

Informan: “terkait daya tarik wisata yang dikelola Disporapar sampai saat ini hanya satu daya tarik wisata yaitu Air Panas Cipari. Hal ini dikarenakan Disporapar sendiri hanya berhak untuk mengelola daya tarik wisata yang tanah kepemilikannya merupakan milik pemerintah kabupaten saja”

Peneliti : “kalau Disporapar hanya mengelola satu DTW berarti untuk pendapatan retribusi pariwisatanya kecil bu?”

Informan : “ini sebetulnya yang menjadi masalah dari tahun, perlu diketahui kalau di kabupaten cilacap sendiri yang disebut sebagai retribusi pariwisata hanya berasal dari tiket masuk DTW yang tanah kepemilikannya

milik kabupaten atau DTW yang memiliki perjanjian kerjasama dengan Disporapar, jadi memang jika dibandingkan dengan penerimaan retribusi pariwisata kabupaten lain, kabupaten cilacap menempati urutan yang rendah”

Peneliti : “lalu bagaimana pengelolaan DTW di kabupaten cilacap?”

Informan : seperti yang sebelumnya sudah dipaparkan bahwa memang bila nanti mbak liat PAD Retribusi pariwisata kabupaten cilacap kecil, ditambah nanti sejak berlakunya uu no 1 tahun 2024 DTW yang sebelumnya menjadi mitra kerjasama akan lepas dari keterikatan dengan disporapar. Untuk skema barunya nanti perjanjian kerjasama tersebut beralih menjadi pajak hiburan . sebetulnya kecilnya PAD retribusi pariwisata di cilacap juga salah satunya karena kabupaten cilacap sendiri belum masuk pada pilihan destinasi wisata, kabupaten cilacap sendiri masih dikatakan sebagai industri sehingga orang datang ke cilacap sebagian besar untuk melakukan pekerjaan bukan untuk berwisata.

Peneliti: “dari kendala yang dihadapi apa target capaian yang ingin dicapai?”

Informan: “saat ini kami sedang berupaya untuk meningkatkan pendapatan pendapatan yang asalnya dari retribusi, skema yang saat ini dibuat meliputi Pengoprasian kapal wisata bahari bawana nusantara 70 yang ada di dermaga sleko dengan rute sleko-area 70-kel kutawaru dengan durasi 1,5 jam-2 jam. Dan sesuai Raperda pajak daerah dan retribusi daerah mulai 2024 seluruh DTW selain yang dikelola pemerintah akan dikenai pajakhiburan sebanyak 10%”

Peneliti : “apayang dilakukan Disporapar untuk mengawasi pertumbuhan, kontribusi dan efektivitas dari penerimaan retribusi pariwisata terhadap pendapatan asli daerah”

Informan: “tentu kami senantiasa mengusahakan peningkatan pendapatan setiap tahunnya, walaupun pada praktiknya kami hanya bisa mengelola satu wisata namun kami tetap melakukan pengawasan terhadap DTW yang memiliki perjanjian kerjasama, namun itu tadi untuk DTW yang tidak memiliki perjanjian kerjasama Disporapar tidak memiliki wewenang atas pencatatan retribusinya karena tidak lagi menjadi tanggung jawab dari Disporapar”

Peneliti ; “Perbedaan wisata yang memiliki perjanjian kerjasama dan tidak seperti apa?”

Informan: “untuk perbedaan paling jelas tentu lebih diperhatikan oleh dinas baik dari pembinaan SDM, pembinaan manajemen, dan bila ada aset

pemerintah yang ingin dipinjamkan hanya boleh ad DTW yang emiliki perjanjian kerjasama”

3. Garis besar wawancara dengan bapak Agus sebagai perwakilan staf pengembangan daya tarik wisata

Peneliti : “ Bagaimana pengelolaan wisata di kabupaten cilacap?”

Informan : “Untuk pengelolaan wisata di kabupaten cilacap kita hanya mengelola air panas cipari, adapun berbagai DTW seperti contohnya pantai teluk penyu dikembalikan kembali ke pemilik lahan dalam hal ini Primkop Kodim/ primer koprasa kodim Cilacap. Sejak tahun 2017 anggaran daerah tidak bisa lagi digunakan untuk membuat, membangun ditempat selain tanah milik pemda.”

Peneliti : “ hambatan pengelolaan pariwisata ketika masih mengelola DTW yang tanahnya bukan milik pemda?”

Informan : “apabila melihat data yang ada pendapatan retribusi pariwisata kabupaten cilacap sangat kecil, ini juga diakibatkan munculnya banyak DTW baru milik swasta yang menyebabkan penyebaran wisatawan juga meningkat. Apalagi kendala lain yaitu keberadaan air panas cipari yang jauh membuat jarang orang yang tertarik untuk menjadikan air panas cipari sebagai pilihan wisata.”

Peneliti : “ apa harapan bapak untuk pengelolaan DTW di kabupaten cilacap?”

Informan : “ tentu kami ingin mengelola kembali dengan ketentuan, aturan yang benar yang memang untuk pengelolaan DTW seperti pantai telukpenyu sendiri kita Cuma punya dua opsi yaitu sewa pinjam pakai dan sewa. Untuk skema sewa nilainya harus di apresiasi dulu jika nilai asetnya lebih dari limaratus juta, jadi status tanah di teluk penyu merupakan barang milik negara oleh pemerintah keuangan, yang mana tni merupakan hak guna. Jadi untuk PAD nya saat ini langsung masuk pada Kas umum negara. Penyebab berakhirnya perjanjian kerjasama sendiri kaena kita bekerjasama dengan sesama instansi pemerintah (pemerintah daerah dan Kodam IV Diponegoro) dengan klausul bagi hasil yang mana ini melanggar aturan”

Peneliti : “ untuk landasan hukumnya apa saja?”

Informan ; “Perdanya ada yaitu perda no 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pasal 82 Jadi semua tempat wisata yang dimiliki pemerintah daerah, dari dasar hukum itu kita hanya bisa mengelola air panas cipari. Sebetulnya kita bisa kerjasama dengan DTW yang bukan milik

pemda, tapi ketika mendapatkan pendapatan itu tidak bisa dikategorikan sebagai retribusi tapi masuknya pendapatan lain lain”

Peneliti : “Berarti setelah berlakunya perda ini perjanjian kerjasama diakhiri?”

Informan : “secara otomatis gugur dengan sendirinya, yang mana saat ini mereka bukan objek retribusi melainkan objek pajak. Jadi nantinya tempat tempat yang ada dalam kawasan tempat wisata itu yang membayar akan dihitung oleh BPPKAD sebagai objek pajak. “

Peneliti : “jadi untuk yang diakui sebagai retribusi pariwisata hanya berasal dari tiket saja?”

Informan “Iya, jadi retribusi yang berupa tanda pembayaran di tempat wisata masuknya pada retribusi, jadi sekalipun ada wisata yang didalamnya menarik pembayaran lagi contohnya terapi ikan atau waterboom itu masuknya pada retribusi”

Peneliti : “Skema yang akan dilakukan untuk peningkatan Pendapatan retribusi untuk meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi retribusi terhadap PAD ?”

Informan : “untuk skema sendiri berdasar perda no 1 tahun 2024 nanti akan dibangun wisata baru yaitu kapal wisata bahari dan pulau momongan untuk dijadikan sektor penambah penerimaan retribusi pariwisata di kabupaten cilacap. Skema lain kami juga mengupayakan berbagai event berskala besar seperti *surving competition*, lomba layang-layang, sedekah laut dan lain lain. Kami juga mengoptimalkan penarikan tiket masuk sesuai ketentuan yang berlaku.

Lampiran 7. Data Jumlah Kunjungan Wisata

Data kunjungan wisata tahun 2015-2020

DATA JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN DI KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2015 - 2020

NO	NAMA DAYA TARIK WISATA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	KETERANGAN
		8	7	6	5	4		
1	Pantai Teluk Penyu	214.751	203.304	240.666	193.443	11.353	75.591	
2	Benteng Pendem	72.364	84.121	82.031	59.435	3.281	24.213	
3	Pantai Indah Widadarapayung	101.619	103.042	114.171	82.436	5.515	16.447	
4	Air Panas Cipari	8.961	14.178	23.242	24.250	28.400	17.305	
5	Pantai Jetis	28.552	19.741	26.515	19.593	-	-	
6	Pantai Karangpakis	1.630	1.322	1.500	1.500	-	-	
7	Pantai Ketapang Indah	10.294	4.343	1.703	325	-	-	
8	Pantai Lancang Indah	1.911	-	-	-	-	-	
9	Pantai Sidayu	2.260	2.029	1.518	936	-	-	
10	Pantai Sodong	6.064	5.848	43.700	13.000	-	9.898	
11	Pantai Bunton	1.532	1.500	850	900	-	-	
12	Gunung Standell	1.100	1.149	1.400	2.000	1.763	206	
13	Gunung Selok	5.767	61.992	95.273	18.892	8.508	38.307	
14	Goa Masigitsela	-	-	-	-	-	-	
15	Curug Cigeulis	514	589	1.000	-	-	-	
16	Curug Girwangi	6.708	8.642	9.367	6.063	1.618	2.574	
17	Curug Cimendaway	2.639	5.559	5.048	3.445	1.936	2.252	
18	Curug Cigombong	-	-	-	-	-	-	
19	Curug Cisuru	731	-	-	-	-	-	
20	Hutan Payau	-	6.000	16.419	41.198	26.704	10.887	
21	Pantai Menganti	2.228	1.883	1.481	1.015	-	-	
22	Curug Mandala	-	-	-	-	-	-	
23	Waduk Koebangkangoeng	-	-	-	-	-	-	7.167
24	Kemit Forest	-	-	-	-	-	-	71.362
25	Pantai Cemara Sewu Bunton	-	-	-	-	-	-	-
26	Giri Bunton	-	-	-	-	-	-	-
27	Pesona Serayu	-	-	-	-	-	-	11.235
28	Pantai Cemara Sewu Jetis	-	-	-	-	-	-	54.579
29	Pantai Bungso Jetis	-	-	-	-	-	-	38.006

NO	NAMA DAYA TARIK WISATA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	KETERANGAN
		8	7	6	5	4		
1								
30	Pantai Congot Jetis	-	-	-	-	-	-	35.921
31	Kolam Renang Tirta Wungu	-	-	-	-	-	-	2.311
32	Kolam Renang Banyu Pratama	-	-	-	-	-	-	4.760
33	Museum Soesilo Soedjarman	-	-	-	-	-	-	10.815
34	Kolam Renang Taman Sari Rasa	-	-	-	-	-	-	10.731
35	Wisata Kutawaru	-	-	-	-	-	-	22.492
JUMLAH :		469.645	525.222	665.884	468.431	89.078	467.059	

Data kunjungan wisata tahun 2021

DATA KUNJUNGAN WISATAWAN DI DAYA TARIK WISATA KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2021

NO	NAMA DAYA TARIK WISATA	ALAMAT	BULAN												JUMLAH
			JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	Air Panas Cipari	Desa Cipari Kec. Cipari	2.250	1.200	1.520	810	4.050	2.200	-	-	-	2.450	1.285	1.200	16.965
2	Cunug Giriwangi	Desa Cipari Kec. Cipari	102	45	22	31	-	5	-	-	-	-	-	205	
3	Cunug Cimendaway	Desa Datar Kec. Dayeuhluhur	144	77	74	42	188	109	-	-	-	196	46	64	940
4	Gunung Selok	Desa Karangbenda Kec. Adipala	759	773	1.305	1.236	2.204	1.014	-	-	-	769	637	911	9.608
5	Gunung Srandil	Desa Glempegasir Kec. Adipala	-	-	-	-	1.864	-	-	-	-	-	-	266	2.220
6	Waduk Kembangklung	Desa Kubangkung Kec. Kawunganten	172	92	-	-	1.110	115	-	-	-	105	112	115	1.821
7	Kemit Forest Education	Desa Karanggedang Kec. Sidareja	7.758	2.718	4.038	2.904	11.075	3.646	-	-	-	3.800	1.878	4.286	42.103
8	Hutan Payau	Kel. Triih Kulon Kec. Cilacap Utara	857	430	1.004	531	1.847	734	-	-	-	928	538	785	7.652
9	Cunug Penganten	Desa Bengbolang Kec. Karangpujung	287	300	170	25	120	-	-	-	-	-	-	902	
10	Pantai Teluk Penyu	Kel. Cilacap Kec. Cilacap Selatan	12.282	5.765	11.896	12.067	40.457	11.559	-	-	-	10.295	11.673	12.307	128.301
11	Benteng Pendem	Kel. Cilacap Kec. Cilacap Selatan	2.541	1.152	1.671	1.698	4.830	528	-	-	-	1.026	917	1.547	15.910
12	Cunug Mandala	Desa Mandala Kec. Jenuklegi	781	306	247	120	613	79	-	-	-	297	38	124	2.803
13	Pantai Bunton	Desa Bunton Kec. Adipala	712	518	1.870	1.700	3.700	350	-	-	-	257	1.507	3.378	13.992
14	WPK (Wisata Punggir Kali)	Desa Bunton Kec. Adipala	700	1.500	1.347	2.700	5.792	800	-	-	-	367	2.750	6.807	22.753
15	Taman Pesona Serayu	Desa Kesugihan Kulon Kec. Kesugihan	1.800	1.596	2.916	291	4.963	3.258	-	-	-	1.625	2.128	3.237	21.812
16	Pantai Sodong	Desa Karangbenda Kec. Adipala	507	357	3.575	3.750	9.673	500	-	-	-	425	593	712	20.992
17	Pantai Sidayu Indah	Desa Sidayu Kec. Binangun	172	175	205	3.000	1.704	155	-	-	-	279	325	4.725	10.740
18	Pantai Indah Widarapayung	Desa Widarapayung Wetan Kec. Binangun	2.570	1.028	1.245	456	12.113	1.028	-	-	-	2.021	1.850	8.561	30.862
19	Pantai Cemara Sewu Jetis	Desa Jetis Kec. Nusawungu	157	330	1.750	2.400	5.872	1.576	-	-	-	1.372	565	1.076	15.098
20	Pantai Bungo Jetis	Desa Jetis Kec. Nusawungu	8.632	6.945	16.110	12.204	28.932	16.453	-	-	-	20.841	75.336	26.000	211.253
21	Pantai Congot Jetis	Desa Jetis Kec. Nusawungu	5.754	4.630	10.740	8.133	19.288	10.968	-	-	-	13.760	50.224	40.000	193.497
22	KUTAWARU CILACAP	Kel. Kutawaru, Kecamatan Cilacap Tengah	320	250	300	700	764	-	-	-	-	-	-	2.334	
23	PANTAI TEGAL KAMULYAN	Kel. Kemiren, Kec. Cilacap Selatan	275	300	500	750	837	78	-	-	-	221	173	757	3.891

NO	NAMA DAYA TARIK WISATA	ALAMAT	BULAN												JUMLAH
			JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	
24	PANTAI MENGANTI	Desa Menganti, Kec. Kesugihan	172	85	270	570	813	115	-	-	-	157	97	528	2.807
25	PANTAI WAGIR INDAH	Desa Wehahan Wetan, Kec. Adipala	62	19	270	200	373	-	-	-	-	-	-	924	
26	PANTAI LANCANG INDAH	Desa Widarapayung Kulon, Kec. Binangun	302	85	110	150	273	-	-	-	-	27	90	342	1.379
27	PANTAI KETAPANG INDAH	Desa Sidaurip, Kec. Binangun	180	97	307	3.700	673	127	-	-	-	257	189	573	6.003
28	PANTAI SINGKIL INDAH SIDAURIP	Desa Sidaurip, Kec. Binangun	87	170	97	470	587	-	-	-	-	152	101	372	2.036
29	PADEPOKAN JAMBE LIMA SELOK ADIPALA	Desa Karangbenda, Kec. Adipala	25	87	87	800	1.050	97	-	-	-	-	78	342	2.566
30	PADEPOKAN JAMBE PITU SELOK ADIPALA	Desa Karangbenda, Kec. Adipala	32	72	106	-	825	122	-	-	-	110	76	289	1.632
31	WATER PARK TIRTAMAS INDAH	Kel. Sidanegara, Kec. Cilacap Tengah	475	306	375	320	1.391	380	-	-	-	1.345	1.435	1.789	7.816
32	SENTUL WATER PARK	Kel. Sidanegara, Kec. Cilacap Tengah	320	250	400	150	250	200	-	-	-	400	350	1.875	4.195
33	BANARAN WATERBOOM	Desa Gandungmangu, Kec. Gandungmangu	80	120	297	24	320	157	-	-	-	895	764	1.755	4.412
34	KOLAM RENANG KRAMA CENIL MENGANTI	Desa Bojongsari, Kec. Kedungreja	300	275	375	157	873	122	-	-	-	97	115	-	2.314
35	KOLAM RENANG TRITA RENGGANIS SIDAREJA	Desa Jatsari, Kec. Kedungreja	60	80	187	52	567	329	-	-	-	367	468	2.347	4.447
36	KOLAM RENANG TRITASARI BANTARSARI	Desa Bantarsari Kec. Bantarsari	200	100	635	367	585	187	-	-	-	581	670	3.867	7.182
37	KOLAM RENANG WATERPARK KUNCI SIDAREJA	Desa Sidamulya, Kec. Sidareja	300	150	297	373	567	218	-	-	-	200	380	782	3.267
38	KOLAM RENANG BANYU PRATAMA SIDASARI	Desa Sidasari, Kec. Sampang	750	700	850	250	2.750	1.200	-	-	-	2.200	2.100	2.800	13.600
39	MUSEUM SOESILO SOEDARMAN GENTASARI	Desa Gentasari, Kec. Kroya	371	72	851	315	895	-	-	-	-	1.107	867	1.083	5.561
40	KOLAM RENANG SARIRASA	Desa Karangaji, Kec. Sampang	2.830	750	1.250	457	3.979	1.753	-	-	-	1.763	2.700	3.862	19.344
41	KOLAM RENANG TRITA INDAH BOJONG	Desa Datar, Kec. Dayeuhluhur	200	100	635	280	876	329	-	-	-	172	837	875	4.304
42	KOLAM RENANG TRITA WUNGU	Desa Plangjan, Kec. Kesugihan	80	75	320	120	360	180	-	-	-	895	764	2.872	5.666
TOTAL :			56.358	34.080	70.224	64.303	179.993	60.669	-	-	-	71.539	164.652	143.191	845.009

Data Kunjungan wisata 2022

DATA KUNJUNGAN WISATAWAN DI DAYA TARIK WISATA KABUPATEN CLACAP
TAHUN 2022

NO	NAMA DAYA TARIK WISATA	ALAMAT	BULAN												JUMLAH
			JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	AIR PANAS CIPARI	Desa Cipari, Kec. Cipari	3.817	2.802	2.597	424	8.794	4.292	2.790	444	802	884	638	3.468	33.053
2	CURUG CIMENDAWAY	Desa Datar, Kec. Doyesuhukur	177	19	18	36	207	66	42	38	37	21	83	-	744
3	GUNJUNG SELOK	Desa Karangbenda, Kec. Adipala	1.075	901	725	411	2.449	695	752	786	525	606	408	833	10.166
4	GUNJUNG SRANDIL	Desa Giempangasir, Kec. Adipala	-	-	-	-	1.112	-	-	-	-	-	-	-	1.112
5	WADUK KOBRANGKANGKOENG	Desa Kubangkung, Kec. Kawanganten	301	88	75	45	748	184	-	-	-	-	-	-	1.441
6	KEMIT FOREST EDUCATION	Desa Karanggedang, Kec. Sidareja	5.435	1.856	1.937	693	8.136	2.957	2.047	1.306	3.760	1.243	1.237	2.875	33.512
7	HUTAN PAYAU	Kel. Triih Kulon, Kec. Clacap Utara	975	400	404	106	1.192	330	320	165	242	230	202	446	5.012
8	KOLAM RENANG TIRTA INDAH BOJONG	Desa Bojong, Kec. Gandrungmangu	320	123	120	-	1.320	1.200	473	23	273	320	273	1.300	5.745
9	TELUK PENYU CLACAP	Sentotokawat, Kec. Clacap Selatan	13.322	12.683	11.711	3.221	39.785	8.612	8.090	6.081	5.896	5.702	5.714	8.899	129.696
10	BENTENG PENDEM CLACAP	Sentotokawat, Kec. Clacap Selatan	1.947	1.023	3.096	595	7.265	2.415	2.166	1.346	1.153	1.323	1.228	2.077	25.632
11	CURUG MANDALA JERUKLEGI	Desa Mandala, Kec. Jeruklegi	153	54	99	18	676	64	97	76	141	104	192	198	1.872
12	CEMARA SEWU BUNTON ADIPALA	Desa Bunton, Kec. Adipala	2.970	2.350	1.573	970	9.567	3.762	2.376	1.136	1.956	1.523	1.347	2.571	32.101
13	WPK (WARUNG PINGGIR KALI) BUNTON	Desa Bunton, Kec. Adipala	3.427	3.567	2.705	1.230	12.573	4.273	3.573	1.796	3.327	2.523	1.897	4.572	45.523
14	PESONA SERAYU KESUGIHAN	Desa Kesugihan Kidul, Kec. Kesugihan	3.346	1.737	2.138	1.800	3.867	1.782	2.098	3.210	1.037	673	582	1.361	23.640
15	PANTAI SODONG	Desa Karangbenda, Kec. Adipala	732	521	625	203	21.973	4.353	512	452	320	1.676	1.273	1.786	34.326
16	PANTAI SIDAYU INDAH	Desa Sidayu, Kec. Binangun	1.300	1.157	1.235	370	3.897	2.715	1.373	926	425	372	673	2.732	17.175
17	PANTAI INDAH WIDARAPAYUNG	Desa Widarapayung Wetan, Kec. Binangun	2.222	832	678	820	15.714	2.015	1.444	722	810	831	911	3.448	30.548
18	PANTAI CEMARA SEWU	Desa Jetis, Kec. Nusawungu	1.750	1.650	750	915	9.476	2.373	2.153	976	3.867	2.975	5.001	34.663	
19	PANTAI BUNGSO	Desa Jetis, Kec. Nusawungu	2.075	15.281	9.000	18.000	41.431	18.272	16.752	8.185	10.243	9.996	7.300	12.551	168.486
20	PANTAI CONGOT	Desa Jetis, Kec. Nusawungu	1.382	10.167	26.000	26.100	80.550	27.408	25.129	12.275	15.365	14.094	18.600	26.984	284.074
21	KOLAM RENANG TIRTA WUNGU	Desa Plerjan, Kec. Kesugihan	360	151	121	-	752	605	97	15	87	72	257	2.147	4.664
22	KOLAM RENANG BANYU PRATAMA SIDASARI	Desa Sidasari, Kec. Sampang	2.400	1.900	1.980	-	5.150	1.836	1.056	875	875	1.270	1.055	1.922	20.319
23	KOLAM RENANG SOESILO SOEDARMAN GENTASARI	Desa Gentasari, Kec. Kroya	1.915	1.087	1.450	-	2.854	2.072	1.167	518	1.085	1.095	1.818	1.856	16.817

NO	NAMA DAYA TARIK WISATA	ALAMAT	BULAN												JUMLAH
			JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	
24	KOLAM RENANG SARIRASA	Desa Karangaji, Kec. Sampang	2.350	1.835	949	-	4.887	2.200	1.204	789	1.501	1.213	1.675	5.535	24.038
25	PANTAI TEGAL KAMULYAN	Kel. Kemiren, Kec. Clacap Selatan	400	180	200	73	1.087	400	350	215	323	200	-	574	4.002
26	PANTAI MENGANTI	Desa Menganti, Kec. Kesugihan	729	217	392	-	1.372	70	13	-	127	-	102	302	3.324
27	PANTAI LANCANG INDAH	Desa Widarapayung Kulon, Kec. Binangun	55	32	72	-	1.750	67	39	27	126	87	192	721	3.168
28	PANTAI KETAPANG INDAH	Desa Sidaurip, Kec. Binangun	371	367	572	275	3.752	725	513	67	287	178	98	2.752	9.957
29	PANTAI SINGKIL INDAH SIDAURIP	Desa Sidaurip, Kec. Binangun	-	19	71	750	1.570	78	97	-	156	96	53	862	3.752
30	SENTUL WATER PARK	Kel. Sidareja, Kec. Clacap Tengah	500	400	350	-	473	357	400	200	350	367	300	2.078	5.762
31	WATER PARK TIRTAMAS INDAH	Kel. Sidareja, Kec. Clacap Tengah	1.601	1.291	1.276	654	2.860	1.727	1.615	1.154	1.383	1.361	1.291	2.494	18.727
32	BANARAN WATERBOOM	Desa Gandungmangu, Kec. Gandungmangu	1.426	1.213	-	-	1.781	1.973	320	17	-	74	168	1.273	8.245
33	KOLAM RENANG TIRTA RENGGANIS SIDAREJA	Desa Jatiasari, Kec. Kedungreja	670	600	800	600	1.500	653	152	97	73	95	105	1.717	7.062
34	KOLAM RENANG TIRTA SARI BANTARSARI	Desa Bantarsari, Kec. Bantarsari	776	567	-	-	1.720	1.516	247	-	124	87	287	1.850	7.174
35	KOLAM RENANG WATER PARK KUNCI SIDAREJA	Desa Sidamulya, Kec. Sidareja	350	200	200	-	783	475	257	-	250	174	272	367	3.328
36	JAMBE LIMA SELOK ADIPALA	Desa Karangbenda, Kec. Adipala	97	52	152	47	879	96	105	42	96	52	79	187	1.884
37	JAMBE PITU SELOK ADIPALA	Desa Karangbenda, Kec. Adipala	85	42	125	25	1.015	83	115	62	76	43	87	127	1.875
38	SUNAN KALI JOGO (SUKA) KAHURIPAN KIDUL	Desa Kuripan Kidul, Kec. Kesugihan	-	-	-	-	157	264	257	-	251	217	253	257	1.656
39	TAMAN PESONA RENGGANIS	Desa Jatiasari, Kec. Kedungreja	-	-	-	70	892	1.004	157	63	55	160	168	1.027	3.596
40	TAMAN TWIS SIDAREJA JL. KUNCI	Desa Sidamulya, Kec. Sidareja	-	-	-	-	973	397	47	6	-	10	-	-	1.433
TOTAL			60.811	67.384	74.256	58.451	307.919	104.366	80.395	44.119	57.404	51.249	53.691	109.249	1.069.294

Data Kunjungan wisata 2023

DATA KUNJUNGAN WISATAWAN DI DAYA TARIK WISATA KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2023

NO	NAMA DAYA TARIK WISATA	ALAMAT	BULAN												JUMLAH
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOP	DES	
1	AIR PANAS CIPARI	Desa Cipari Kec. Cipari	4.235	1.269	1.167	3.339	3.160	1.956	2.249	622	850	773	533	2.122	22.275
2	KEMIT FOREST EDUCATION	Desa Karanggedang Kec. Sidareja	3.474	1.058	861	4.183	2.023	1.227	1.448	826	879	806	606	1.214	18.605
3	HUTAN PAYAU	Kel. Triluh Kulon Kec. Cilacap Utara	922	496	407	774	486	606	501	253	324	335	398	624	6.116
4	GUNUNG SELOK	Desa Karangbenda Kec. Adipala	608	614	965	974	573	473	585	441	414	525	370	556	7.098
5	CURUG CIMANDAWAY	Desa Datar Kec. Dayeuhluhur	122	67	100	40	28	35	59	24	30	34	22	96	657
6	GUNUNG SRANDIL	Desa Glempanpasir Kec. Adipala	-	-	-	978	-	-	-	-	-	-	-	978	
7	CURUG MANDALA	Desa Mandala Kec. Jeruklegi	280	75	82	147	-	47	15	-	9	7	-	6	668
8	PADEPOKAN JAMBE LIMA	Desa Karangbenda Kec. Adipala	96	96	72	127	76	56	12	53	72	16	-	127	763
9	PADEPOKAN JAMBE PITU	Desa Karangbenda Kec. Adipala	127	62	43	85	102	42	62	87	105	82	15	123	935
10	PANTAI SODONG	Desa Karangbenda Kec. Adipala	231	-	702	9.337	1.973	974	372	2.017	809	950	783	1.100	19.248
11	PANTAI CEMARA SEWU BUNTON	Desa Bunton Kec. Adipala	973	851	1.852	5.357	1.765	2.573	1.783	973	2.756	1.762	976	16.127	37.748
12	WPK (WARUNG PINGGIR KALI)	Desa Bunton Kec. Adipala	1.573	1.252	2.716	6.758	2.582	3.864	2.372	1.372	3.476	2.827	1.237	5.327	35.356
13	PANTAI INDAH WIDARAPAYUNG	Desa Widarapayung Wetan Kec. Binangun	255	1.282	988	30.615	5.202	2.669	5.801	2.902	3.010	2.173	2.112	9.317	66.326
14	PANTAI KETAPANG INDAH	Desa Sidaurip Kec. Binangun	485	234	127	300	673	967	1.872	1.372	1.263	973	187	737	9.190
15	PANTAI SIDAYU INDAH	Desa Sidayu Kec. Binangun	92	52	97	3.183	3.183	247	783	537	792	1.271	259	1.725	12.221
16	PANTAI LANGANG INDAH	Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun	96	72	-	2.073	537	276	178	376	262	176	92	729	4.867
17	PANTAI TELUK PENYU	Kel. Cilacap Kec. Cilacap Selatan	9.242	6.545	6.296	27.250	7.075	6.743	10.169	5.539	7.935	7.810	6.595	13.498	114.697
18	BENTENG PENDEM	Kel. Cilacap Kec. Cilacap Selatan	1.848	1.320	1.622	4.200	2.246	2.275	1.880	941	1.510	1.361	1.399	2.807	23.409
19	PANTAI KAMULYAN	Kel. Tegal Kamulyan Kec. Cilacap Selatan	172	156	196	2.853	235	179	357	253	387	278	158	407	5.631
20	SENTUL WATERPARK & HALL CILACAP	Kel. Sidanegara Kec. Cilacap Tengah	350	300	213	100	300	250	350	217	300	250	257	525	3.412
21	TIRTAMAS INDAH WATERPARK	Kel. Sidanegara Kec. Cilacap Tengah	1.763	1.466	1.328	3.189	1.965	1.313	1.325	736	1.383	1.480	1.659	2.578	20.185
22	CIGIMBAL PARK	Kel. Triluh Kulon Kec. Cilacap Utara	750	373	973	1.527	750	827	793	569	793	892	792	893	10.042
23	TAMAN WISATA DINOSAURUS	Desa Muktisari Kec. Gandrungmangu	920	247	210	732	237	375	275	265	-	-	-	-	3.261
24	HAVANA HILLS	Desa Jeruklegi Kulon Kec. Jeruklegi	51.160	23.005	19.285	43.886	39.437	29.832	31.578	10.923	15.889	13.256	10.075	23.299	311.625

NO	NAMA DAYA TARIK WISATA	ALAMAT	BULAN												JUMLAH
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOP	DES	
25	TAMAN PESONA RENGGANIS	Desa Jatisari Kec. Kedungreja	387	137	-	251	172	257	280	185	283	832	527	140	3.451
26	PANTAI MENGANTI	Desa Menganti Kec. Kesugihan	176	97	82	1.235	320	97	259	123	360	123	129	278	3.279
27	WISATA & KULINER SUKA KAHURIPAN	Desa Kuripan Kidul Kec. Kesugihan	159	7	15	123	97	17	37	13	-	-	-	-	468
28	MUSEUM SOESILO SOEDARMAN	Desa Gentasari Kec. Kroya	3.023	1.492	1.921	2.219	2.620	1.729	1.855	584	1.212	1.904	1.382	3.020	22.961
29	SENA PARK KROYA	Desa Kroya Kec. Kroya	1.495	3.221	2.473	4.785	2.757	1.942	1.207	1.084	1.371	1.508	1.279	2.579	25.701
30	PANTAI CEMARA SEWU JETIS	Desa Jetis Kec. Nusawungu	1.573	1.157	1.525	30.676	1.508	4.236	5.927	6.633	8.736	12.636	10.966	30.341	115.914
31	PANTAI BUNGO JETIS	Desa Jetis Kec. Nusawungu	12.240	9.040	10.031	34.085	21.648	14.056	16.072	8.393	11.935	11.633	9.837	17.473	176.443
32	PANTAI CONGOT JETIS	Desa Jetis Kec. Nusawungu	18.360	13.560	15.047	51.127	32.472	21.084	24.107	12.589	17.902	17.500	14.756	41.269	279.773
33	PANTAI SINGKIL INDAH / KARANGPAKIS	Desa Karangpakis Kec. Nusawungu	172	153	123	726	172	96	1.320	526	627	521	128	1.237	5.801
34	TAMAN SARI RASA WATERPARK	Desa Karanglati Kec. Sampang	3.250	1.525	2.005	7.282	1.908	2.773	2.013	400	5.700	6.372	5.327	3.258	41.813
35	TWIS SIDAREJA	Desa Sidamulya Kec. Sidareja	273	112	97	68	-	-	-	-	-	-	-	-	550
36	KOLAM RENANG TIRTA CERIA	Desa Rawajaya Kec. Bantarsari	217	273	158	487	100	121	-	17	127	362	286	467	2.615
37	KOLAM RENANG TIRTA RENGGANIS	Desa Jatisari Kec. Kedungreja	597	153	-	281	120	147	600	387	473	420	247	500	3.925
38	KOLAM RENANG TIRTA INDAH BOJONG	Desa Bojongsari Kec. Kedungreja	287	263	182	582	322	-	-	-	-	323	317	526	2.802
39	KOLAM RENANG TIRTA WUNGU	Desa Plerjan Kec. Kesugihan	227	157	142	1.457	457	420	57	27	157	750	473	1.017	5.341
40	KOLAM RENANG BANYU PRATAMA	Desa Sidasari Kec. Sampang	2.250	1.156	956	5.441	1.651	1.729	1.866	1.218	1.535	1.485	1.298	2.578	23.163
41	KOLAM RENANG / WATER PARK KUNCI SIDAREJA	Desa Sidamulya Kec. Sidareja	100	62	70	100	121	200	180	50	72	-	-	-	955
TOTAL			124.560	73.407	75.129	292.932	141.053	106.710	120.599	63.547	93.728	94.406	75.477	188.720	1.450.268

Cilacap, 31 Desember 2023

KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN CILACAP

PAIMAN S.Ah., M.Pd.
Pembina Tingkat I
N.P. 19690119 1998002 1 002

Lampiran 8. Pendapatan retribusi pariwisata

Retribusi pariwisata tahun 2015-2020

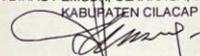
**DATA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SEKTOR PARIWISATA
DI KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2015 - 2021**

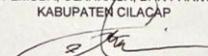
NO	TAHUN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KETERANGAN
		TARGET	REALISASI	PROSENTASE (%) REALISASI PAD	
1	2	3	4	5	6
1	2015	2.200.000.000	2.115.732.655	96,17	
2	2016	2.100.000.000	2.206.724.295	105,08	
3	2017	2.500.000.000	2.554.048.805	102,16	
4	2018	2.750.000.000	2.750.648.470	100,02	
5	2019	336.362.500	422.856.992	125,71	
6	2020	353.154.375	228.745.922	64,77	

Retribusi pariwisata tahun 2021

**REALISASI RETRIBUSI TEMPAT REKREASI 2021
DINAS PEMUDA, OLARAGA, DAN PARIWISATA KABUPATEN CILACAP
BULAN DESEMBER 2021**

NAMA OBYEK WISATA	TARGET	REALISASI PENERIMAAN			SISA	%
		S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
3	4	5	6	7	8	9
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga						
Air Panas Cipari	414.000.000	104.294.000	20.874.000	125.168.000	288.832.000	30,23
Srandil	5.000.000	3.585.350	450.000	4.035.350	964.650	80,71
Gunung Selok	55.000.000	14.494.840	2.663.376	17.158.216	37.841.784	31,20
Curug Geulis	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-
Curug Giriwangi	2.500.000	340.500	-	340.500	2.159.500	13,62
Curug Cimendaway	5.000.000	1.445.400	105.600	1.551.000	3.449.000	31,02
Hutan Payau	52.500.000	11.249.754	1.269.345	12.519.099	39.980.901	23,85
Kubangkangkung	15.000.000	2.383.000	434.000	2.817.000	12.183.000	18,78
JUMLAH TOTAL	550.000.000	137.792.844	25.796.321	163.569.165	386.410.835	29,74

Pengguna Anggaran
DINAS PEMUDA, OLARAGA, DAN PARIWISATA
KABUPATEN CILACAP

Drs. TRI KOMARA SIDHY WIJAYANTO, M.M.
NIP. 19620426 198711 1 001

Bendahara Penerimaan
DINAS PEMUDA, OLARAGA, DAN PARIWISATA
KABUPATEN CILACAP

BUDI HARTOYO
19650511 198703 1 006

Retribusi pariwisata 2022

REALISASI RETRIBUSI TEMPAT REKREASI 2022
DINAS PEMUDA, OLARAGA, DAN PARIWISATA KABUPATEN CILACAP
BULAN : DESEMBER 2022

NAMA OBYEK WISATA	TARGET	REALISASI PENERIMAAN			SISA	%
		S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
2	3	4	5	6	7	8
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga						
1 Air Panas Cipari	495.000.000	307.846.500	32.625.500	340.472.000	154.528.000	68,78
2 Srandil	5.500.000	3.166.500	286.500	3.453.000	2.047.000	62,78
3 Gunung Selok	27.500.000	20.432.001	1.435.848	21.867.849	5.632.151	79,52
4 KEMIT FOREST	33.000.000	18.637.720	1.300.880	19.938.600	13.061.400	60,42
5 WISATA BAHARI	22.000.000	-	-	-	-	-
6 Curug Cimendaway	5.500.000	1.450.800	120.900	1.571.700	3.928.300	28,58
7 Hutan Payau	16.500.000	8.651.518	852.306	9.503.824	6.996.176	57,60
8 Kubangkangkung	27.500.000	1.720.800	370.000	2.090.800	25.409.200	7,60
JUMLAH TOTAL	632.500.000	361.905.839	36.991.934	398.897.773	211.602.227	63,07

Mengetahui
Pengguna Anggaran
ALA DINAS PEMUDA, OLARAGA, DAN PARIWISATA
KABUPATEN CILACAP

PAIMAN S.Ag., M.Pd.
NIP. 19690119 199802 1 002

Bendahara Penerimaan
DINAS PEMUDA, OLARAGA, DAN PARIWISATA
KABUPATEN CILACAP

BUDI HARTOYO
19650511 198703 1 006

Retribusi pariwisata 2023

DATA PENERIMAAN REALISASI RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DI KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023
DINAS PEMUDA, OLARAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN CILACAP
BULAN : DESEMBER 2023

NO.	REKENING	URAIAN	TARGET	REALISASI PENERIMAAN			%
				S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4120210	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga					
		1 Air Panas Cipari	283.000.000	228.940.500	28.067.500	257.008.000	90,82
		2 Srandil	1.000.000	1.467.000		1.467.000	146,70
		3 Gunung Selok	5.000.000	10.809.022		10.809.022	216,18
		4 Kemit Forest	3.000.000	9.967.280	679.680	10.646.960	354,90
		5 Curug Cimendaway	1.000.000	1.182.950	187.200	1.370.150	137,02
		6 Hutan Payau	5.000.000	11.712.372	1.192.464	12.904.836	258,10
		7 Pulau Momongan	1.000.000	618.000		618.000	61,80
		8 Taman Dinosaurius	1.000.000	2.339.360		2.339.360	233,94
		JUMLAH TOTAL	300.000.000	267.036.484	30.126.844	297.163.328	99,05

Cilacap, 31 Desember 2023

KEPALA DINAS PEMUDA, OLARAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN CILACAP

PAIMAN S.Ag., M.Pd.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690119 199802 1 002

LKj IP Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2023
Tabel 3.22 Perbandingan Capaian Realisasi PAD Sektor Pariwisata di Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten Purbalingga tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kabupaten Cilacap	Kabupaten Purbalingga
			Realisasi 2023	Realisasi 2023
1	PAD Sektor Pariwisata	Rupiah	297.263.328	33.397.577.888

Capaian Realisasi PAD Sektor Pariwisata di Kabupaten Cilacap tergolong masih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Purbalingga karena jumlah obyek wisata yang dikelola Pemerintah Kabupaten Cilacap hanya 1 yaitu Air Panas Cipari sehingga mempengaruhi pendapatan.

Cilacap, Januari 2024

PIR. KEPALA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN
 DAN OLAHRAGA
 KABUPATEN CILACAP


PAIMAN, S. Ag., M.Pd.
 Kepala Tingkat I
 NIP. 19690119 199802 1 002

Lampiran 9. Laporan Realisasi Anggaran PAD Kabupaten Cilacap

LRA 2019


PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 Desember s.d. 31 Desember 2019

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBI
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4	PENDAPATAN	3.316.776.235.118,00	2.946.968.449.469,35	283.469.115.958,07	3.230.437.565.427,42	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	553.906.636.361,00	531.135.083.290,35	42.949.799.677,07	574.084.882.967,42	
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	193.950.000.000,00	197.893.197.611,00	11.582.651.285,00	209.475.848.896,00	
4.1.1.01	Pajak Hotel	5.750.000.000,00	6.299.572.775,00	577.230.645,00	6.876.803.420,00	
4.1.1.01.04	Hotel Bintang Tiga	1.650.306.000,00	2.419.709.921,00	221.969.746,00	2.641.679.667,00	
4.1.1.01.05	Hotel Bintang Dua	3.265.391.000,00	3.099.398.402,00	293.303.092,00	3.392.701.494,00	
4.1.1.01.06	Hotel Bintang Satu	220.797.000,00	285.278.502,00	16.094.007,00	301.372.509,00	
4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	470.892.000,00	394.573.450,00	34.211.300,00	428.784.750,00	
4.1.1.01.12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hotel/Rumah Kos	142.614.000,00	100.612.500,00	11.652.500,00	112.265.000,00	
4.1.1.02	Pajak Restoran	3.500.000.000,00	3.663.051.223,00	400.257.857,00	4.063.309.080,00	
4.1.1.02.01	Restoran	1.455.000.000,00	1.441.812.233,00	184.167.480,00	1.625.979.713,00	
4.1.1.02.02	Rumah Makan	759.000.000,00	851.367.840,00	106.298.896,00	957.666.736,00	
4.1.1.02.03	Kafetaria	295.000.000,00	553.857.677,00	70.896.481,00	624.754.158,00	
4.1.1.02.04	Kantin	0,00	3.853.500,00	457.000,00	4.310.500,00	
4.1.1.02.05	Katering	485.500.000,00	462.104.384,00	450.000,00	462.554.384,00	
4.1.1.02.06	Warung	505.500.000,00	350.055.589,00	37.988.000,00	388.043.589,00	
4.1.1.03	Pajak Hiburan	3.200.000.000,00	3.250.687.182,00	114.042.250,00	3.364.729.432,00	
4.1.1.03.01	Tontonan Film/Bookop	355.000.000,00	0,00	25.899.000,00	480.184.500,00	
4.1.1.03.02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	1.500.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	
4.1.1.03.07	Karaoke	403.000.000,00	404.932.795,00	38.156.000,00	443.088.795,00	
4.1.1.03.09	Sirkus/Akrobat/Sulap	7.500.000,00	1.150.050,00	0,00	1.150.050,00	
4.1.1.03.10	Permainan Bilyar	5.092.000,00	14.146.300,00	3.465.000,00	17.611.300,00	
4.1.1.03.15	Permainan Ketangkasan	120.933.000,00	143.881.770,00	25.834.950,00	169.716.720,00	
4.1.1.03.16	Panti Pijat/Refleksi	9.900.000,00	5.777.905,00	570.500,00	6.348.405,00	
4.1.1.03.17	Mandi Uap/Spa	100.225.000,00	91.390.922,00	9.222.500,00	100.613.422,00	
4.1.1.03.19	Pertandingan Olahraga	196.850.000,00	155.311.940,00	10.894.300,00	166.206.240,00	
4.1.1.04	Pajak Reklame	1.800.000.000,00	1.780.203.330,00	140.464.946,00	1.920.668.276,00	
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Negatron	1.510.405.000,00	1.446.615.588,00	127.934.430,00	1.574.549.998,00	
4.1.1.04.02	Reklame Kam	181.248.000,00	173.445.950,00	9.400.500,00	182.896.450,00	
4.1.1.04.03	Reklame Melakat/Silker	15.104.000,00	41.281.000,00	0,00	41.281.000,00	
4.1.1.04.04	Reklame Selebaran	1.009.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00	
4.1.1.04.05	Reklame Berjalan	5.638.000,00	6.864.000,00	0,00	6.864.000,00	

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PPRD - By Simdi

LRA 2020


PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 Desember s.d. 31 Desember 2020

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN MURNI/PERGESERAN/PERUBAHAN	REALISASI			LEBI
				s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4	PENDAPATAN	3.183.974.378.680,00		2.853.844.322.834,48	298.558.132.878,00	3.152.402.455.712,48	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	561.113.709.065,00		545.407.345.695,48	45.936.441.465,00	591.343.787.160,48	
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	199.810.000.000,00		191.473.345.305,00	11.715.217.966,00	203.188.563.271,00	
4.1.1.01	Pajak Hotel	3.000.000.000,00		2.914.679.659,00	543.074.930,00	3.457.754.589,00	
4.1.1.01.04	Hotel Bintang Tiga	880.970.000,00		803.952.199,00	346.333.354,00	1.150.285.553,00	
4.1.1.01.05	Hotel Bintang Dua	1.680.626.000,00		1.641.862.946,00	154.440.657,00	1.796.303.603,00	
4.1.1.01.06	Hotel Bintang Satu	115.717.000,00		25.571.000,00	2.136.000,00	27.707.000,00	
4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	247.624.000,00		343.083.814,00	31.204.919,00	374.288.733,00	
4.1.1.01.12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hotel/Rumah Kos	74.763.000,00		100.209.700,00	8.960.000,00	109.169.700,00	
4.1.1.02	Pajak Restoran	3.000.000.000,00		3.139.492.240,00	345.839.752,00	3.485.331.994,00	
4.1.1.02.01	Restoran	1.269.180.000,00		1.557.091.595,00	143.422.328,00	1.700.513.923,00	
4.1.1.02.02	Rumah Makan	894.195.000,00		844.066.823,00	84.986.064,00	929.052.887,00	
4.1.1.02.03	Kafetaria	253.836.000,00		537.123.946,00	82.422.450,00	619.546.396,00	
4.1.1.02.04	Kantin	0,00		2.921.500,00	270.000,00	3.191.500,00	
4.1.1.02.05	Katering	144.225.000,00		4.892.900,00	300.000,00	5.192.900,00	
4.1.1.02.06	Warung	438.564.000,00		393.395.478,00	34.439.010,00	427.834.488,00	
4.1.1.03	Pajak Hiburan	820.000.000,00		561.787.758,00	58.546.446,00	620.334.204,00	
4.1.1.03.01	Tontonan Film/Bookop	242.607.000,00		104.690.000,00	1.700.000,00	106.390.000,00	
4.1.1.03.02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	1.625.000,00		0,00	0,00	0,00	
4.1.1.03.07	Karaoke	275.410.000,00		226.627.300,00	28.325.990,00	254.953.290,00	
4.1.1.03.09	Sirkus/Akrobat/Sulap	5.126.000,00		6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	
4.1.1.03.10	Permainan Bilyar	3.480.000,00		8.046.500,00	661.500,00	8.708.000,00	
4.1.1.03.15	Permainan Ketangkasan	82.646.000,00		91.667.422,00	10.753.274,00	102.420.696,00	
4.1.1.03.16	Panti Pijat/Refleksi	6.766.000,00		2.063.250,00	84.000,00	2.147.250,00	
4.1.1.03.17	Mandi Uap/Spa	68.494.000,00		52.318.636,00	10.001.882,00	62.320.518,00	
4.1.1.03.19	Pertandingan Olahraga	134.446.000,00		70.374.650,00	7.010.800,00	77.385.450,00	
4.1.1.04	Pajak Reklame	1.900.000.000,00		1.894.289.985,00	135.966.500,00	2.030.256.485,00	

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PPRD - By Simdi

LRA 2021

 PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH <i>periode 1 Januari s.d 31 Desember 2021</i>						
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBI
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4	PENDAPATAN DAERAH	3.233.576.105.032,00	0,00	3.334.300.290.655,79	3.334.300.290.655,79	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	653.354.304.152,00	0,00	739.133.833.863,79	739.133.833.863,79	
4.1.1	Pajak Daerah	222.995.000.000,00	0,00	221.377.109.179,00	221.377.109.179,00	
4.1.1.35	Pajak Hotel	4.380.000.000,00	0,00	4.506.031.798,00	4.506.031.798,00	
4.1.1.35.01	Pajak Hotel	4.380.000.000,00	0,00	4.506.031.798,00	4.506.031.798,00	
4.1.1.37	Pajak Losmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1.37.01	Pajak Losmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1.42	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	120.000.000,00	0,00	86.500.000,00	86.500.000,00	
4.1.1.42.01	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	120.000.000,00	0,00	86.500.000,00	86.500.000,00	
4.1.1.43	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.900.000.000,00	0,00	1.921.182.383,00	1.921.182.383,00	
4.1.1.43.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.900.000.000,00	0,00	1.921.182.383,00	1.921.182.383,00	
4.1.1.44	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	1.250.000.000,00	0,00	1.124.495.861,00	1.124.495.861,00	
4.1.1.44.01	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	1.250.000.000,00	0,00	1.124.495.861,00	1.124.495.861,00	
4.1.1.45	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	800.000.000,00	0,00	927.500.829,00	927.500.829,00	
4.1.1.45.01	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	800.000.000,00	0,00	927.500.829,00	927.500.829,00	
4.1.1.46	Pajak Kantin dan Sejenisnya	3.000.000,00	0,00	3.748.000,00	3.748.000,00	
4.1.1.46.01	Pajak Kantin dan Sejenisnya	3.000.000,00	0,00	3.748.000,00	3.748.000,00	
4.1.1.47	Pajak Warung dan Sejenisnya	545.000.000,00	0,00	444.081.672,00	444.081.672,00	
4.1.1.47.01	Pajak Warung dan Sejenisnya	545.000.000,00	0,00	444.081.672,00	444.081.672,00	
4.1.1.49	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	2.000.000,00	0,00	4.580.500,00	4.580.500,00	
4.1.1.49.01	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	2.000.000,00	0,00	4.580.500,00	4.580.500,00	
4.1.1.50	Pajak Tontonan Film	25.000.000,00	0,00	29.564.000,00	29.564.000,00	
4.1.1.50.01	Pajak Tontonan Film	25.000.000,00	0,00	29.564.000,00	29.564.000,00	
4.1.1.51	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1.51.01	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1.54	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	240.000.000,00	0,00	225.684.030,00	225.684.030,00	
4.1.1.54.01	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	240.000.000,00	0,00	225.684.030,00	225.684.030,00	

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Prebid & B. Simad

LRA 2022

 PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH <i>periode 1 Januari s.d 31 Desember 2022</i>						
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBI
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4	PENDAPATAN DAERAH	3.297.814.435.223,00	0,00	3.293.132.139.343,02	3.293.132.139.343,02	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	690.532.412.044,00	0,00	700.428.762.449,02	700.428.762.449,02	
4.1.1	Pajak Daerah	364.900.375.000,00	0,00	280.277.331.102,00	280.277.331.102,00	
4.1.1.35	Pajak Hotel	6.392.000.000,00	0,00	5.994.505.566,00	5.994.505.566,00	
4.1.1.35.01	Pajak Hotel	6.392.000.000,00	0,00	5.994.505.566,00	5.994.505.566,00	
4.1.1.42	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	108.000.000,00	0,00	96.148.500,00	96.148.500,00	
4.1.1.42.01	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	108.000.000,00	0,00	96.148.500,00	96.148.500,00	
4.1.1.43	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.675.000.000,00	0,00	2.707.722.092,00	2.707.722.092,00	
4.1.1.43.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.675.000.000,00	0,00	2.707.722.092,00	2.707.722.092,00	
4.1.1.44	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	1.505.000.000,00	0,00	1.514.202.813,00	1.514.202.813,00	
4.1.1.44.01	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	1.505.000.000,00	0,00	1.514.202.813,00	1.514.202.813,00	
4.1.1.45	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	1.350.000.000,00	0,00	1.467.505.757,00	1.467.505.757,00	
4.1.1.45.01	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	1.350.000.000,00	0,00	1.467.505.757,00	1.467.505.757,00	
4.1.1.46	Pajak Kantin dan Sejenisnya	7.000.000,00	0,00	6.758.000,00	6.758.000,00	
4.1.1.46.01	Pajak Kantin dan Sejenisnya	7.000.000,00	0,00	6.758.000,00	6.758.000,00	
4.1.1.47	Pajak Warung dan Sejenisnya	810.000.000,00	0,00	807.980.674,00	807.980.674,00	
4.1.1.47.01	Pajak Warung dan Sejenisnya	810.000.000,00	0,00	807.980.674,00	807.980.674,00	
4.1.1.49	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	3.000.000,00	0,00	1.964.200,00	1.964.200,00	
4.1.1.49.01	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	3.000.000,00	0,00	1.964.200,00	1.964.200,00	
4.1.1.50	Pajak Tontonan Film	170.283.500,00	0,00	366.579.500,00	366.579.500,00	
4.1.1.50.01	Pajak Tontonan Film	170.283.500,00	0,00	366.579.500,00	366.579.500,00	
4.1.1.51	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	1.667.000,00	0,00	15.865.500,00	15.865.500,00	
4.1.1.51.01	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	1.667.000,00	0,00	15.865.500,00	15.865.500,00	
4.1.1.54	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	498.388.500,00	0,00	351.046.954,00	351.046.954,00	
4.1.1.54.01	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	498.388.500,00	0,00	351.046.954,00	351.046.954,00	
4.1.1.55	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	9.759.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
4.1.1.55.01	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	9.759.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Prebid & B. Simad

LRA 2023

 PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Tahun Anggaran 2023 periode 01 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023						
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE III	TOTAL	
4	PENDAPATAN DAERAH	3.504.499.144.538,00	0,00	3.476.512.675.652,55	3.476.512.675.652,55	(27.986.468.885,45)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	747.550.514.563,00	0,00	768.640.705.768,55	768.640.705.768,55	21.090.191.205,55
4.1.01	Pajak Daerah	292.600.000.000,00	0,00	296.270.228.744,00	296.270.228.744,00	3.670.228.744,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	7.000.000.000,00	0,00	7.581.901.363,00	7.581.901.363,00	581.901.363,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	6.800.000.000,00	0,00	7.456.745.863,00	7.456.745.863,00	656.745.863,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	6.800.000.000,00	0,00	7.456.745.863,00	7.456.745.863,00	656.745.863,00
4.1.01.06.08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	200.000.000,00	0,00	125.155.500,00	125.155.500,00	(74.844.500,00)
4.1.01.06.08.0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	200.000.000,00	0,00	125.155.500,00	125.155.500,00	(74.844.500,00)
4.1.01.07	Pajak Restoran	11.200.000.000,00	0,00	11.846.670.651,00	11.846.670.651,00	646.670.651,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	6.500.000.000,00	0,00	6.272.412.697,00	6.272.412.697,00	(227.587.303,00)
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	6.500.000.000,00	0,00	6.272.412.697,00	6.272.412.697,00	(227.587.303,00)
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	1.627.500.000,00	0,00	2.017.278.763,00	2.017.278.763,00	389.778.763,00
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	1.627.500.000,00	0,00	2.017.278.763,00	2.017.278.763,00	389.778.763,00
4.1.01.07.03	Pajak Katering dan Sejenisnya	2.000.000.000,00	0,00	2.369.225.068,00	2.369.225.068,00	369.225.068,00
4.1.01.07.03.0001	Pajak Katering dan Sejenisnya	2.000.000.000,00	0,00	2.369.225.068,00	2.369.225.068,00	369.225.068,00
4.1.01.07.04	Pajak Kantin dan Sejenisnya	70.000.000,00	0,00	65.475.137,00	65.475.137,00	(4.524.863,00)
4.1.01.07.04.0001	Pajak Kantin dan Sejenisnya	70.000.000,00	0,00	65.475.137,00	65.475.137,00	(4.524.863,00)
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	1.000.000.000,00	0,00	1.083.171.606,00	1.083.171.606,00	83.171.606,00
4.1.01.07.05.0001	Pajak Warung dan Sejenisnya	1.000.000.000,00	0,00	1.083.171.606,00	1.083.171.606,00	83.171.606,00
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	2.500.000,00	0,00	39.107.580,00	39.107.580,00	36.607.580,00
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	2.500.000,00	0,00	39.107.580,00	39.107.580,00	36.607.580,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	1.800.000.000,00	0,00	1.803.663.940,00	1.803.663.940,00	3.663.940,00
4.1.01.08.01	Pajak Tontonan Film	700.000.000,00	0,00	612.968.163,00	612.968.163,00	(87.031.837,00)
4.1.01.08.01.0001	Pajak Tontonan Film	700.000.000,00	0,00	612.968.163,00	612.968.163,00	(87.031.837,00)
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	20.000.000,00	0,00	41.787.150,00	41.787.150,00	21.787.150,00
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	20.000.000,00	0,00	41.787.150,00	41.787.150,00	21.787.150,00
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	370.000.000,00	0,00	414.353.855,00	414.353.855,00	44.353.855,00
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	370.000.000,00	0,00	414.353.855,00	414.353.855,00	44.353.855,00
4.1.01.08.06	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	550.000,00	0,00	2.650.100,00	2.650.100,00	2.000.100,00
4.1.01.08.06.0001	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	550.000,00	0,00	2.650.100,00	2.650.100,00	2.000.100,00
4.1.01.08.07	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	9.450.000,00	0,00	8.690.850,00	8.690.850,00	(759.150,00)
4.1.01.08.07.0001	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	9.450.000,00	0,00	8.690.850,00	8.690.850,00	(759.150,00)
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	380.000.000,00	0,00	370.451.850,00	370.451.850,00	(9.548.150,00)
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	380.000.000,00	0,00	370.451.850,00	370.451.850,00	(9.548.150,00)

Akses keseluruhan LRA



https://drive.google.com/drive/folders/15uZN61pQ4Z-wmWxOI7liFryz_v4Sb8zZ?usp=sharing



Lampiran 9. Prosentase bagi hasil

DAFTAR DTW YANG PKS DENGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2022-2025

NO	DAYA TARIK	PENGELOLA	ALAMAT	NOMOR PKS	PERSENTASE		MASA BERLAKU PKS		KET
					PENGELOLA	PEMDA	MULAI	BERAKHIR	
1	AIR PANAS CIPARI	DISPORAPAR	Jl. Jend A.Yani No.8 Cilacap			100%			
2	CURUG GIRIWANGI	PEMDES	Cipari	556/0193.1/27	75%	25%	1-Mar-2021	28-Feb-2023	PKS DALAM PROSES PERPANJANGAN
3	CURUG GEULIS	PEMDES	Cipari	556/0781/27	75%	25%	1-Sep-2021	30-Jun-2023	
4	CURUG CIMENDAWAY	PERHUTANI	Dayeuhluhur	Nomer:10/PKS.Wisata/Byb /Divre Jateng/2022, Nomer: 556/0837.1/27, Nomer/PKS/Lodaya/2022	70%	30%	1-Apr-2022	31-Mar-2023	
5	HUTAN PAYAU	PERHUTANI	Cilacap Utara	Nomer:11/PKS.Wisata/Byb /Divre Jateng/2022, Nomer: 556/0836.1/27, Nomer/PKS/Purwa Lestari/2022	65%	35%	1-Apr-2022	31-Mar-2023	
6	GUNUNG SRANDIL	PEMDES	Adipala	556/0009/27/2020	75%	25%	3-Jan-2023	3-Jan-2025	
7	GUNUNG SELOK	PERHUTANI	Adipala	556/0690/27	72,5%	27,5%	12-Jun-2021	11-Jun-2023	
8	WADUK KUBANGKANGKUNG	PERKEBUNAN	Kawunganten	556/192.1/27	75%	25%	4-Mar-2021	3-Mar-2022	PKS DALAM PROSES PERPANJANGAN
9	KEMIT FOREST	PERHUTANI	Sidareja	04/PKS/MDH Giri Mulya/1/2022	92%	8%	3-Jan-2022	31-Dec-2024	
10	TAMAN DINO SAURUS	Bpk.IRYANTO	Gandungmangga	556/0273/27	92%	8%	1-Mar-2023	28-Feb-2025	

Mengetahui
KABID PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA


KASIDI, S.Sos., M.M.
NIP. 19681224419903 1002



Lampiran 10 Surat keterangan lulus seminar proposal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsatzu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR PROPOSAL

Nomor: 113/Un.19/FEBI.J.E.S/PP.009/1/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : Dena Vimalia Indriyanti
NIM : 1917201255
Program Studi : Ekonomi Syariah
Pembimbing Skripsi : Dr. Atabik, M.Ag.
Judul : Analisis strategi Disporapar dalam mengelola wisata melalui pengawasan pertumbuhan, kontribusi dan efektivitas retribusi pariwisata terhadap PAD

Pada tanggal 22 Januari 2024 telah melaksanakan seminar proposal dan dinyatakan **LULUS**, dengan perubahan proposal/ hasil proposal sebagaimana tercantum pada berita acara seminar.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan skripsi.

Purwokerto, 22 Januari 2024
Koord. Prodi Ekonomi Syariah



H. Sochim, Lc., M.Si.
NIP. 19691009 200312 1 001

Lampiran 11 Surat keterangan lulus ujian komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsalzu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF
Nomor: 3734/Un.19/FEBI.J.ES/PP.009/8/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : Dena Virmalia Indriyanti

NIM : 1917201255

Program Studi : Ekonomi Syariah

Pada tanggal 11 Agustus 2023 telah melaksanakan ujian komprehensif dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **82 / A-**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mendaftar ujian munaqasyah.

Purwokerto, 14 Agustus 2023
Koord. Prodi Ekonomi Syariah



Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I
NIP. 19851112 200912 2 007

Lampiran 12 Sertifikat PPL

 <p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM <small>Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624, Fax. 0281-636533, Website: febi.uinsaizu.ac.id</small></p>	
<h2 style="color: #8B4513;">Sertifikat</h2>	
<p>Nomor : 1142/Un.19/LAB.FEBI/PP.009/03/2023</p>	
<p>Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa :</p>	
<p>Nama : Dena Vernalia NIM : 1917201255</p>	
<p>Telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Periode I Tahun Ajaran 2023 di :</p>	
<p>Kedai Mitareka Purwokerto</p>	
<p>Mulai Bulan Januari 2023 sampai dengan Februari 2023 dan dinyatakan Lulus dengan mendapatkan nilai A . Sertifikat Ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti ujian <i>Munaqosyah</i>/Skripsi.</p>	
<p>Mengetahui, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam</p>  <p>Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag NIP.19730921 200212 1 004</p>	<p>Purwokerto, 27 Maret 2023</p> <p>Kepala Laboratorium FEBI</p>  <p>H. Sochimlin, Lc., M.Si. NIP. 19691009 200312 1 001</p>



Lampiran 13 Sertifikat PBM



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, Fax. 0281-636533, Website: febi.uinsaizu.ac.id

Sertifikat

Nomor : 1143/Un.19/KALAB.FEBI/PP.009/03/2023

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Program Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Dena Virnalia I
NIM : 1917201255

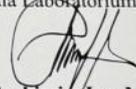
Dinyatakan Lulus dengan Nilai **82 (A-)** dalam mengikuti Praktek Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Periode I Tahun 2023.

Mengetahui,
Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag
NIP.19730921 200212 1 004

Purwokerto, 27 Maret 2023
Kepala Laboratorium FEBI



H. Sochim, Lc., M.Si
NIP. 19691009 200312 1 001



Lampiran 14 Sertifikat Aplikom

SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



IAIN PURWOKERTO

No. IN.17/UPT-TIPD/9699/IV/2022

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

Diberikan Kepada:

DENA VIRNALIA INDRİYANTI
NIM: 1917201255

Tempat / Tgl. Lahir: Cilacap, 25 Desember 2001

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto **Program Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	80 / B+
Microsoft Excel	75 / B
Microsoft Power Point	80 / B+





Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc
NIP.19801215 200501 1 003

Purwokerto, 02 April 2022
 Kepala UPT TIPD





Lampiran 15 Sertifikat KKN



The certificate is titled "Sertifikat" and is issued by the Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) of Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. It certifies that the student, Dena Vernalia Indriyanti (NIM: 1917201255), has successfully completed the KKN (Kuliah Kerja Nyata) program for the 50th anniversary of the university in 2022, with a grade of A (91).

Sertifikat
Nomor Sertifikat : 0721/K.LPPM/KKN.50/09/2022

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menyatakan bahwa:

Nama Mahasiswa : **DENA VIRNALIA INDRIYANTI**
NIM : **1917201255**
Fakultas : **Ekonomi & Bisnis Islam**
Program Studi : **Ekonomi Syariah (ESY)**

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-50 Tahun 2022,
dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A (91)**.



Certificate Validation

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**A. Identitas Diri**

1. Nama Lengkap : Dena Vernalia Indriyanti
2. NIM : 1917201255
3. Tempat/ Tgl. Lahir : Cilacap, 25 Desember 2001
4. Alamat Rumah : Jl. Jend. A. Yani Rt 03/ Rw 08 Desa Adipala,
Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah
5. Nama Orang Tua
Ayah : Didik Supriyanto
Ibu : Anih Utariningsih

B. Riwayat Pendidikan

1. TK/ PAUD : TK Pertiwi Adipala
2. SD : SD N 02 Adipala
3. SMP : SMP N 1 Adipala
4. SMA : SMA N 3 Cilacap
5. S1 : UIN K.H. Saifuddin Zuhri

C. Pengalaman Organisasi

1. HMI Komisariat Febi
2. KOHATI Cabang Purwokerto
3. HMJ Ekonomi Syariah
4. DEMA UIN SAIZU

Purwokerto 3, Desember 2024



Dena Vernalia Indriyanti
1917201255